

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA TIMIKA:  
Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

*Anna Asmara Suprihandayani*

*NIM: 011314005*

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA TIMIKA:  
Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh:

*Anna Asmara Suprihandayani*

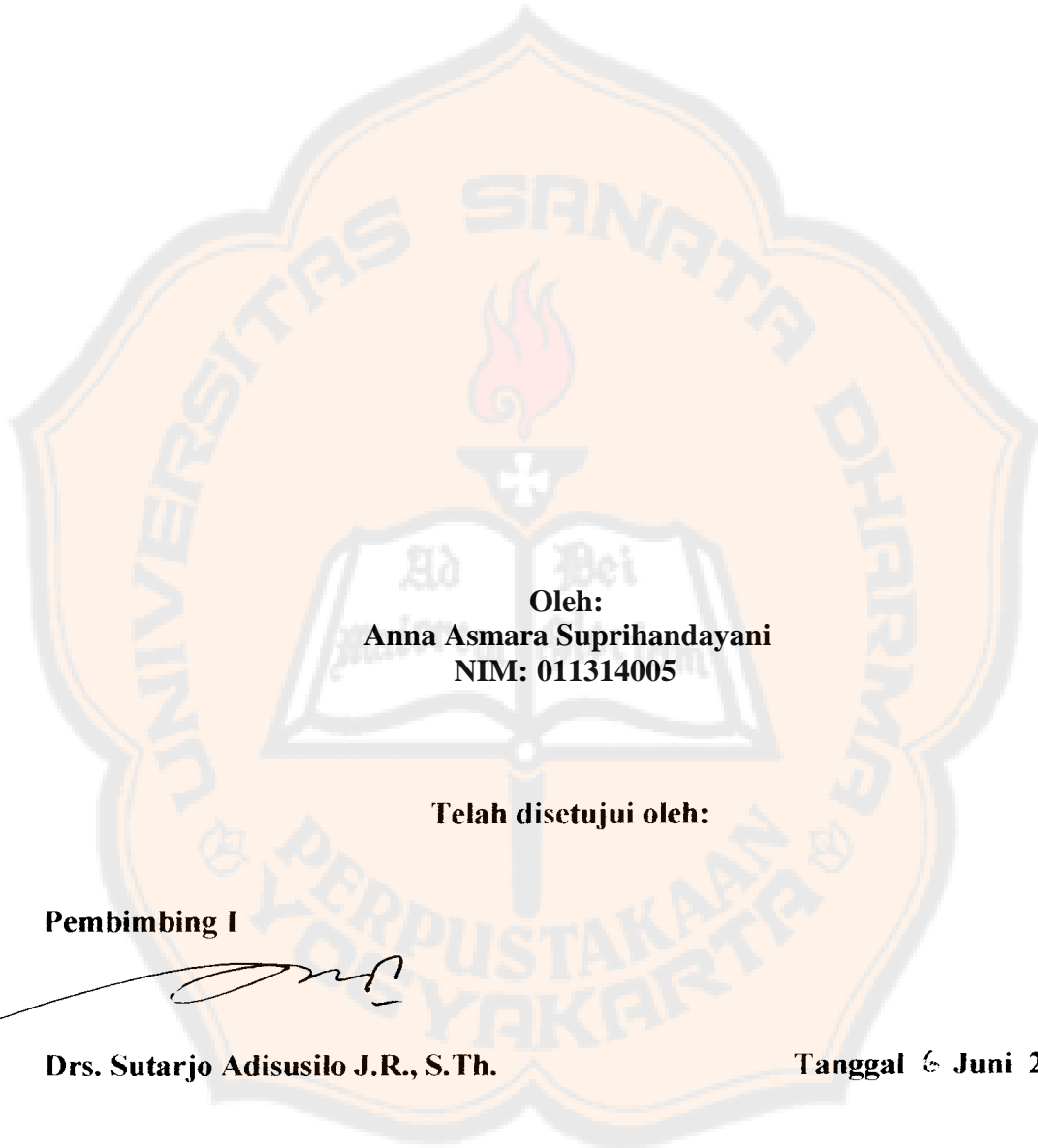
*NIM: 011314005*

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**SKRIPSI**

**SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA TIMIKA:  
Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001**



Oleh:

**Anna Asmara Suprihandayani  
NIM: 011314005**

Telah disetujui oleh:

**Pembimbing I**

**Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.**

**Tanggal 6 Juni 2007**

**Pembimbing II**

**Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.**

**Tanggal 6 Juni 2007**

SKRIPSI

SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA TIMIKA:  
Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
Anna Asmara Suprihandayani  
NIM: 011314005

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 12 Juni 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Anggota : Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Yogyakarta, 12 Juni 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



(Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph. D)



PERSEMBAHAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

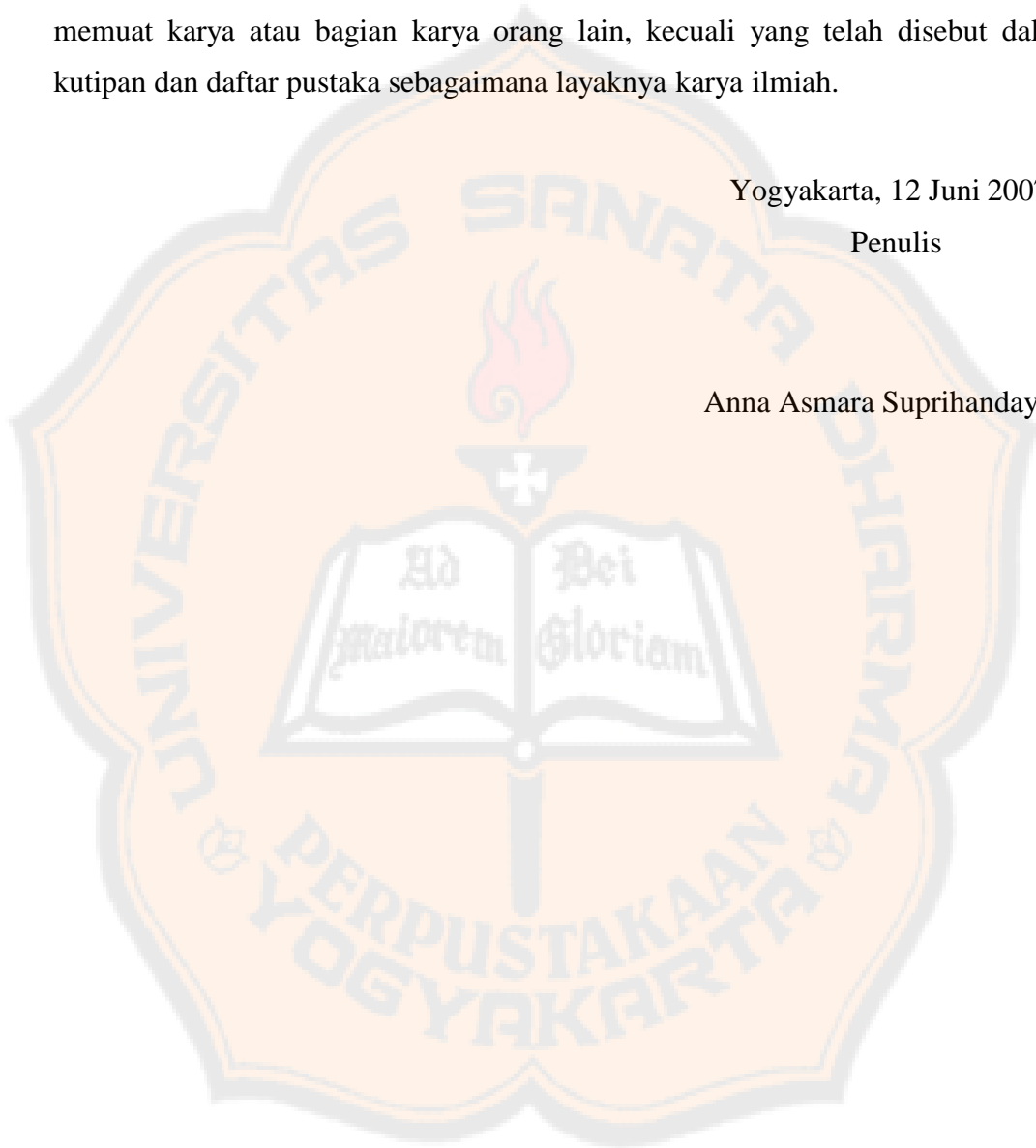
## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 12 Juni 2007

Penulis

Anna Asmara Suprihandayani



**MOTTO**

Ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan,  
ketahuilah Tuhan memiliki rencana untukmu.  
Jika engkau percaya pada-Nya,  
Ia akan memberimu berkat-berkat besar terbaik  
yang seringkali tidak dengan cara seperti yang kita bayangkan.  
(Anthony Harton)

Perkataan yang menyenangkan bagaikan sarang madu,  
manis bagi hati dan obat bagi tulang.

(NN)

Orang yang budiman selalu memikirkan  
apa yang salah pada dirinya sendiri  
dan bukan memikirkan apa yang terjadi  
pada diri orang lain.

(NN)

Kegagalan dimulai selagi ada kesempatan  
dan kita tidak mencoba.

(Mo Goéng)

**ABSTRAK**

**SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA TIMIKA:  
Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001**

**Oleh: Anna Asmara Suprihandayani  
NIM: 011314005**

Penelitian berjudul “*Sejarah Perkembangan Kota Timika: Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001*” ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1). Proses awal berdirinya Kota Timika; 2). Pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika, dan; 3). Perkembangan Kota Timika tahun 1960-2001 dan posisi penduduk asli dalam perkembangan Kota Timika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan tahapan sebagai berikut: 1). Pemilihan dan penentuan persoalan pokok untuk diteliti; 2). Heuristik dengan mengumpulkan dokumen sebagai sumber; 3). Verifikasi dengan membandingkan dan mencocokkan berbagai sumber yang ada sebagai kritik intern; 4). Interpretasi dengan menganalisis sumber secara cermat, dan; 5). Historiografi dalam bentuk deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Berdirinya Kota Timika berawal pada saat PT. Freeport Indonesia mulai didirikan oleh Freeport Sulphur Company pada tahun 1960-an sebagai tindak lanjut penemuan sumber tambang oleh Bangsa Barat yang datang ke Papua; 2). PT. Freeport Indonesia berpengaruh terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan struktur sosial masyarakat Kota Timika. Lingkungan fisik berubah dari wilayah yang masih tradisional menjadi sebuah kota, sementara itu penduduk asli termarginalisasi oleh para pendatang. Di samping itu kehadiran PT. Freeport Indonesia juga membawa dampak dalam bidang fisik geografis, sosial dan ekonomi di Timika. Kondisi fisik geografis Timika mengalami perubahan, yaitu bentang alam gunung menjadi lubang raksasa dan danau. Limbah operasional Freeport juga mencemari tanah dan air sehingga ekosistem alam menjadi rusak dan kehidupan masyarakat disekitarnya jadi terancam. Sementara itu dampak sosial yang sering muncul adalah konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan karena persoalan hak ulayat tanah dan benturan kebudayaan. Di sisi lain kehadiran Freeport membawa kemajuan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat Timika, yaitu dari sistem perkonomian tradisional menjadi sistem perkonomian modern dan; 3). Timika mengalami perkembangan sejak tahun 1960 sampai sekarang di bidang ekonomi seperti meningkatnya pendapatan penduduk, di bidang sosial seperti meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan, di bidang sarana dan prasarana fisik seperti meningkatnya berbagai fasilitas umum serta di bidang pemerintahan seperti meningkatnya status daerah.

**ABSTRACT**

**THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE CITY OF TIMIKA:  
A Case Study on Impact of PT. Freeport Indonesia During 1960-2001**

**By:**  
**Anna Asmara Suprihandayani**  
**NIM: 011314005**

The research titled “*The History of Development of The City of Timika: A Case Study on Impact of PT. Freeport Indonesia During 1960-2001*” aimed to describe and to analyze: 1) The early process of establishment of the City of Timika; 2) The impact of the PT. Freeport Indonesia toward environment around the company and toward society in the City of Timika, and; 3) Development of the City of Timika during 1960-2001 and natives position.

A method employed in this research was historical method with steps as follow: 1) Choosing and deciding main problem to be observed; 2) Heuristic by collecting document as sources; 3) Verification by comparing and meeting various sources available as internal cratics; 4) Interpretation by analyzing the sources accurately, and; 5) Historiography in the form of descriptive-analytic.

The result of this research showed that: 1) The establishment of the City of Timika began when Freeport Sulphur Company started to establish PT. Freeport Indonesia as a follow-up action upon the discovery of mine resource by Western who came to Papua; 2) The establishment of PT. Freeport Indonesia gives impacts toward environment around the company and toward social structure in the City of Timika. The environment to changed from traditional territory into a city, while the natives become marginal people. Beside that, the establishment of PT. Freeport Indonesia gives impacts toward in term geographic, social and economic of Timika. In term geographic to changed from a mount into a lake. The rubbish of the Freeport is too dump land and water so that to destroy the environment and threatened the human life. Beside that, the social impact which often appear between natives and the company because ownner ship problem and the culture clash. In other side, the establishment of PT. Freeport Indonesia to improvement the economic of Timika, that is from traditional economic become modern economic and; 3) The City of Timika had developed since 1960 until today in terms of economy as the rise of the society income, in terms social as the rise of the education and health facilities, in terms public facilities as the rise of the public facilities and in terms governmental as the rise of the district status.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih karunia-Nya skripsi yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Kota Timika: Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001*” ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan, khususnya kepada:

1. Drs. S. Adisusilo J.R., S.Th., dan Drs. Y.R. Subakti, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangannya dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan kritik serta sarannya untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 12 Juni 2007

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan penelitian .....	13
2. Manfaat penelitian .....	13
D. Kajian Pustaka dan Landasan Teori .....	14
1. Kajian pustaka .....	14
2. Landasan teori .....	18
E. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	55
1. Metode penelitian .....	55
2. Pendekatan Penelitian .....	59
F. Sistematika Penulisan .....	60
<b>BAB II PROSES AWAL BERDIRINYA KOTA TIMIKA .....</b>	<b>62</b>
A. Latar Belakang Berdirinya Kota .....	62
1. Kedatangan bangsa Barat di Papua .....	63
2. Berdirinya PT. Freeport Indonesia .....	70
B. Berdirinya Kota Timika .....	79

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berdirinya Kota Timika....	84
1. Faktor pendukung .....	84
2. Faktor penghambat .....	86
<b>BAB III PENGARUH PT. FREEPORT INDONESIA</b>	
<b>TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DI SEKITARNYA</b>	
<b>DAN MASYARAKAT KOTA TIMIKA .....</b>	<b>91</b>
A. Pengaruh PT. Freeport Indonesia	
Terhadap Lingkungan Fisik di Sekitarnya .....	91
B. Pengaruh PT. Freeport Indonesia	
Terhadap Masyarakat Kota Timika .....	98
<b>BAB IV PERKEMBANGAN TIMIKA TAHUN 1960-2001 .....</b>	<b>115</b>
A. Perkembangan Timika di Berbagai Bidang .....	115
1. Kondisi umum .....	115
2. Bidang Ekonomi .....	117
3. Bidang Sosial .....	127
4. Sarana dan prasarana fisik .....	131
5. Pemerintahan .....	134
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Timika ....	137
1. Faktor internal .....	137
2. Faktor eksternal .....	141
C. Posisi Penduduk Asli Dalam Perkembangan Timika .....	144
1. Penduduk asli di wilayah Timika .....	144
2. Posisi penduduk asli dalam perkembangan Timika.....	152
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>159</b>
A. Kesimpulan .....	159
B. Saran .....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>164</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
A. <u>Dokumen:</u>	
1. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia	
No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 .....	165



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 1996 .....	160
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999 .....	185
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2000 .....	210

### B. Daftar Tabel:

1. Tabel Perekonomian Irian Jaya Masa Kekuasaan Belanda 1950-1961 .....	216
2. Tabel Jumlah Desa dan Keadaan Alam di Kecamatan Mimika Timur 1992 .....	217
3. Tabel Perkembangan Penduduk di Kabupaten Fak-Fak 1982-1987 .....	219
4. Tabel Penduduk di Kabupaten Fak-Fak Menurut Jenis Kelamin dan Per Kecamatan 1987 .....	219
5. Tabel Kependudukan di Kecamatan Mimika Timur .....	220
6. Tabel Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Mimika Timur 1992 .....	222
7. Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Mimika Timur 1992 .....	223
8. Tabel Fasilitas SD di Kecamatan Mimika Timur 1992 .....	224
9. Tabel Nama Kabupaten/Kota, Ibukota kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan dan desa di Papua 2002 .....	225
10. Tabel Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan UPT di Papua 2002 .....	226
11. Tabel Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Papua 2002 .....	227
12. Tabel banyaknya Desa menurut Klasifikasi Desa dan Kabupaten/Kota di Papua 2000 .....	235
13. Tabel Banyaknya Desa/Kelurahan dan Alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa Propinsi Papua 200/2001 .....	236
14. Tabel Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Mimika Tahun 1992-2002 .....	237
15. Tabel Jumlah Murid dan Alokasi Dana Pendidikan Irian Barat .....	238

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>C. <u>Daftar Peta:</u></b>	
1. Peta Papua/Irian Jaya .....	241
2. Peta Kota Timika .....	243
3. Peta daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mimika .....	244
4. Peta pembagian daerah Kerja PTFI .....	245
5. Peta Area Penambangan Freeport .....	246
6. Peta Wilayah Suku-suku di Sekitar Pertambangan Freeport .....	247
<b>D. <u>Daftar Bagan:</u></b>	
1. Bagan Struktur Pemerintahan Adat Suku Amungme .....	248
2. Bagan Struktur Pemerintahan Adat Suku Kamoro .....	249
<b>E. <u>Daftar Gambar:</u></b>	
1. Gambar Grasberg .....	250
2. Gambar Proses Operasi penambangan Freeport .....	251
3. Gambar Pelabuhan Pengapalan Freeport .....	253
4. Gambar Daerah Pembuangan Tailing Sungai Aijwa dan Daerah Pengolahan Tailing .....	254
5. Gambar Perkampungan Banti dan Rumah Rakyat Tembagapura .....	255
6. Gambar Kota Tembagapura .....	256
7. Gambar Kota Kuala Kencana .....	257
8. Gambar Jean Jaques Dozy .....	258
9. Gambar Ekspedisi H. Colijn .....	259
10. Gambar Orang Amungme .....	260
11. Gambar Orang Kamoro .....	262
<b>E. <u>Lain-lain:</u></b>	
Sejarah Singkat PTFI .....	264
<b>SUPLEMEN SILABUS</b> .....	<b>268</b>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata “Timika” tampaknya masih asing bagi kita. Lain halnya bila yang kita dengar adalah kata “Papua”, maka kita langsung tahu bahwa yang dimaksud adalah pulau besar berbentuk kepala burung yang berada di Indonesia paling Timur. Kata “Papua” juga identik dengan orang yang berambut keriting dan berkulit hitam yang kita kenal sebagai penduduk asli Papua. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “*Apa hubungan antara Timika dengan Papua?*”

Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas 892.000 km<sup>2</sup> yang letaknya antara 8° sampai 12° Lintang Selatan dengan iklim tropis. Berdasarkan perjanjian *Den Haag* Tanggal 16 Mei 1895, pulau ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian Barat milik Hindia Belanda dan bagian Timur menjadi milik Jerman. Saat ini bagian Barat Papua menjadi wilayah RI dengan status Daerah Tingkat I Papua dengan Ibukota Jayapura, Daerah Tingkat I Irian Jaya Tengah dengan Ibukota Timika, dan Daerah Tingkat I Irian Jaya Barat dengan Ibukota Sorong. Luas seluruhnya adalah 420.000 km<sup>2</sup> merupakan 22% luas seluruh daratan Indonesia. Sedangkan bagian Timur pulau ini menjadi negara berdaulat dengan nama Papua Nugini (PNG).<sup>1</sup>

Perjalanan panjang sejarah Papua diwarnai oleh masa-masa kekuasaan Pemerintah Belanda. Kekuasaan Belanda di Irian (nama yang digunakan

---

<sup>1</sup> Amiruddin Al Rahab, *Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer*, Jakarta, ELSAM, 2003, hlm. 14.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk menyebut Papua sebelumnya) diawali ketika pada tahun 1828 pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa daerah Pantai Selatan, mulai dari garis 141° BT sampai semenanjung *Goede Hoop* di Pantai Utara, kecuali daerah-daerah yang dikuasai oleh Sultan Tidore sebagai daerah miliknya. Pernyataan hak atas daerah tersebut ditandai dengan sebuah upacara peresmian berdirinya benteng Belanda yang pertama di daratan Irian Jaya pada tanggal 24 Agustus 1828, yaitu pada hari ulang tahun Raja Willem I dari Belanda. Sejak saat itu negara-negara Eropa mengakui bahwa Belanda adalah pemilik kedaulatan atas Irian Jaya.<sup>2</sup>

Pemerintah kolonial Hindia Belanda terus berkuasa sampai pada akhirnya Irian Barat yang sebelumnya tergabung dalam Karesidenan Maluku, setelah Perang Pasifik dijadikan suatu karesidenan tersendiri dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kedudukan propinsi ini diperdebatkan dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia. Pemerintah Belanda melakukan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan Irian Jaya dan hal ini ditentang keras oleh Indonesia. Kedua belah pihak terus melakukan perundingan-perundingan untuk memecahkan persoalan ini sampai pada akhirnya Indonesia mencari dukungan melalui sidang umum PBB, yang menolak permohonan Indonesia dan hal ini berdampak drastis bagi politik dalam negeri Indonesia menjelang akhir tahun 1957.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta, Djambatan, 1994, hlm. 47.

<sup>3</sup> Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*, Jakarta, Gramedia, 1979, hlm. 18.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah masalah-masalah dalam negeri dapat diatasi pada akhir tahun 1961 dilakukan serangan-serangan militer terbatas melawan Belanda di Irian Barat. Irian Barat akhirnya secara resmi menjadi bagian dari RI tahun 1963 setelah berdasarkan usul-usul Bunker ditandatangani *New York Agreement* antara pemerintah Indonesia dan Belanda pada tahun 1962. Pernyataan bergabung dengan Indonesia dilakukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.<sup>4</sup>

Pulau Papua dialiri oleh sungai-sungai yang besar, dan di beberapa tempat terdapat danau-danau yang luas. Kontur permukaan Pulau Papua bergunung-gunung dengan tanah yang keras berkapur berwarna abu-abu dan coklat tua. Secara geografis Pulau Papua terbagi dalam tiga daerah pertama daerah kaki gunung di sebelah Utara, kedua daerah pantai di sebelah Selatan dan ketiga daerah pegunungan di bagian tengah atau Pegunungan Tengah. Pegunungan Tengah membelah Papua menjadi dua bagian yang membentang sepanjang 650 km dari Timur ke Barat.

Pegunungan Tengah yang merupakan punggung Papua, terdiri atas pegunungan Jayawijaya yang dekat dengan perbatasan Papua Nugini dan dipisahkan oleh Lembah Baliem dari Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Weyland yang terletak di sebelah Barat Danau Paniai. Sementara itu daerah Selatan merupakan dataran aluvial yang sangat luas, yang dialiri sungai-sungai seperti Sungai Digul, Braza, Lorentz, Cemara dan Otakwa dengan anak-anak sungainya yang berhulu di Pegunungan Tengah dan bermuara di Laut Arafuru.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 19. Proses integrasi Papua ke Indonesia dan dampak politiknya bagi orang Papua lihat John R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo, 1993).

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dataran ini membentang mulai dari Mimika di Barat sampai ke Merauke di Timur.<sup>5</sup>

Pulau Papua memiliki curah hujan dan kelembaban yang rendah sehingga kaya akan hutan tropis dengan flora dan fauna yang beraneka ragam. Penduduk asli yang mendiami pulau ini adalah rumpun bangsa Melanesia yang terdiri atas berbagai suku dan tinggal berpencar. Saat ini telah diidentifikasi sekitar 250 suku yang mendiami pulau terbesar di Indonesia ini. Suku-suku besar diantaranya adalah Suku Tor dan Bgu yang tinggal di daerah Pantai Utara Irian, Suku Asmat dan Marind Anim yang tinggal di daerah Selatan Irian yaitu Merauke, Suku Ngalum dan Auwyu yang tinggal di daerah perbatasan antara Irian dan Papua New Guinea dan Suku-suku yang tinggal di daerah tengah yaitu di sekitar Pegunungan Jaya Wijaya dan Kabupaten Mimika seperti Suku Dani, Moni, Kamoro, Amungme, Nduga, Ekagi dan Sempan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah-daerah pantai dan masih menjalankan pola-pola kehidupan tradisional. Mereka menggunakan bahasa yang beraneka ragam, misalnya bahasa-bahasa Austronesia (rumpun bahasa Indoensia, Malaysia, Filipina, Malagasi, pulau-pulau Lautan Teduh dan penduduk asli Taiwan) yang bercampur dengan bahasa Papua.<sup>6</sup>

Beberapa daerah pantai Irian Jaya sudah lama mempunyai kontak dengan saudagar-saudagar budak dan pelaut-pelaut lain dari Kepulauan Melayu sebelum kedatangan orang Eropa. Melalui kontak tersebut penduduk di Kepulauan Raja Ampat, Kepala Burung dan bagian Teluk Cendrawasih

---

<sup>5</sup> Amiruddin Al Rahab, *Op. cit.*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Ross Garnaut dan Chris Manning, *Op. cit.*, hlm. 5-13.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mulai menggunakan alat-alat dari logam. Perubahan yang mendasar dan meluas kemudian terjadi pada abad ke-20 melalui interaksi dengan masyarakat Eropa dan Asia yang telah berperadaban lebih maju yang datang ke Papua. Orang-orang Eropa datang ke Papua berkaitan dengan perindustrian yang tumbuh pesat di Benua Eropa dan Amerika abad ke-19 dan abad ke-20. Mereka melakukan eksplorasi ke berbagai daerah di luar Benua Eropa dan Amerika untuk mencari bahan mentah industri mereka.

Eksplorasi awal mereka di Irian Jaya berhasil menemukan sumber-sumber minyak tanah, dan dari sinilah pada tahun 1935 sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan Amerika menggabungkan sejumlah modal dan mendirikan perusahaan gabungan eksplorasi bahan-bahan minyak tanah di Irian Jaya yang disebut NNGPM (*Nederlandsch Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij*). Pemerintah jajahan Hindia Belanda yang pada saat itu sebagai penguasa di Irian Jaya memberikan hak konsesi kepada NNGPM seluas kurang lebih sepertiga daerah Irian Jaya.<sup>7</sup>

Industri minyak kemudian berkembang di Irian Jaya yang diikuti dengan semakin meluasnya kegiatan eksplorasi ke berbagai daerah di pedalaman Irian Jaya. Pemerintah Belanda mengirim para sarjana dari berbagai disiplin ilmu (Zoologi, Botani, Kehutanan, Geologi, Geografi dan Antropologi) dari negeri Belanda untuk memperoleh gambaran daerah kekuasaannya sekaligus mengembangkan peta Irian Jaya. Dari berbagai eksplorasi yang dilakukan akhirnya ditemukan sumber bahan tambang tembaga di Gunung Etsberg oleh

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Op. cit.*, hlm. 61. *Konsesi* adalah izin untuk membuka tambang.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Jean Jacques Dozy* dalam ekspedisi *Colijn* yang akan mendaki puncak Ngga Pulu (*Puncak Cartensz*) pada tahun 1936. Dikarenakan pecah Perang Dunia II, temuan Jean Jecques Dozy ini baru ditindaklanjuti pada tahun 1960 oleh **Forbes K. Wilson**, seorang geolog sekaligus manajer eksplorasi dari Freeport Sulphur Company dari Louisiana Amerika Serikat. Kedatangan Forbes K. Wilson ke Papua tahun 1960 inilah yang menjadi awal sejarah berdirinya kota Timika, karena dari sinilah mulai dirintis upaya-upaya Freeport Sulphur Company untuk menjalankan usahanya mengeksplorasi bahan tambang tembaga di Papua.

Timika adalah Ibukota Kabupaten Mimika sekaligus Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah. Kabupaten Mimika semula adalah bagian dari Kabupaten Fakfak dan dimekarkan sebagai Kabupaten Administratif pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2000 beralih status menjadi daerah otonom, yaitu Kabupaten.<sup>8</sup>

Timika mulai berdiri pada akhir tahun 1960-an ketika Freeport memastikan untuk memperluas kegiatan pertambangannya di *Ertsberg* (Gunung Bijih) di dekat Puncak Jaya, Irian Jaya.<sup>9</sup> Timika berasal dari kata

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 *Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya*, dalam Lembar Negara No. 38/1996 dan Tambahan Lembar Negara No. 3650; Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999 *Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong*, dalam Lembar Negara No. 1999/173; Tambahan Lembar Negara No. 3894; Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2000 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999*, dalam Lembar Negara No. 72/2000 dan Tambahan Lembar Negara No. 3960. Lihat lampiran 2, 3 & 4.

<sup>9</sup> George A. Mealey, *Grasberg*, Singapore, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 321.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“*Timiko*” yang artinya buaya, yaitu untuk menyebut daerah yang banyak buayanya.<sup>10</sup> Dalam peta Belanda kuno dikenal nama “*Timoeka*” untuk menyebut Timuka, yaitu daerah pemukiman suku Kamoro yang berada di tepi pantai. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan pantai Timika.<sup>11</sup>

Sebelum menjadi Ibukota Kabupaten sekaligus Ibukota Propinsi, pada awalnya Timika adalah nama lapangan udara di Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya yang dibangun oleh PT. Freeport Indonesia untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Timika kemudian digunakan untuk menyebut wilayah di sekitar lapangan udara tersebut, karena keberadaannya telah membuka isolasi wilayah ini sehingga Kecamatan Mimika Timur dikenal oleh “dunia luar”. Timika berkembang menjadi pusat kegiatan penduduk di Kecamatan Mimika Timur.<sup>12</sup> Timika akhirnya ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Mimika sekaligus Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999.

Luas wilayah Kabupaten Mimika 19.592 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak pada lokasi antara 136° Bujur Timur - 138° Bujur Timur dan 4° Lintang Selatan - 5° Lintang Selatan. Sebagai daerah khatulistiwa, Kabupaten Mimika memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Keadaan geografisnya sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah yang berawa-rawa, tebing dan pegunungan. Batas wilayah fisiknya, sebelah Utara pegunungan (Jayawijaya),

---

<sup>10</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 7.

<sup>11</sup> George A. Mealey, *Op. cit.*, hlm. 321-322.

<sup>12</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Op. cit.*, hlm. 15.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebelah Selatan laut (Arafuru), sebelah Timur hutan dan sebelah Barat rawa-rawa.<sup>13</sup>

Secara administratif Kabupaten Mimika dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Uwapa, Mapia dan Kamu, Kabupaten Nabire, Kecamatan Tigi, Tigi Timur dan Paniai Timur, Kabupaten Paniai serta Kecamatan Ilaga dan Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Irian Jaya Timur;
2. Sebelah Timur: Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;
3. Sebelah Selatan: Laut Arafuru; dan
4. Sebelah Barat: Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya Barat.<sup>14</sup>

Di samping pendatang, terdapat berbagai macam suku yang tinggal di Kabupaten Mimika. Suku terbesar yang merupakan penduduk asli adalah Amungme dan Kamoro, sementara suku-suku lain seperti Dani, Moni, Lani, Damal dan Ekari dianggap “pendatang” oleh suku Amungme dan Kamoro. Penduduk asli yang paling mendominasi dalam sejarah Kota Timika adalah suku Amungme dan Kamoro.

Penduduk Kabupaten Mimika dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Penduduk di wilayah perkotaan terkonsentrasi di kota Timika dan Tembagapura. Sementara penduduk di pedesaan tinggal di daerah rawa-rawa dan pegunungan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>14</sup> Lihat *Peta Papua* pada lampiran 14.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penduduk Kota Timika majemuk, berasal dari bermacam-macam latar belakang budaya, pekerjaan, agama dan pendidikan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia terutama Pulau Jawa dan Sumatra. Sudah dapat dipastikan bahwa penduduk Tembagapura dan Kuala Kencana adalah karyawan PT. Freeport Indonesia, selebihnya adalah pegawai negeri, TNI, petani, nelayan, pedagang dan pengusaha.<sup>15</sup>

Sementara itu penduduk pedesaan umumnya relatif homogen. Kampung-kampung di wilayah rawa dihuni oleh suku Kamoro. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah peramu sagu, pencari ikan dan pemburu babi hutan. Sebagian besar hasil produksinya dijual di pasar Timika. Sedangkan kampung-kampung di daerah pegunungan dihuni oleh suku Amungme. Mata pencaharian mereka berkebun dengan tanaman utamanya ubi dan keladi. Pada umumnya tanaman kebun mereka adalah tanaman yang laku di pasar.<sup>16</sup>

Kota Timika tumbuh secara perlahan-lahan sejalan dengan perkembangan pemerintahan, perdagangan dan industri pertambangan yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Perkembangan Kota Timika ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin meningkatnya bangunan infrastruktur sebagai fasilitas hidup dan perubahan status yang semula hanya nama sebuah lapangan udara di Kecamatan Mimika Timur menjadi Ibukota Kabupaten Mimika Timur sekaligus Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah.

---

<sup>15</sup> Gambar *Kota Tembagapura* dan *Kuala Kencana* dapat dilihat pada lampiran 25 dan 26.

<sup>16</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Op. cit.*, hlm. 6.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perkembangan penduduk dan infrastruktur di Timika mulai terlihat jelas pada tahun 1985, yaitu ketika Freeport membeli sebuah area orang Amungme untuk membangun perumahan Timika Indah yang diperuntukkan bagi karyawan Freeport beserta keluarganya. Melihat perkembangan tersebut pemerintah Indonesia segera membangun kantor transmigrasi dan transmigran pertama yang sampai adalah dari Jawa. Lebih dari 2.300 keluarga transmigran sekarang tinggal di Timika. Mereka tinggal di area pemukiman yang disebut “SP”, yaitu Satuan Pemukiman yang kemudian berkembang menjadi desa seperti Kamora Jaya, Timika Jaya dan Karang Senang. Di samping Freeport, kedatangan para transmigran ini sangat berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian di Timika. Bersama pemerintah, Freeport dan para kontraktor, mereka mulai membangun berbagai usaha baik jasa maupun produksi di berbagai sektor dengan segala fasilitas yang diperlukan. Kota Timika tumbuh sebagaimana kota-kota lain di Indonesia dengan berbagai sarana pendukung, seperti gedung-gedung sekolah, rumah sakit, kantor pos, pasar, bank, pertokoan, rumah ibadat, restoran, hotel dan gedung film, dimana kesemuanya itu letaknya saling berdekatan satu sama lain serta dapat dijangkau dengan taxi atau minibus.<sup>17</sup>

Di Timika sering terjadi konflik, semula konflik antar suku, kemudian antara suku asli dengan pendatang, antara suku asli dengan PT. Freeport dan dalam perkembangan terakhir antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak berdirinya, keberadaan PT. Freeport telah ditentang oleh masyarakat sekitar

---

<sup>17</sup> George A. Mealey, *Op. cit.*, hlm. 325-327.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terutama penduduk asli. Oleh karena itu topik mengenai “Sejarah Perkembangan Kota Timika: Studi Kasus Dampak Berdirinya PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001” ini penting untuk diteliti, mengapa keberadaan PT. Freeport ditentang, apa dampak keberadaan PT. Freeport bagi lingkungan fisik dan sosial sekitar, apa pengaruh PT. Freeport terhadap perkembangan Kota Timika, dan bagaimana posisi penduduk asli terhadap perkembangan Kota Timika.

Kota Timika memang kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum tetapi kota yang letaknya terpencil jauh di antara gunung-gunung yang tinggi ini, ternyata kota yang dengan cepat dapat berkembang dan jauh lebih modern daripada kota-kota lain di wilayah Irian Jaya.

Penulis ingin mengangkat dan memperkenalkan Kota Timika pada masyarakat Indonesia secara umum dan pembaca tulisan ini khususnya, sebagai kota yang dapat dibanggakan dengan keindahan alam dan strukturnya serta potensi mineralnya yang melimpah. Gunung-gunung di wilayah ini ternyata gunung emas yang sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional terutama dari sektor ekonomi. Hal yang paling disesalkan adalah bahwa kekayaan alam yang tidak ternilai itu jatuh atau dikelola oleh pengusaha asing. Indonesia hanya mendapat bagian 1% dari keuntungan yang diperoleh (tidak termasuk pajak). Sungguh sangat ironis, kekayaan tanah air yang bernilai trilyunan dollar Amerika Serikat hanya sedikit yang dinikmati oleh bangsa sendiri.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan masalah dalam penelitian ini mengambil batas waktu antara tahun 1960-2001. Pembatasan waktu ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan data historis yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data historis adalah bahan keterangan mengenai proses perkembangan historis dan gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu serta memberikan stempel-stempel pembentuk sehingga terwujud keadaan seperti sekarang ini.<sup>18</sup> Oleh karena itu penulis memilih batas waktu antara tahun 1960-2001 karena dalam kurun waktu tersebut telah tersedia sumber data bagi penulisan penelitian ini. Tahun 1960 adalah awal munculnya Kota Timika dan tahun 2001 adalah saat dimulainya babak baru dalam sejarah perkembangan Kota Timika sebagai Ibukota Kabupaten sekaligus Ibukota Propinsi yang berarti akhir dari perkembangan babak sebelumnya.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membahas “Sejarah Perkembangan Kota Timika: Studi Kasus Dampak PT. Freeport Indonesia Tahun 1960-2001” dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses awal berdirinya Kota Timika?
2. Apa pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika?

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 243.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bagaimana perkembangan Kota Timika tahun 1960-2001?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan proses awal berdirinya Kota Timika.
- b. Mendeskripsikan pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika.
- c. Mendeskripsikan perkembangan Kota Timika tahun 1960-2001.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001 yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pembandingan bagi penelitian lain dengan aspek atau pendekatan yang berbeda.
- b. Memperkaya khasanah pengetahuan ilmu sejarah khususnya mengenai sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001.
- c. Memperluas cakrawala pengetahuan para pembaca mengenai sejarah kota, khususnya sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001.



#### D. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

##### 1. Kajian Pustaka

###### a. Sumber primer

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber primer yaitu beberapa dokumen pemerintah yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: Lembaran Negara No. 38/1996 dan Tambahan Lembar Negara No. 3650 *Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya*; Lembaran Negara No. 1999/173 dan Tambahan Lembar Negara No. 3894 *Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong*; Lembaran Negara No. 72/2000 dan Tambahan Lembar Negara No. 3960 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999*. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2002 *Tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika Tahun 2002-2006*; SK Menteri Pertambangan No. 432/Kpts/M/Pertamb/1972 *Mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi*.

###### b. Sumber sekunder

Untuk menjelaskan beberapa teori yang terkait dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber sekunder yang berupa buku-buku.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Diantaranya untuk menjelaskan pengertian sejarah penulis menggunakan sumber dari buku-buku karangan para sejarawan dalam dan luar negeri, antara lain: *Pengantar Ilmu Sejarah*, karya Kuntowijoyo, diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999; *Mengerti Sejarah*, karya Louis Gottchalk, Terj. Nograho Notosusanto, diterbitkan oleh UI-Press, Jakarta, 1985 dan; *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, karya Sartono Kartodirdjo, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Untuk menjelaskan teori perkembangan kota penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang kota, antara lain adalah: *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota Dalam Tiga Bagian*, karya P.J.M. Nas, Terj. & Ed. Sukanti Suryochondro, diterbitkan oleh Bhartara karya Aksara, Jakarta, 1979; *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota)*, karya N. Daldjoeni, diterbitkan oleh Alumni, Bandung, 1982; *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, karya Bintarto, diterbitkan oleh Ghalia Indah, Jakarta, 1983; *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, karya Rahardjo, diterbitkan oleh PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983; *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*, karya Abdurrachman Surjomihardjo, diterbitkan oleh Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2000; *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, karya H. Khairuddin, diterbitkan oleh Liberty, Yogyakarta, 2000 dan; *Ensiklopedi Ilmu-ilmu*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Sosial*, karya Adam Kuper & Jessica Kuper, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Sementara itu buku-buku yang membahas tentang kota Timika secara khusus masih sangat terbatas karena disamping kota ini masih tergolong baru tumbuh juga dikarenakan belum banyak ahli sejarah yang berminat mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul di kota ini, mengingat letaknya yang jauh dan sulit dijangkau serta keberadaannya yang tidak begitu berpengaruh bagi kehidupan masyarakat luas.

Oleh karena itu sebagai bahan studi pustaka, untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku tentang Irian Jaya atau Papua secara umum dan sumber-sumber lain dari internet dan koran yang membahas tentang PT. Freeport dan kota Timika. Buku-buku tersebut antara lain: *Grasberg*, karya George A. Mealey, diterbitkan oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., Singapore, 1996. Buku ini berisi tentang sejarah PT. Freeport Indonesia dan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan operasionalnya, termasuk mengenai berdirinya kota Timika.

*Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya*, karya Ronald G. Petocz, diterbitkan oleh Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1987. Buku ini memaparkan tentang keadaan ekologi Irian Jaya dan dampak

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

operasional PT. Freeport Indonesia bagi lingkungan cagar alam di sekitarnya.

*PT. Freeport Indonesia dan Masyarakat Adat Suku Amungme*, karya Tom Beanal dan August Kafiari, diterbitkan oleh Forum Lorentz, 2000. buku ini menggambarkan peranan masyarakat adat suku Amungme dalam menuntut hak-haknya berkaitan dengan tanahnya yang diambil untuk eksplorasi tambang emas PT. Freeport Indonesia.

*Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei*, karya Tom Beanal, diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 1997. Buku ini menguraikan tentang kebudayaan suku Amungme, yaitu salah satu suku yang tinggal di Timika.

Buku-buku lain yang digunakan adalah: *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, karya S. Budhisantoso, dkk., diterbitkan oleh Depdikbud RI, Jakarta, 1995; *Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer*, karya Amiruddin al Rahab dan Aderito Jesus de Soares, diterbitkan oleh ELSAM, Jakarta, 2003; *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, karya Ngadisah, diterbitkan oleh Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003; *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, karya John R.G. Djopari, diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta, 1993; *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Agus Sumule (Ed), diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003; *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*, karya Ross Garnaut dan Chris Manning, diterbitkan oleh PT. Gramedia, Jakarta, 1979; dan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Menuju Papua Baru*, karya Benny Giay, diterbitkan oleh Deiyai, Jayapura, 2000.

Di samping sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang diperoleh dari website koran dan majalah.

### 2. Landasan Teori

Dalam membahas sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001, terkait dengan beberapa teori yang memandu penulis untuk menyelidiki permasalahan yang dihadapi sekaligus membantu pembaca untuk dapat memahami isi dari hasil penelitian ini secara menyeluruh dan mendalam. Teori-teori tersebut antara lain adalah sosiologi, perubahan sosial, antropologi dan geografi yang digunakan penulis untuk menjelaskan pengertian sejarah, perkembangan kota, Timika dan PT. Freeport Indonesia.

#### a. Sejarah

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syajara* berarti terjadi, *syajarah* berarti pohon dan *syajarah an-nasab* berarti pohon silsilah.<sup>19</sup> Orang Indonesia kemudian menyebutnya dengan kata *sejarah*. Berdasarkan asal kata tersebut secara harafiah sejarah dapat diartikan sebagai suatu percabangan genealogis dari suatu kelompok keluarga yang digambarkan sebagai profil pohon.

---

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1999, hlm. 1.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada mulanya kata sejarah dimaksudkan sebagai gambaran silsilah atau keturunan, asal-usul dan riwayat. Misalnya Babad Tanah Djawi dan Hikayat Raja-raja Pasai yang termasuk dalam historiografi tradisional yang isinya menggambarkan asal-usul keturunan (silsilah). Pengertian sejarah kemudian berkembang, bukan lagi riwayat, silsilah atau asal-usul tetapi nama cabang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan tinggi. Sejarah dalam bahasa Inggris sama dengan *history* yang berasal dari kata benda Yunani *istoria*, yang berarti ilmu. Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengartikan *istoria* sebagai keterangan yang sistematis dari sejumlah fenomena atau gejala alam. Kemudian diartikan menjadi keterangan yang sistematis dari gejala-gejala alam terutama mengenai manusia yang bersifat kronologis, sedangkan gejala-gejala alam yang tidak bersifat kronologis disebut *scientia* atau *science*.<sup>20</sup> Kata sejarah dalam bahasa Jerman adalah *Geschichte* yang berasal dari kata *geschehen* yang berarti terjadi. *Geschichte* adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi definisi yang paling umum dari kata *history* (sejarah) adalah masa lampau umat manusia.<sup>21</sup>

Sementara itu Kuntowijoyo mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu, yaitu mengenai apa yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh manusia.<sup>22</sup> Definisi

---

<sup>20</sup> Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nograho Notosusanto, Jakarta, UI-Press, 1985, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Loc. cit.*

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Op. cit.*, hlm. 17.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo yang menyebutkan sejarah sebagai konstruk, yaitu suatu sintesis dari kerangka pikiran yang mencakup semua fakta dalam kehidupan manusia yang disusun dan dihubung-hubungkan sesuai dengan desain dengan menggunakan alat-alat analitis seperti konsep dan teori.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah hasil pengkisahan atau penggambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan umat manusia di masa lampau. Unsur utama sejarah adalah kejadian masa lalu dengan konsep dasarnya waktu (*time*), ruang (*space*), kegiatan manusia (*human activities*), perubahan (*change*) dan kesinambungan (*continuity*). Maksudnya adalah bahwa sejarah merupakan kejadian-kejadian dari hasil kegiatan manusia di masa lalu yang terikat oleh ruang dan waktu, memiliki daya ubah atau pengaruh terhadap kehidupan umat manusia dan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya memiliki hubungan sebab-akibat serta berkesinambungan. Dengan demikian sejarah memiliki ciri khas yaitu hanya sekali terjadi atau peristiwa tunggal atau tidak berulang dan mempunyai makna bagi kehidupan umat manusia.

Salah satu fungsi utama sejarah dalam dunia pendidikan adalah mengabdikan pengalaman-pengalaman masyarakat di waktu yang

---

<sup>23</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 18-19.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lampau, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memecahkan problema-problema yang dihadapi. Melalui sejarah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan digunakan untuk menghadapi masa kini. Oleh karena itu tanpa sejarah manusia tidak akan mampu membangun ide-ide tentang konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, melalui sejarah kita dapat menyadari kemampuan kita. Sejarah memberikan identitas bagi suatu bangsa dan negara karena jati diri bangsa dan negara diketahui dari sejarahnya.<sup>24</sup>

### b. Perkembangan kota

#### 1) Perkembangan

Perkembangan menurut Poerwadarminta adalah perihal berkembang, yang mempunyai empat arti, yaitu mekar terbuka atau membentang, menjadi besar (luas, banyak), menjadi bertambah sempurna dan menjadi banyak (merata, meluas).<sup>25</sup> Perkembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses perubahan dari suatu titik ke titik lain yang lebih luas dan kompleks, yaitu perkembangan kota Timika dari awal berdirinya tahun 1960-an sampai menjadi sebuah ibu kota Kabupaten sekaligus ibu kota Propinsi pada tahun 2001. Perkembangan tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial-budaya dan politik.

---

<sup>24</sup> I Gde Widja, *Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah*, Jakarta, Depdikbud, 1989, hlm. 8.

<sup>25</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 414.



### 2) Kota

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai kota. Poerwadarminta menerangkan bahwa kota adalah daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Menurut J. Gonda seperti dikutip oleh Abdurrachman Surjomihardjo kata kota merupakan kata pinjaman dari bahasa Sansekerta. Kata kota terdapat dalam bahasa Jawa Kuno dan bahasa Sunda dengan arti yang tidak jauh berbeda dari bahasa asalnya. Kata kota juga terdapat dalam bahasa Melayu, Minang Kabau, Toba Batak (Huta) dan Karo Batak yang diartikan sebagai desa yang dipertahankan atau desa sebagai satuan politik.<sup>27</sup>

Sementara itu Bintarto mendefinisikan kota dari segi geografi, kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Dengan kata lain Bintarto mendefinisikan kota sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 463.

<sup>27</sup> Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*, Yogyakarta, Yayasan Untuk Indonesia, 2000, hlm. 5-7.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.<sup>28</sup>

Pengertian tentang kota juga dikemukakan oleh beberapa sosiolog luar negeri, antara lain sosiolog Belanda bernama Grunfeld yang mendefinisikan kota sebagai suatu pemukiman yang kepadatan penduduknya lebih besar daripada kepadatan wilayah nasional, dengan struktur matapencarian non agraris dan tata guna tanah beraneka serta dengan pergedungan yang berdirinya berdekatan.<sup>29</sup> Sosiolog Chicago Louis Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.<sup>30</sup>

Max Weber mengembangkan suatu tipe kota ideal, yaitu suatu komunitas perkotaan dengan pasar sebagai institusi sentralnya, ditunjang oleh suatu sistem administratif dan hukum yang otonom, dan menyerupai suatu asosiasi yang menerangkan segenap unsur dari kehidupan perkotaan itu sendiri.<sup>31</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas mengenai kota, maka untuk merumuskan pengertian kota terkait dengan sejumlah aspek, yaitu morfologi (bentuk fisik kota), jumlah penduduk, aspek sosial, ekonomi dan hukum. Unsur-

---

<sup>28</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Ghalia Indah, 1983, hlm. 36.

<sup>29</sup> N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota)*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 41.

<sup>30</sup> P.J.M. Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota Dalam Tiga Bagian*, Terj. & Ed. Sukanti Suryochondro, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1979, hlm. 29.

<sup>31</sup> Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 111.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

unsur yang menjadi ciri pokok bagi suatu kota dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur fisis dan sosial. Unsur fisis meliputi adanya bangunan pertokoan, pasar, gedung-gedung sekolah, daerah terbuka untuk rekreasi, jalan kereta api, mobil dan kendaraan lainnya. Sedangkan unsur sosial meliputi adanya pelapisan sosial-ekonomi, sifat individualisme dan kurangnya toleransi sosial, adanya jarak dan penilaian sosial. Dalam penelitian ini pengertian kota yang dipakai adalah wilayah yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai sarana dan kebutuhan yang lebih modern dibandingkan desa.<sup>32</sup>

Pengertian mengenai kota ditekankan pada sifat dan ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara masyarakat pedesaan dan perkotaan terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, makanan, rumah dan sebagainya. Sedangkan di kota, orang sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya. Misalnya bila menghadirkan makanan, yang diutamakan adalah bahwa makanan yang dihadirkan tersebut memberikan kesan bahwa

---

<sup>32</sup> Bintarto, *Op. cit.*, hlm. 43-47. Hal senada juga diungkapkan oleh Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota* (Bandung: Alumni, 1982) yang mengemukakan ciri-ciri sosial kota dengan beberapa gejala, yaitu heterogenitas sosial, hubungan sekunder, toleransi sosial, kontrol sekunder, mobilitas sosial, ikatan sukarela, individualisasi dan segregasi keruangan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, yaitu dengan menghidangkan makanan kaleng pada tamu. Makanan yang dihidangkan orang kota harus kelihatan mewah, tempat menghidangkannya juga harus mewah dan terhormat. Orang desa tidak mepedulikan hal itu, mereka masak makanan sendiri tanpa peduli apakah tamunya suka atau tidak. Dari sini terlihat adanya perbedaan penilaian antara orang desa dan kota, orang desa menilai makanan sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan biologis sedangkan orang kota melihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Demikian pula mengenai pakaian, bagi orang desa bentuk dan warna pakaian tak menjadi soal karena yang terpenting adalah fungsi pakaian yang dapat melindungi diri dari panas dan dingin. Bagi orang kota, nilai pakaian adalah alat kebutuhan sosial, mahalnya bahan pakaian yang dipakai merupakan perwujudan kedudukan sosial pemakainya. Ada beberapa ciri lain yang menonjol dari masyarakat kota, yaitu berkurangnya kehidupan keagamaan, hidup mandiri, terdapat pembagian kerja yang tegas dan batas-batas yang nyata, pemikiran yang rasional, pentingnya faktor waktu karena jalan kehidupan yang cepat dan perubahan-perubahan sosial yang tampak nyata.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 169-171.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perlu diketahui pula bahwa kota dan daerah perkotaan adalah dua istilah yang berbeda karena ada dua pengertian, kota untuk *city* dan daerah perkotaan untuk *urban*. Istilah *city* diidentikkan dengan kota, sedangkan *urban* merupakan suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern yang disebut daerah perkotaan.

Budaya perkotaan bermula di enam daerah peradaban kuno yang terpisah, yaitu Mesopotamia, lembah sungai Nil dan Indus, Cina Utara, Mesoamerica, Pegunungan Andes dan kawasan Yorubaland di Afrika Barat. Di pusat-pusat pemukiman itu terdapat sentral monarki dan lembaga keagamaan yang masing-masing memiliki staf administrasi dan pengawal resmi yang berkuasa mengendalikan para petani dan penduduk di tempat-tempat sekitarnya dan memanfaatkannya. Bangunan-bangunan pusat budaya suku berkembang menjadi serangkaian kompleks arsitektur monumental yang meliputi candi-candi, piramida, istana, gedung peradilan dan sebagainya.

Selain sebagai cikal bakal suatu kota tempat-tempat tersebut merupakan awal dari peradaban dan lembaga kenegaraan. Tempat-tempat tersebut menjadi awal pusat perkotaan karena kapasitasnya mengorganisir kehidupan di seluruh pelosok wilayah sekitarnya, yang terutama dilangsungkan melalui kontrol simbolik. Pada saat itu penduduk tidak tinggal di pusat-pusat keramaian melainkan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terpencar di berbagai tempat dan mereka hanya datang ke pusat keramaian atau kota untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual yang penting. Namun karena adanya ancaman dan faktor lain dari waktu ke waktu, semakin dirasakan perlunya meningkatkan kontrol politik yang kemudian diikuti dengan meningkatnya konsentrasi penduduk di pusat-pusat keramaian. Perkembangan tersebut juga terjadi di Eropa tetapi prosesnya lebih kompleks, tidak hanya perkembangan politik ritual. Pada masa itu kota merupakan pusat kekuasaan dan konsumen, perdagangan dan industri belum memainkan peranan penting. Pada abad pertengahan di Eropa Barat mulai muncul urbanisme dan kerajaan-kerajaan kuno serta kota-kota mulai merosot. Kegiatan komersial menjadi landasan utama urbanisme sehingga bisnis menjadi elemen dominan di kota-kota. Dalam waktu yang relatif cepat kota-kota tersebut berkembang menjadi otonom dan independen dari struktur sosial feodal yang mengelilinginya.<sup>34</sup>

Di Swedia, Polandia dan Rumania yang disebut urban adalah kota-kota dan kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi urban. Di Hongaria suatu pemukiman disebut urban bila pemukiman tersebut memenuhi persyaratan “urban” dan tidak memandang besar kecilnya daerah pemukiman. Di Australia pengertian urban adalah ibu kota propinsi atau ibu kota karesidenan

---

<sup>34</sup> Adam Kuper & Jessica Kuper, *Op. cit.*, hlm. 110-111.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan kota-kota yang memiliki ciri-ciri khusus. Batas wilayah mempunyai luas dan bentuk yang berbeda-beda tergantung pada tingkat budaya dan teknologi penduduk setempat.<sup>35</sup>

Sementara itu di Indonesia pada awal abad ke-20 sebuah kota yang ideal mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota tersebut. Pertama, sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spatial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan kraton. Kedua, sektor pedagang asing terutama pedagang Cina yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi dan sosial-budaya tersendiri. Ketiga, sektor kolonial dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit* dan rumah ibadah. Keempat, sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam kampung-kampung tertentu seperti Kauman di Yogyakarta dan Surakarta. Kelima, sektor imigran yang menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan sekitar. Di tempat ini terdapat gedung-gedung sekolah, pasar, stasiun dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>36</sup>

Kota dapat diklasifikasikan secara numerik dan non numerik. Penggolongan secara numerik didasarkan atas angka-angka, misalnya berdasarkan jumlah penduduk yang menggunakan angka

---

<sup>35</sup> Bintarto, *Op. cit.*, hlm. 36-37.

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994, hlm. 54.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sensus penduduk. Menurut Noel P. Gist dan L.A. Halbert seperti dikutip oleh Bintarto, akumulasi penduduk yang dapat digolongkan kota di Jepang adalah 30.000 orang atau lebih, di Belanda 20.000, di India 5.000, di Meksiko dan Amerika Serikat 2.500, di Jerman dan Portugal 2.000 dan di Selandia Baru 1.000. batas angka tersebut berbeda-beda dan dapat berubah karena perbedaan kepadatan, tingkat teknologi dan budaya.

Penggolongan non numerik adalah penggolongan kota berdasarkan batasan ekonomi, sosiologi, kependudukan dan fungsi. Misalnya berdasarkan batasan fungsi dapat dibedakan menjadi kota pusat produksi, kota pusat perdagangan, kota pusat kebudayaan, kota pusat kesehatan atau rekreasi dan kota militer. Kota pusat produksi biasanya terletak atau dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil bumi atau hasil tambang sehingga dapat terbentuk dua macam kota, yaitu kota penghasil bahan mentah dan kota yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Di daerah ini dapat muncul kota-kota industri dimana pusat-pusat kota dihubungkan dengan kota lain atau daerah belakangnya (*hinterland*) oleh jalur transportasi. Contoh kota pusat produksi adalah Tembapura sebagai bagian dari kota Timika yang menghasilkan bahan mentah tambang berupa tembaga, emas dan perak. Dengan pendekatan ini Timika dapat dikategorikan sebagai kota industri primer sekaligus kota industri ekstraktif karena perekonomiannya digerakkan oleh



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PT. Freeport Indonesia yang kegiatan utamanya adalah mengeksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diganti.<sup>37</sup> PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan tunggal yang mengelola pertambangan di Timika dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan kontraktor, hanya perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan PT. Freeport Indonesia saja yang dapat masuk ke Timika. Industri manufaktur yang ada di Timika masih dikelola secara perorangan dengan cara penjualan bebas di pasar.

Kota industri memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- a) Keluarga inti (*nuclear family*) peranannya lebih mendominasi.
- b) Sistem kelas (sosial) cenderung bersifat luwes, derajat mobilitas sosialnya tinggi, lapisan sosial yang terbanyak diduduki oleh kelas menengah yang anggota-anggotanya sulit dibedakan baik dari lapisan atas maupun bawahnya.
- c) Mempunyai lambang sebuah kota industri yaitu mesin-mesin yang kompleks-modern yang menyebabkan pula cepatnya perubahan sosial serta mencipta masyarakat yang berorientasi pada produksi dan distribusi barang-barang secara massal.
- d) Unit-unit ekonomi cenderung dalam skala besar serta terdapat standarisasi dalam harga-harga, berat dan ukuran-ukuran barang, sampai pada kualitas barang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, hlm. 237.

<sup>38</sup> Rahardjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983, hlm. 21.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Contoh lain kota industri berdasarkan ciri atau karakteristik di atas adalah kota Surabaya. Kota-kota di Indonesia sebenarnya lebih merupakan kota pusat pemerintahan atau pendidikan dan belum atau bukan merupakan kota industri (komersial). Kegiatan komersial pada umumnya didominasi oleh kegiatan perdagangan.

Sebagai kota industri, Timika berkembang karena adanya pertambangan yang dikelola Freeport, oleh karena itu Timika juga dapat disebut sebagai kota tambang. Ciri-ciri Timika sebagai kota tambang antara lain adalah:

- a) Perekonomian digerakkan atau berkembang karena adanya usaha tambang yang dikelola Freeport.
- b) Berbagai sarana dan prasarana fisik kota dibangun sebagai pendukung usaha tambang.
- c) Sebagian besar penduduknya adalah karyawan tambang, baik sebagai tenaga kasar maupun tenaga ahli dan tidak ahli.

Meskipun Timika merupakan kota tambang namun letaknya tidak terintegrasi dengan pusat pengolahan tambang. Timika dibangun agak berjauhan dengan pusat pengelolaan tambang dengan pertimbangan demi keamanan dan kenyamanan dari polusi tambang. Pada awalnya Timika memang dirancang sebagai kota pendukung tambang, namun karena memenuhi banyak persyaratan maka Timika juga menjadi kota birokrasi. Oleh karena itu bila nantinya bahan tambang tersebut habis, Timika tetap berdiri

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagai kota administrasi pemerintahan yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Mimika Timur sekaligus sebagai Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah.

Kota sebagai pusat perdagangan adalah sifat umum dari kota-kota karena hampir semua kota adalah pusat perdagangan dan kegiatan perdagangan tidak mendominasi semua kota. Ada kota yang hanya menyalurkan kebutuhan sehari-hari warganya, ada yang merupakan perantara perdagangan nasional maupun internasional yang sering disebut *entrepot*.<sup>39</sup> Sebagian kota pusat perdagangan di Indonesia berada di tepi pantai yang disebut kota pelabuhan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 80.000-an kilometer. Ini berarti potensi *accessibility* atau kemudahan mencapai tempat lain dengan menggunakan sarana transportasi air sangat besar sehingga muncul pemukiman-pemukiman penduduk pantai yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan. Di Indonesia pelabuhan yang artinya tempat bersandar perahu atau kapal baik pada perairan sungai, danau maupun laut tercatat 516 buah, 104 diantaranya adalah pelabuhan laut. Contoh kota pelabuhan yang masih berkembang sampai sekarang adalah Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Belawan, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Ambon, Sorong dan Merauke. Sedangkan kota pelabuhan yang telah

---

<sup>39</sup> Bintarto, *Op. cit.*, hlm. 37-39.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memudar bahkan lenyap sama sekali adalah Demak, Banten, Ampenan, Buleleng, Jepara dan Barus.<sup>40</sup>

Kota pusat pemerintahan pada umumnya banyak dijumpai pada masa sebelum revolusi industri. Pada waktu itu kota-kota tersebut berfungsi sebagai pusat-pusat politik atau pemerintahan, misalnya di Asia seperti Bangkok, Saigon dan Rangoon; di Eropa antara lain London, Paris dan Berlin; di Timur Tengah Bagdad, Kairo dan Istambul.

Kota pusat kebudayaan adalah daerah-daerah yang didominasi oleh seni dan budaya yang dimilikinya, misalnya Yogyakarta, Surakarta dan beberapa kota di Bali. Kota pusat kebudayaan juga dapat menjadi kota pusat rekreasi karena menjadi pusat wisata. Pada umumnya kota pusat rekreasi biasanya berada di daerah pegunungan yang memiliki udara bersih dan suhu yang sejuk, misalnya Bogor. Kota pusat rekreasi ini juga merupakan kota pusat kesehatan karena memiliki udara bersih dan suhu yang sejuk yang sangat baik untuk kesehatan. Sementara itu yang dimaksud dengan kota militer adalah kota yang tidak hanya ditempati oleh para militer dengan segala aktivitasnya saja tetapi juga sebutan untuk mengenal kota tersebut baik dari segi sejarah perkembangannya maupun dari penataan kota itu sendiri. Contoh

---

<sup>40</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan: Kasus Gilimanuk-Jepara*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 1-2.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kota militer yang ada di Indonesia misalnya Magelang dan Sukabumi.<sup>41</sup>

Kota juga sebagai pusat perubahan kebudayaan, karena di samping bersifat stabil, kebudayaan juga bersifat dinamis. Setiap kebudayaan mengalami perubahan atau perkembangan, hanya kebudayaan yang mati saja yang bersifat statis. Perubahan-perubahan kebudayaan sangat nampak dalam kehidupan masyarakat kota. Hal ini berkaitan dengan sifat hakikat kebudayaan yang salah satunya adalah bahwa kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Perilaku manusia yang tinggal di kota selalu dinamis seiring dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin pesat. Di sini sangat memungkinkan terjadinya perubahan kebudayaan yang meliputi peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi, di mana kesemuanya itu menurut C. Kluckhohn adalah tujuh unsur kebudayaan yang dianggap *cultural-universals*.<sup>42</sup>

Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan itu sendiri. Gerak manusia terjadi karena hubungan-hubungan yang dilakukan dengan manusia lain. Kehidupan masyarakat kota sangat

---

<sup>41</sup> H. Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 187.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memungkinkan terjadinya hubungan antar kelompok manusia sehingga terjadilah akulturasi. Akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat-laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dengan terjadinya akulturasi dalam masyarakat tersebut maka dengan sendirinya kebudayaan turut bergerak dan terus mengalami perubahan. Kota sebagai pusat informasi, teknologi, pendidikan, ekonomi dan politik menjadi pusat terjadinya perubahan kebudayaan karena kota adalah tempat bertemunya berbagai sistem nilai yang beranekaragam.<sup>43</sup>

Sementara itu menurut Ralph E. Turner sejalan dengan berkembangnya teknologi paling sedikit dikenal tiga bentuk kondisi yang berperan dalam pembentukan kebudayaan baru, yaitu peran pengawasan manusia, manfaat sasaran ilmu pengetahuan dan kapasitas untuk menghasilkan kekayaan yang meningkat. Kondisi-kondisi tersebut didukung oleh karakteristik perilaku masyarakat kota terutama kota industri, yaitu adanya pemisahan tradisi setempat, keanekaragaman cara pemujaan, perbedaan tingkah-laku individu dan reorientasi pada hak milik.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>44</sup> Caroline F. Ware, *The Cultural Approach to History*, New York, Kennikat Press, Inc., 1940, hlm. 228-242.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan aspek morfologi, jumlah penduduk, sosial, ekonomi dan hukum antara desa dan kota dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan tanah pedesaan bersifat agraria dan bangunannya terpecah, sementara kota bersifat pelayanan jasa dan bangunannya padat.
- b) Jumlah penduduk pedesaan relatif sedikit dan kepadatannya rendah, sementara kota relatif banyak dan kepadatannya tinggi.
- c) Kehidupan sosial pedesaan menganut sistem kekeluargaan, sementara kota lebih individualistis.
- d) Perekonomian pedesaan dari sektor agraria, sementara kota dari sektor pelayanan jasa terutama pasar.
- e) Segi hukum pedesaan lebih dipengaruhi oleh tradisi dan adat-istiadat dari leluhur berdasarkan norma dan nilai yang berlaku, sementara di kota penghuninya pada umumnya memiliki hak-hak hukum tersendiri.<sup>45</sup>

Pembangunan perkotaan seringkali hanya menekankan aspek-aspek fisik saja, seperti pembangunan prasarana kota dan perluasan wilayah kota. Pembangunan perkotaan tidak lepas dari perencanaan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya, seperti masyarakat pinggiran kota (*urban*) dan masyarakat pedesaan (*rural*). Dengan demikian pembangunan perkotaan harus

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 32-35.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memperhatikan faktor-faktor fungsi dan peranan kota, sisi geografis (termasuk topografi), demografis, sosial budaya, ekonomi, politik, sikap mental dan faktor-faktor lain yang mendukung serta menjadi dasar pembangunan kota.<sup>46</sup>

Menurut J. Riberu sebagai negara yang berideologi Pancasila, pembangunan kota di Indonesia hendaknya sesuai dengan etika pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Tujuan pembangunan adalah melanjutkan perjuangan bangsa. Tujuan perjuangan bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan sebagai hak segala bangsa berdasarkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu pembangunan nasional harus membantu tegaknya kemerdekaan bagi individu dan masyarakat Indonesia. Pembangunan harus mampu menciptakan iklim dan memberikan dorongan agar manusia Indonesia dapat bebas memiliki agama dan kepercayaan serta dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya, karena pembangunan pada dasarnya ingin membantu tercapainya manusia dan masyarakat Indonesia yang pancasilais. Kesemuanya itu dimaksudkan agar manusia Indonesia menjadi lebih berperikemanusiaan dan beradab, lebih merasa sebagai satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa; lebih mengamalkan kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; agar setiap

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 186-188.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

individu dan setiap masyarakat dapat menikmati keadilan komutatif, keadilan legal dan keadilan distributif.<sup>47</sup>

Berdasarkan Jurnal Ekonomi Rakyat 2002<sup>48</sup>, moral pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial mencakup:

- a) Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat laki-laki dan perempuan serta otonomi daerah.
- b) Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan ketidakadilan.
- c) Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.
- d) Pencegahan kecenderungan disintegrasi nasional.
- e) Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial di universitas.
- f) Penghormatan HAM dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan kota hendaknya juga memperhatikan etika lingkungan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang segala yang ada di alam. Di dalamnya segala sesuatu termasuk manusia saling berelasi secara integral dan berkelanjutan. Jika ada perubahan satu bagian maka terjadilah perubahan pada keseluruhan, kesinambungan alam berubah. Permasalahan lingkungan hidup beranjak dari konsep budaya,

---

<sup>47</sup> M. Sastrapratedja, dkk., *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta, PT. Gramedia, 1986, hlm. 373-377.

<sup>48</sup> *Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial*, Artikel Th. I No. 5 Juli 2002, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).

persepsi budaya tentang lingkungan hidup dijadikan dasar bagi perilaku dalam lingkungan hidup. Konsep budaya yang berorientasi pada lingkungan terdapat dalam lingkungan hidup di dunia Timur. Misalnya di Indonesia antara manusia dengan alamnya dikenal konsep atau prinsip keserasian (*harmony*), keselarasan (*compatibility*) dan keseimbangan (*balance*).

Untuk menyelamatkan lingkungan diperlukan kesadaran dan tanggung jawab yang dapat dimunculkan dan dikembangkan melalui pendekatan budaya. Konsep budaya dipakai untuk membatinkan sikap dan tanggung jawab manusia tentang dirinya dan alamnya. Pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan harus selalu berorientasi pada konsep keseimbangan. Pemukiman dibangun dan dikembangkan untuk kesejahteraan manusia dalam arti sebenar-benarnya dan seluas-luasnya.<sup>49</sup>

### 3) Perkembangan kota

Perkembangan kota menurut Bintarto<sup>50</sup> mempunyai dua aspek pokok, yaitu aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan dialami oleh warga kota dan aspek yang menyangkut perluasan atau pemekaran kota. Aspek yang merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh warga kota lebih merupakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan prasarana

---

<sup>49</sup> Y. Sudihantara, *Ekologi Pemukiman dalam Perspektif Pembangunan: Pemukiman Berwawasan Lingkungan*, Semarang, Soegijapranata Catholic University Press, hlm. 6-8.

<sup>50</sup> Bintarto, *Pengantar Geografi Kota*, Yogyakarta, UP. Spring, 1977, hlm. 52.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan fasilitas hidup di kota. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk kota, baik secara alamiah maupun karena migrasi atau perpindahan yang menyebabkan semakin besarnya fasilitas-fasilitas hidup yang dibutuhkan yang berupa ruang dan prasarana seperti perumahan, jalan dan air.

Tidak semua kota dapat berkembang sama cepatnya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu kota dapat berkembang dengan pesat. Menurut Daldjoeni faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota antara lain:

- a) Pertambahan penduduk kota itu sendiri.
- b) Produksi massal dari industri kota sebagai akibat ditemukannya mesin dan penggunaan modal besar dalam usaha dagang dan industri.
- c) Peranan transportasi dan komunikasi di kota.
- d) Di kota kesempatan untuk maju dan berhasil lebih banyak daripada di desa.
- e) Kota menawarkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup sebagai sarana kenaikan jenjang sosial.
- f) Pengisian waktu senggang tersedia cukup, demikian pula berbagai hiburan dan olah raga.

Di samping itu, posisi kota juga menentukan laju perkembangan kota itu sendiri. Kota kecil yang letaknya strategis memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat dari pada kota-kota

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lain yang tidak memiliki jalur penghubung dengan tempat atau kota lain.<sup>51</sup> Sementara itu Bintarto juga menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kota ditinjau dari beberapa aspek, yaitu letak, iklim dan relief, sumber alam, tanah, demografi dan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, teknologi dan elektrifikasi, transport dan lalu lintas.<sup>52</sup>

Para ahli berpendapat bahwa desa adalah bentuk awal dari kota. P.J.M. Nas mengungkapkan terjadinya kota-kota berasal dari desa-desa di Asia. Ia menyebutkan Yericho dan Yarmo sebagai contoh yang kehidupan ekonomi masyarakatnya terdiri dari bercocok tanam dan peternakan, menyebar dari daerah pegunungan ke dataran Eufrat dan Tigris dan kemudian menumbuhkan pemukiman yang disebut kota. Meskipun demikian tidak semua desa akan berkembang menjadi kota karena perkembangan kota, sebagaimana disebutkan di atas mempunyai berbagai faktor pendorong. Oleh karena itu desa-desa yang berada di daerah pegunungan pada umumnya tetap menjadi desa dan hanya sedikit mengalami perubahan yang sangat lambat, karena hambatan utamanya adalah relief tanahnya yang tidak datar.<sup>53</sup>

Tahapan perkembangan kota dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek administratif dan tata pemerintahan serta aspek kuantitatif dan luas wilayah. Dari aspek administratif dan

---

<sup>51</sup> N. Daldjoeni, *Op. cit.*, hlm 13-14.

<sup>52</sup> Bintarto, *Op. cit.*, hlm. 62-64.

<sup>53</sup> P.J.M. Nas, *Op. cit.*, hlm. 56.

tata pemerintahan, kota dapat bermula dari desa, kemudian menjadi kota kecamatan, kota kabupaten (kota madya) dan selanjutnya menjadi kota propinsi. Sementara itu ditinjau dari aspek kuantitatif dan luas wilayah, ada yang disebut kota kecil, kota sedang, kota besar, bahkan juga kota metropolitan. Lewis Mumford seperti dikutip oleh Rahardjo, membagi tahap-tahap perkembangan kota dari munculnya sampai dengan runtuhnya. Kota dimulai dari *neopolis* (kota baru) - *polis* (kota pusat keagamaan dan pemerintahan) - *metropolis* (kota induk) - *megapolis* (kota yang amat besar) - *tiranopolis* (kota yang mulai mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya) - *nekropolis* (kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya).<sup>54</sup>

N. Daldjoeni juga mengutip dari Lewis Mumford yang membagi perkembangan kota menjadi tiga fase, yaitu fase teknis, paleoteknis dan neoteknis. Fase teknis adalah fase di mana manusia mengeksploitasi sumber daya air dan angin, fase paleoteknis adalah fase di mana manusia menjadikan tenaga uap sebagai energi dan fase neoteknis adalah fase di mana listrik dan bensin telah menjadi sumber energi.<sup>55</sup>

Teori mengenai perkembangan kota sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perkembangan kota sebagaimana telah disebutkan di atas. Dari faktor-faktor tersebut para ahli

---

<sup>54</sup> Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>55</sup> N. Daldjoeni, *Op. cit.*, hlm 133-134.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencoba menyusun teori perkembangan kota berdasarkan sudut pandang sosiologis, demografis, ekonomi dan keruangan (*spatial*).

### a) Sudut pandang sosiologis

Berdasarkan sudut pandang ini ada dua teori perkembangan kota, yaitu Teori Area Alamiah (*The Theory of Natural Areas*) dan Teori Intensitas Hubungan. Konsep teori “Natural Areas” lebih menitikberatkan pada sifat manusianya (*human nature*) daripada lingkungan alam sebagai faktor penentu perkembangan kota, di mana ada kecenderungan kelompok-kelompok primordial tertentu (ras, agama, kebangsaan, daerah dan profesi) untuk mendiami daerah yang sama. Pengelompokan tersebut dapat menimbulkan satu pola segregasi ekologis, yaitu pengelompokan orang-orang yang mempunyai karakteristik yang relatif sama, terkonsentrasi dan terpisah dari kelompok-kelompok lain. Segregasi ini dapat dilihat dari nama-nama wilayah tempat tinggal yang ada di kota-kota, misalnya tempat tinggal mayoritas orang Jawa di kota Pekanbaru (Riau) yang bernama Sukajadi dan Wonorejo dan tempat tinggal mayoritas keturunan Cina di Jakarta yang bernama Petak Sembilan.

Teori intensitas merupakan perkembangan dari teori “*Natural Areas*” karena segregasi yang terjadi di suatu wilayah kota merupakan ciri keamatan hubungan dari mereka yang

mempunyai latar belakang daerah yang sama. Pertalian antara mereka yang ada di kota dan desa asalnya tetap terlihat dan menunjukkan intensitas hubungan yang cukup akrab. Oleh karena itu kedatangan orang-orang dari daerah pedesaan selalu menuju ke daerah di mana terkelompoknya orang-orang desa yang sama. Kedatangan orang-orang desa ini merupakan faktor yang mendorong penambahan penduduk kota yang membutuhkan ruang dan fasilitas.<sup>56</sup>

b) Sudut pandang demografis

Dari sudut pandang ini para ahli berpendapat bahwa faktor penting dalam perkembangan kota adalah perkembangan penduduk, baik secara alami maupun migrasi. Cepat lambatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota ditentukan oleh kecepatan perkembangan penduduknya. Jumlah penduduk mempunyai hubungan timbal-balik dengan perkembangan kota. Maksudnya adalah bahwa penambahan penduduk memungkinkan terjadinya perkembangan kota, dan sebaliknya perkembangan kota mempunyai kemungkinan pula bagi bertambahnya jumlah penduduk, terutama pendatang.<sup>57</sup>

c) Sudut pandang ekonomi

Sudut pandang ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu kota merupakan faktor pendorong bagi

---

<sup>56</sup> H. Khairuddin, *Op. cit.*, hlm. 194-195.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 195-198.

perkembangan kota tersebut. Perkembangan ekonomi di suatu kota akan menimbulkan *multieffect* terhadap bidang-bidang perekonomian yang lain, misalnya pertumbuhan industri-industri, transportasi, jasa-jasa dan bangunan-bangunan gedung. Komponen-komponen tersebut membutuhkan ruang yang tidak sedikit dan memerlukan penambahan-penambahan lokasi baru. Pertumbuhan ekonomi kota tidak terlepas dari potensi dan aktivitas ekonomi yang berjalan di kota tersebut. Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh potensi daerah setempat, seperti sumberdaya alam dan sumber daya manusia, industrialisasi dan pendapatan daerah.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan bidang ekonomi, ada beberapa teori perkembangan kota, antara lain:

- (1). *Teori Central Place*: Teori ini menyatakan bahwa suatu kota berkembang sebagai akibat dari fungsinya dalam menyediakan barang-barang dan jasa untuk daerah sekitarnya.
- (2). *Teori Spread Effects*: Teori ini menitikberatkan pada daerah-daerah sekitar kota akibat permintaan-permintaan untuk memenuhi pusat kota.
- (3). *Teori Urban Base*: Teori ini menganggap bahwa perkembangan kota ditimbulkan dari fungsinya dalam

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 198-203.



menyediakan barang yang tidak hanya bagi daerah sekitarnya tetapi juga ke seluruh daerah-daerah di luar batas kota termasuk ke luar negeri.

(4). *Teori Ukuran Kota*: Teori ini berpendapat bahwa ukuran kota merupakan faktor terpenting yang menentukan laju perkembangan kota. Ukuran kota yang besar berarti memberikan keuntungan yang lebih besar pula dari penggunaan prasarana-prasarana yang tersedia, dan juga merupakan pasar yang sangat luas.

(5). *Teori Faktor Penawaran*: Teori ini merupakan gabungan antara teori central place dengan urban base yang mengemukakan bahwa besarnya potensi perkembangan suatu kota tergantung pada kesanggupannya untuk menarik sumber-sumber daya (*resources*) yang produktif yang diperlukan dari luar untuk digunakan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan oleh pasaran nasional dan internasional.<sup>59</sup>

d) Sudut pandang keruangan (*spatial*)

Teori perkembangan kota yang didasarkan pada sudut pandang keruangan ini merupakan teori yang disamping mengaitkan aktivitas sebagai penyebab perkembangan kota, teori ini lebih menekankan pada bentuk dan penggunaan tata

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 203-205.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ruang yang dipakai akibat adanya perkembangan kota, terutama bentuk pemekaran wilayah kota.<sup>60</sup> Dengan kata lain teori ini membahas tentang perkembangan kota secara ekologis.<sup>61</sup>

Ada tiga teori perkembangan kota dari sudut pandang keruangan, yaitu:

### (1) Teori konsentrik (*Concentric Zone Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess yang menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkungan-lingkungan konsentrik (*concentric zones*). Lingkungan-lingkungan konsentrik tersebut adalah:

(a) Daerah pusat bisnis (*the central business district*): yaitu daerah terdalam dari suatu kota. Di daerah ini terdapat bangunan-bangunan besar seperti kantor dan toko.

(b) Daerah transisi (*the zone of transition*): yaitu daerah yang mengitari daerah pusat bisnis. Daerah ini merupakan peralihan dari tempat tinggal dan toko-toko menjadi daerah perdagangan industri yang banyak

---

<sup>60</sup> Lihat juga Rahardjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983).

<sup>61</sup> Konsep ekologi kota mengacu pada pemahaman "interaksi antara manusia dan alam sekitarnya". Perubahan ekologi akan terjadi bila salah satu dari komponen itu mengalami perubahan. Wujud konkret dari interaksi itu tampak dalam bentuk fisik kota, struktur sosialnya, organisasi sosial-ekonominya dan sebagainya (Kuntowijoyo, 1994: 55-56). Contoh tulisan yang membahas tentang perkembangan ekologi kota adalah Mumuh Muhsin Z., dan H.T. Ibrahim Alfian dalam *Kota Bogor: Studi Tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 sampai Abad ke-20* (Yogyakarta: BPPS UGM, 1995).

dihuni oleh golongan lapisan bawah dan para migran dari desa yang berpenghasilan rendah.

(c) Daerah tempat tinggal para pekerja (*the zone of workingmen's homes*): yaitu daerah yang sedikit lebih baik dari daerah transisi. Para pekerja di sini berpenghasilan lumayan sehingga hidupnya sedikit lebih pantas.

(d) Daerah tempat tinggal golongan kelas menengah (*the zone of middle class dweller*): yaitu daerah yang dihuni oleh orang-orang profesional, pemilik usaha atau bisnis kecil-kecilan dan pegawai-pegawai tingkat atas.

(e) Daerah tempat tinggal para penglaju (*the commuter's*): yaitu daerah terluar dari suatu kota yang bila siang hari dapat dikatakan kosong karena penghuninya kebanyakan bekerja.<sup>62</sup>

### (2) Teori sektor (*The Sector Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt yang menyatakan bahwa unit-unit kegiatan tidak selalu mengikuti zone-zone teratur secara konsentris tetapi dengan membentuk sektor-sektor. Daerah-daerah kelas satu cenderung berada di tepian terluar dari suatu sektor,

---

<sup>62</sup> H. Khairuddin, *Op. cit.*, hlm. 207.

sedangkan daerah-daerah murah cenderung berada di pusat suatu sektor.<sup>63</sup>

### (3) Teori inti berganda (*Multiple-Nuclei Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh C.D. Harris dan Edward L. Ullman yang menyatakan bahwa suatu kota terdiri dari beberapa pusat atau inti perkembangan. Setiap pusat cenderung diwarnai oleh satu jenis kegiatan, misalnya pemerintahan, rekreasi, pendidikan dan perdagangan. Beberapa pusat mungkin sudah berkembang sejak awal berdirinya kota dan sebagian lagi muncul dan berkembang kemudian. Perkembangan pusat-pusat itu memiliki beberapa alasan, yaitu:

- (a) Beberapa kegiatan memerlukan fasilitas-fasilitas tertentu sehingga memusat di suatu tempat, yaitu di tempat terdapatnya fasilitas-fasilitas tersebut.
- (b) Beberapa kegiatan atau usaha yang sama akan menguntungkan bila lokasinya berdekatan satu sama lain.
- (c) Ada beberapa jenis usaha yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat berada dalam satu tempat yang sama.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

(d) Untuk beberapa usaha, pusat kota adalah tempat yang kurang menguntungkan dan terlalu mahal.<sup>64</sup>

Teori-teori perkembangan kota yang didasarkan pada sudut pandang keruangan tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain seperti diungkapkan oleh Millan Alihan, menurutnya teori konsentrik yang dikemukakan Burgess terlalu menekankan pada segi ekonomi sehingga segi sosio-kultural kurang diperhatikan. Davis juga mengkritik teori konsentrik dengan mengatakan bahwa central business tidak selalu bundar bentuknya dan tata guna tanah yang menguntungkan secara ekonomis ternyata mencuat ke luar dari jaringan jalan raya ataupun zone pertama. Firey juga mengkritik bahwa dalam satu zone belum tentu terdapat orang-orang dari kelas yang sama. Ia membuktikan hal ini dengan melihat adanya dua golongan masyarakat yang kontras yang tinggal di daerah transisi, yaitu golongan kaya dan golongan imigran kelas bawah. Kritik ini juga berlaku untuk teori sektor dari Homer Hoyt.<sup>65</sup>

Berdasarkan teori-teori mengenai perkembangan kota seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu kota ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi karakteristik demografi dan geografi, kelompok-kelompok sosial

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

<sup>65</sup> Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 37. Lihat juga N. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota* (Bandung: Alumni, 1978)

yang berperan, kebijakan politik pemerintah setempat, kebudayaan kota dan sarana transportasi dalam kota. Sedangkan yang menjadi faktor ekstern adalah potensi wilayah penyangganya, baik sebagai wilayah pemasok bahan pokok maupun wilayah lain yang menjadi patner sederajat.<sup>66</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perkembangan kota berdasarkan sudut pandang ekonomi dan keruangan. Teori perkembangan kota berdasarkan sudut pandang ekonomi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu kota merupakan faktor pendorong bagi perkembangan kota tersebut. Faktor pendorong perkembangan kota Timika adalah pertumbuhan ekonomi kota yang dipengaruhi oleh potensi daerah yaitu sumber daya alam yang berupa bahan tambang (tembaga, emas dan perak) yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi kota Timika menimbulkan *multieffect* terhadap bidang-bidang perekonomian yang lain, misalnya pertumbuhan industri-industri, transportasi, jasa-jasa (komunikasi dan perbankan), dan bangunan gedung-gedung (sekolah, rumah sakit dan tempat rekreasi). Komponen-komponen tersebut membutuhkan ruang yang tidak sedikit dan memerlukan penambahan lokasi baru sehingga wilayah kota Timika mengalami pemekaran.

---

<sup>66</sup> Edi Sedyawati, dkk., *Tuban: Kota Pelabuhan di Jalan Sutra*, Jakarta, Depdikbud, 1997, hlm. 5.

Teori perkembangan kota berdasarkan sudut pandang ekonomi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Faktor Penawaran yang merupakan gabungan dari Teori Central Place dan Teori Urban Base. Berdasarkan teori tersebut potensi perkembangan kota Timika bergantung pada kemampuan PT. Freeport Indonesia untuk menarik sumber daya produktif yang digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan oleh pasaran nasional dan internasional.

Selain itu juga menggunakan teori perkembangan kota berdasarkan sudut pandang keruangan, yang di samping mengaitkan aktivitas sebagai penyebab perkembangan kota Timika juga lebih menekankan pada bentuk dan tata ruang yang dipakai akibat adanya perkembangan kota, terutama bentuk pemekaran wilayah kota.

### c. Kota Timika

Timika adalah sebuah kota yang proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh operasionalisasi PT. Freeport Indonesia yang mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik dan sosial yang besar khususnya bagi Timika. Menurut Nelissen seperti dikutip oleh P.J.M. Nas faktor-faktor yang berperan penting dalam proses munculnya kota adalah ekologi, teknologi dan organisasi sosial.<sup>67</sup> Begitu juga dengan Kota Timika, pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor ekologi yaitu

---

<sup>67</sup> P.J.M. Nas, *Op. cit.*, hlm 57.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sumber daya alam yang terkandung di hampir seluruh wilayah sekitar Timika yang berupa tembaga, emas dan perak. Faktor ekologi tersebut mendorong PT Freeport Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi sosial yang bergerak di bidang ekonomi untuk melakukan kegiatan perindustriannya dengan menggunakan hasil-hasil teknologi modern seperti alat transportasi, telekomunikasi dan pertambangan. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi, pertambangan dan pemasarannya PT Freeport Indonesia membangun dan mengembangkan fungsi Timika hingga menjadi sebuah kota.

Dalam perkembangannya di Timika sering terjadi konflik, baik antar etnis atau masyarakat setempat maupun antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah dan PT. Freeport Indonesia. Masyarakat setempat yang dimaksud menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Timika dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya.<sup>68</sup>

Konflik yang sering terjadi di Timika merupakan bentuk dari konflik sosial. Konflik sosial dapat diartikan menjadi dua hal, yang pertama adalah perspektif atau sudut pandang tertentu di mana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap interaksi manusia dan struktur sosial, dan yang kedua adalah pertikaian terbuka seperti

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 184.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perang, revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Pendekatan konflik sebagai perspektif memandang masyarakat, organisasi dan berbagai sistem sosial lainnya sebagai ajang pertandingan perorangan dan kelompok. Pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kelompoknya.

Hampir setiap konflik melibatkan banyak pihak yang antara satu sama lain terkadang tumpang-tindih. Misalnya pemerintah sering berbicara mengatasnamakan pemerintah sendiri, negara secara keseluruhan, rakyat, ideologi, fraksi partai politik tertentu atau kelas sosial tertentu. Setiap pernyataan diarahkan pada pihak yang berbeda-beda sehingga karakter konflik menjadi kompleks. Konflik terjadi karena adanya pertentangan tujuan yang bervariasi. Konflik juga dibedakan atas dasar cara yang digunakan, dari pemaksaan terang-terangan, ancaman, sampai dengan bujukan (misalnya bujukan dari partai politik tertentu dalam pemilihan umum). Kebanyakan teori konflik berpendapat bahwa konflik bersumber dari perebutan atas sesuatu hal yang terbatas, namun ada pula yang melihatnya sebagai akibat ketimpangan. Banyak konflik diakibatkan oleh perbedaan tujuan ataupun perbedaan nilai-nilai. Konflik sosial yang terjadi di Timika sering diakibatkan oleh perebutan hak atas tanah dan hal-hal sederhana yang terkadang dianggap bernilai tinggi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Adam Kuper & Jessica Kuper, *Op. cit.*, hlm. 155-158.

### d. PT. Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Incorporate, yaitu salah satu perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Papua. Operasi PT Freeport Indonesia meliputi eksplorasi, penambangan serta penggilingan bijih tambang yang mengandung tembaga, emas dan perak serta memasarkannya ke seluruh dunia. PT Freeport Indonesia juga merupakan pemilik saham sebesar 25 % dari PT Smelting (Gresik) yang mengoperasikan pabrik peleburan dan pemurnian tembaga di Indonesia.<sup>70</sup>

## E. Metode dan Pendekatan Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001 adalah metode sejarah, sebagai cara kerja untuk menganalisis dan mensistesa bahan yang akan dikaji agar diperoleh suatu kebenaran yang hakiki. Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari disiplin lain seperti geografi, sosiologi dan antropologi. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin.

---

<sup>70</sup> *PTFI General Induction*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 3.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau yang dilakukan secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi.<sup>71</sup>

Dalam metode penelitian sejarah terdapat empat tahap, yaitu:

a. Pengumpulan sumber (*heuristik*)

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data yang telah diterbitkan oleh para penulis terdahulu yang relevan dan mendukung. Sumber data tersebut berupa data tertulis dari buku-buku, dokumen-dokumen pemerintah, data dari surat kabar dan website.

b. Kritik sumber (*verifikasi*)

Setelah buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan terkumpul, peneliti kemudian akan melakukan kritik sumber atau verifikasi. Tujuan dilakukannya kritik sumber ini adalah untuk mengetahui kebenaran dan keaslian sumber.

Terdapat dua macam kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian (otentisitas) sumber, misalnya mengenai sifat bahan, jenis huruf dan bahasa yang dipakai. Kritik intern digunakan untuk mengetahui apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak (kredibilitas sumber), misalnya dengan membandingkan satu fakta dengan fakta lain. Jika

---

<sup>71</sup> Louis Gottchalk, *Op. cit.*, hlm. 32.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fakta tersebut memiliki kesamaan maka dianggap layak bahwa fakta itu benar.<sup>72</sup>

Kritik ekstern yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menguji keaslian dan kebenaran sumber dengan mengklarifikasikan asal sumber tersebut. Kritik intern juga dilakukan dalam penelitian ini karena sumber data yang ada diperoleh dari berbagai tempat dan ditulis oleh banyak orang yang memungkinkan adanya faktor-faktor subyektif yang mempengaruhi penulisannya. Oleh karena itu penulis melakukan perbandingan dan mencocokkan berbagai sumber yang ada.

### c. Interpretasi

Setelah kebenaran fakta dianggap terjamin, kemudian akan dilakukan interpretasi yang bertujuan untuk menangkap apa yang tersirat dan apa yang tersurat dalam sumber data. Langkah yang diambil adalah dengan menganalisis sumber secara cermat untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam kajian sejarah yang dipengaruhi oleh jiwa jaman, kebudayaan, lingkungan sosial dan agama yang melingkupinya.<sup>73</sup>

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah perkembangan kota Timika yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan sebagai dampak berdirinya PT. Freeport Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1960-2001.

---

<sup>72</sup> Koentowijoyo, *Op. cit.*, hlm. 99-100.

<sup>73</sup> Sartono Kartodirjo, *Op. cit.*, hlm. 62-65.

### d. Penulisan (*historiografi*)

Laporan penelitian ini akan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis, yang tidak hanya menjawab permasalahan saja tetapi juga berusaha untuk menjelaskan penyebab dari peristiwa itu terjadi (ada kausalitas). Penulis akan mengetengahkan kausalitas bagaimana proses awal berdirinya kota Timika? Apa kaitannya dengan berdirinya PT. Freeport Indonesia? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Apa pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat kota Timika? Bagaimana perkembangan kota Timika dan posisi penduduk asli?

Penulisan penelitian ini akan menggunakan model evolusi, yaitu jenis penulisan yang menggambarkan perkembangan masyarakat Timika dari awal berdirinya hingga menjadi masyarakat yang kompleks dalam kurun waktu yang relatif lama. Ketika kota Timika masih muda atau baru berdiri kehidupan masyarakatnya masih sederhana dan berpusat pada kegiatan pertanian. Sistem organisasi sosial masih bersifat kesukuan dengan kepala suku sebagai pemimpin dan masih menganut kepercayaan tradisional. Setelah beberapa tahun Timika mengalami perkembangan, kehidupan masyarakatnya semakin kompleks sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan operasional PT. Freeport Indonesia. Masyarakat mulai mengenal sistem-sistem nilai baru yang lebih modern di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik dan sosial-budaya. Timika sekarang

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjadi kota modern dan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten sekaligus Propinsi. Perkembangan tersebut yang dijadikan model dalam penulisan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi sejarah sosial-budaya yang menggunakan pendekatan multidisipliner, meliputi disiplin sejarah, geografis, sosiologis, ekonomi dan politik.

Pendekatan sejarah digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini sebagaimana sebuah sejarah yang terikat dengan metode penelitian sejarah dan memiliki ruang lingkup spasial dan temporal. Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah kota Timika dan ruang lingkup temporalnya adalah tahun 1960-2001.

Pendekatan geografis digunakan untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan fisik kota Timika yang terdiri dari gunung-gunung dan sungai-sungai yang menyimpan kekayaan alam, serta letaknya yang berada di bagian Selatan Pulau Papua.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep sosial, seperti adanya kesenjangan sosial antara masyarakat asli dengan pendatang dimana masyarakat asli termarginalisasi. Di samping itu kehadiran Freeport juga membawa nilai-nilai baru yang membawa perubahan sosial dalam masyarakat kota Timika.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk menjelaskan keadaan ekonomi masyarakat kota Timika yang mengalami kemajuan, yaitu dari

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern dimana pendapatan penduduk juga terus mengalami peningkatan.

Pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan sistem pemerintahan atau birokrasi kota Timika yang dari awal berdirinya terus mengalami perkembangan yaitu dari wilayah kecil pemukiman Suku Kamoro hingga menjadi sebuah Ibukota Propinsi yang wilayahnya semakin luas.

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab. Masing-masing bab merupakan pokok bahasan yang terjalin satu sama lain dan membentuk tema sentral yaitu mengenai sejarah perkembangan kota Timika: studi kasus dampak PT. Freeport Indonesia tahun 1960-2001.

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar untuk memudahkan mendalami aspek-aspek yang tercakup dalam penelitian ini, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan landasan teori, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas proses awal berdirinya Kota Timika yang berisi tentang latar belakang berdirinya kota, berdirinya kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Bab ketiga membahas pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat kota Timika.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bab keempat membahas perkembangan Kota Timika tahun 1960-2001 yang meliputi bidang ekonomi, sosial, sarana dan prasarana fisik, pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota serta posisi penduduk asli.

Bab kelima berisi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang dibahas. Di samping itu juga terdapat saran-saran bagi beberapa pihak yang terkait.





**BAB II**  
**PROSES AWAL BERDIRINYA KOTA TIMIKA**

**A. Latar Belakang Berdirinya Kota**

Tumbuh dan berkembangnya Kota Timika sangat terkait dengan sejarah kedatangan bangsa Barat di Papua dan berdirinya PT. Freeport Indonesia. Kota Timika mulai berdiri pada saat Freeport Sulphur Company merintis usaha eksplorasi bahan tambang berupa tembaga di Papua pada tahun 1960. Usaha Freeport Sulphur Company ini menindaklanjuti penemuan sumber daya alam berupa bahan tambang oleh bangsa Barat yang berkunjung ke Papua. Freeport Sulphur Company kemudian mendirikan perusahaan yang kegiatannya mengeksplorasi, menambang dan menggiling bijih tambang di Papua dengan nama PT. Freeport Indonesia. Kota Timika mulai tumbuh sejalan dengan berdiri dan berkembangnya PT. Freeport Indonesia karena Kota Timika sengaja dibuat atau didirikan oleh PT. Freeport Indonesia sebagai salah satu penunjang kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, berdirinya Kota Timika merupakan bagian dari sejarah berdirinya PT. Freeport Indonesia dan PT. Freeport Indonesia berdiri karena ditemukannya barang tambang oleh bangsa Barat yang datang ke Papua. Sehingga untuk mengetahui proses berdirinya Kota Timika perlu dibahas mengenai sejarah kedatangan bangsa Barat di Papua dan sejarah berdirinya PT. Freeport Indonesia.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### 1. Kedatangan bangsa Barat di Papua

Papua adalah sebutan untuk sebuah pulau besar yang di atas peta tampak sebagai seekor burung raksasa, yaitu wilayah Republik Indonesia yang paling Timur. Selain Papua pulau tersebut juga mempunyai sebutan lain, yaitu Nieuw-Guinea dan Irian. Sebutan “Papua” pada awalnya digunakan oleh pelaut Portugis *Antonio d’Arbreu* yang mengunjungi pantai Irian pada tahun 1551. Nama tersebut kemudian dipakai oleh *Antonio Pigafetta* yang turut bertualang bersama Magelhaes dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Antonio Pigafetta berada di Laut Maluku sekitar tahun 1521. Kata “Papua” berasal dari bahasa Melayu yaitu *pua-pua* yang berarti “keriting”.<sup>74</sup>

Sebutan *Nieuw-Guinea* dipakai oleh bangsa Belanda, semula digunakan oleh *Ynigo Ortiz de Retes* yaitu seorang pelaut Spanyol yang pada tahun 1545 pernah mengunjungi Pantai Utara Papua. Ia memberi nama Nieuw-Guinea karena warna kulit penduduknya yang hitam sama dengan warna kulit penduduk Pantai Guinea di Benua Afrika. Sejak saat itu sebutan Nieuw-Guinea dan variasinya yaitu *Nova Guinea* tercantum dalam peta-peta abad ke-16. Dalam peta-peta Belanda digunakan sebutan Nieuw-Guinea atau Nieuw-Guinee.

Sebutan *Irian* berasal dari beberapa pendapat diantaranya diusulkan oleh *F. Kasiapo* dalam Konferensi Malino tahun 1946. Ia menggunakan istilah *iryen* (bukan irian) yang dalam bahasa Biak berarti “sinar matahari

---

<sup>74</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Op. cit.*, hlm. 3-4.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang menghalau kabut di laut”, sehingga ada harapan bagi para nelayan Biak untuk mencapai tanah daratan Irian di seberangnya. Di pihak lain Presiden Soekarno konon mempopulerkan kata Irian dan bukan Iryan karena dapat dianggap sebagai singkatan dari “Ikat Republik Indonesia Anti Nederland”. Sementara itu berdasarkan berbagai bahasa yang ada di Papua, Irian mempunyai arti yang berbeda-beda, misalnya dalam bahasa Biak-Numfor berarti “tanah panas” (*iri* = tanah; *an* = panas), dalam bahasa Serui berarti “tanah air” (*iri* = tiang pokok; *an* = bangsa), dalam bahasa Merauke berarti “bangsa utama” (*iri* = angkat; *an* = bangsa).<sup>75</sup>

Terlepas dari arti katanya yang berbeda-beda berdasarkan berbagai macam bahasa yang ada di Papua, kata Irian sudah lama dikenal oleh orang-orang Indonesia yang merantau ke daerah Pantai Utara Papua. Pada awal abad ke-8 terlihat adanya hubungan langsung atau tidak langsung antara Irian dengan negara Sriwijaya yang dibuktikan dengan adanya burung-burung yang berasal dari Irian yang dibawa oleh para duta Raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok. Dalam masa jaya Sriwijaya oleh para penulis berita Pulau Irian disebut “*Janggi*”. Lima abad kemudian, yaitu abad ke-13 seorang musafir Tiongkok yang bernama *Chau Yu Kua* menulis berita bahwa di Kepulauan Indonesia terdapat suatu daerah yang bernama *Tung-ki*, yang merupakan bagian dari suatu negara di Maluku. Jika memang *Tung-ki* adalah sebutan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tionghoa untuk “Janggi” berarti antara Irian dan Maluku terdapat suatu hubungan yang erat.

Dalam syair XIV dari kitab *Negarakertagama* gubahan pujangga **Prapanca** yang diselesaikan tahun 1365, menyatakan bahwa Irian merupakan bagian dari wilayah Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kejayaan dan kekuasaan Majapahit mendorong para kepala daerah yang mempunyai kepentingan perdagangan di perairan Kepulauan Indonesia untuk mempersatukan diri dengan negara Majapahit. Seperti halnya para kepala daerah lain yang datang ke Ibu Kota Majapahit untuk menyatakan diri tunduk kepada raja dan perdana menteri Gajahmada, kepala daerah Maluku juga mengakui kedaulatan Majapahit atas daerah-daerah kekuasaannya, yang antara lain meliputi sebagian dari Irian.<sup>76</sup>

Pada abad ke-16 orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Papua. Untuk yang pertama kalinya penduduk Irian melihat orang Eropa adalah ketika **Alvaro de Saavedro** utusan Gubernur Spanyol di Tidore yang dalam perjalanan menuju Meksiko singgah di suatu tempat di Pantai Utara Irian pada pertengahan tahun 1529. pada tahun 1545 di bawah pimpinan **Ynigo Ortiz de Retes** sejumlah orang Spanyol mendarat di sungai Amberno di Pantai Utara Irian. Dengan sebuah upacara kecil Ortiz de Retes menyatakan bahwa pulau yang dijejaknya itu sebagai milik raja Spanyol. Ortiz de Retes adalah orang yang pertama kali menamakan Irian dengan

---

<sup>76</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Neuva Guinea. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Spanyol untuk menguasai Maluku dan Irian digagalkan oleh Belanda. Hal ini berkaitan dengan kecondongan politik untuk menambah atau memperluas daerah jajahan yang berkembang di negara-negara Eropa setelah pertengahan abad ke-19. Dalam hal ini Belanda melalui Tidore yang sudah sejak lama menjadi jajahannya melegitimasi bahwa Irian adalah daerah jajahannya.<sup>77</sup>

Pada awalnya Belanda menguasai Irian secara tidak langsung, yaitu melalui kekuasaannya di Maluku. Tahun 1828 Belanda mulai berupaya untuk sungguh-sungguh menguasai daerah Irian. Dalam sebuah proklamasi Belanda menyatakan bahwa daerah-daerah yang dikuasai oleh Sultan Tidore termasuk Irian menjadi hak Belanda dan melarang bangsa Eropa lain untuk menempati atau memiliki daerah-daerah tersebut. Belanda kemudian mendirikan beberapa benteng di Irian sebagai tanda kekuasaannya. Dengan demikian penguasaan Belanda terhadap Irian secara langsung terwujud. Untuk memantapkan kekuasaannya di Irian, Belanda kemudian mendirikan kontrolir penguasa daerah di beberapa wilayah seperti Manokwari dan Fakfak.

Selama masa kekuasaannya di Irian, Belanda melakukan upaya penyebaran agama Kristen dan Katolik serta mengembangkan upaya pendidikan formal dan pelayanan kesehatan, misalnya dengan mendirikan sekolah-sekolah guru di daerah Teluk Cendrawasih dan sekolah-sekolah Katolik di daerah Merauke. Dan pada masa gerakan kebangsaan Indonesia,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

salah satu daerah di Irian yang disebut Digul atau Tanah Merah oleh Belanda dijadikan tempat pengasingan bagi yang tertangkap saat melakukan serangan atau pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda.<sup>78</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan kapitalisme di negara-negara Eropa dan Amerika, bangsa Barat melakukan eksplorasi di daerah-daerah jajahannya untuk mencari bahan mentah yang dibutuhkan bagi perindustrian mereka. Demikian halnya dengan Belanda, Belanda mengirim para sarjana dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan eksplorasi sekaligus mengembangkan peta Irian Jaya. **H. Colijn** adalah salah seorang ahli geologi yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk membuat suatu laporan mengenai keadaan di Irian Jaya. Ekspedisi yang dilakukan oleh H. Colijn inilah yang menjadi awal mula berdirinya PT. Freeport Indonesia di Papua karena ia berhasil menemukan sumber daya alam berupa bahan tambang yang kemudian ditulis dalam laporannya. Dalam upayanya menanamkan kekuasaannya di Irian Jaya Belanda juga mengadakan pembagian wilayah Irian yang sekiranya dapat memantapkan kekuasaannya melalui pemerintah-pemerintah daerah.

Pada masa Perang Pasifik, Irian merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran kekuasaan Jepang. Dalam upayanya menguasai Irian, Jepang mendapat perlawanan dari penduduk pribumi. Kekuasaan Jepang di Irian berakhir ketika pasukan tentara Sekutu di bawah pimpinan Jendral **Douglas Mac Arthur** berhasil mengalahkan

---

<sup>78</sup> Keadaan *Perekonomian Irian Jaya Masa Kekuasaan Belanda* dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 5.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mereka di beberapa daerah di Irian pada tahun 1944. pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya maka secara otomatis Irian menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Irian Jaya menjadi bagian dari Propinsi Maluku yang sebelum Perang Dunia II merupakan suatu Karesidenan dengan seorang Residen yang berkedudukan di Ambon.

Upaya Belanda untuk menguasai Kepulauan Indonesia termasuk Papua tidak berhenti sampai di situ. Dengan berbagai upaya Belanda berusaha menguasai kembali dan tetap mempertahankan Kepulauan Indonesia sebagai tanah jajahan kerajaan Belanda. Dengan berbagai upaya pula bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia termasuk Papua sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Presiden Soekarno sebagai pemimpin Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau TRIKORA dalam memperjuangkan pembebasan Irian Jaya. TRIKORA dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 1961 yang isinya:

- a. Mengagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial;
- b. Mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Jaya, tanah air Indonesia;
- c. Mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.<sup>79</sup>

Sejak Presiden Soekarno mengumumkan komandonya, perjuangan pembebasan Irian Jaya diadakan berdasarkan ketiga pernyataan tersebut.

---

<sup>79</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Op. cit.*, hlm. 87-88.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pembebasan Irian Jaya mendapat simpati dari berbagai pihak, diantaranya dari Amerika Serikat. Seorang Diplomat Amerika Serikat yang bernama *Ellsworth Bunker* pada bulan Maret 1962 mengajukan usul yang kemudian dikenal sebagai Rencana Bunker. Isi pokok Rencana Bunker adalah:

- a. Pemerintahan Irian Jaya harus diserahkan kepada RI;
- b. Sesudah sekian tahun di bawah Pemerintahan RI, rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri;
- c. Pelaksanaan Irian Jaya akan selesai dalam waktu dua tahun;
- d. Untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antara kekuatan-kekuatan Indonesia-Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB yang lamanya satu tahun. Waktu ini dipakai untuk memulangkan seluruh militer dan pegawai Belanda.<sup>80</sup>

Berdasarkan Rencana Bunker tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara *Menlu Subandrio* yang mewakili RI dan *van Royen* serta *Schuurmann* yang mewakili Belanda. Penandatanganan persetujuan tersebut disaksikan oleh Sekjen PBB *U. Thant* dan Bunker. Pokok persetujuan New York adalah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 123-124.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Netherland akan menyerahkan Irian Jaya kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = *United Nations Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Oktober 1962.
- b. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Jaya berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan dengan bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB.
- c. Pemerintahan UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. Pada tanggal ini bendera PBB diturunkan.
- d. Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
- e. Pada tahun 1969 rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri dari RI.

UNTEA berhasil menjalankan tugasnya dengan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Jaya benar-benar menjadi bagian dari wilayah RI yang berdaulat dengan **E. J. Bonay** seorang putera asli Irian sebagai Gubernur Irian Jaya pertama yang bebas.<sup>81</sup>

### 2. Berdirinya PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia adalah anak perusahaan Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporate, yaitu salah satu perusahaan penanaman modal

---

<sup>81</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

asing dari Amerika Serikat yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah. Operasi PT. Freeport Indonesia meliputi eksplorasi, penambangan dan penggilingan bijih tambang yang mengandung tembaga, emas dan perak serta memasarkannya ke seluruh dunia. Saham PT. Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporate sebesar 81,28%, PT. Indocopper Investama Corporation sebesar 9,36% dan Pemerintah RI sebesar 9,36%. PT Freeport Indonesia juga merupakan pemilik saham sebesar 25 % dari PT Smelting (Gresik) yang mengoperasikan pabrik peleburan dan pemurnian tembaga di Indonesia.<sup>82</sup>

Sejarah berdirinya PT. Freeport Indonesia berawal pada saat Pemerintah Belanda mengirim ekspedisi *Colijn* tahun 1936 ke Irian Jaya. Ekspedisi yang beranggotakan **Dr. Anton H. Colijn**, **Jean Jacques Dozy** dan **J. Wissel** tersebut ditugaskan oleh Pemerintah Belanda untuk membuat laporan mengenai keadaan Irian Jaya. Hal ini berkaitan dengan upaya Belanda untuk tetap menguasai Irian Jaya sebagai tanah jajahan Hindia-Belanda di Indonesia. Pada saat akan mendaki puncak Ngga Pulu (puncak *Cartensz*) Jean Jacques Dozy melihat sebuah bukit yang menurutnya adalah sebuah cebakan mineral yang sangat kaya. Jean Jacques Dozy yang seorang geolog langsung menamakan bukit itu

---

<sup>82</sup> *PTFI General Induction*, hlm. 3.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Ertsberg* atau “Gunung Bijih” karena ia mendeteksi adanya kandungan tembaga yang kaya di dalamnya.<sup>83</sup>

Jean Jacques Dozy kemudian menerbitkan laporan tentang penemuannya itu pada tahun 1939. Tetapi karena pecah Perang Dunia II, laporannya tidak menjadi prioritas yang ditindaklanjuti oleh negara-negara Eropa pada saat itu. Laporan tersebut terlupakan dan tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Tahun 1959 ketika sedang melakukan riset kepustakaan seorang geolog asal Freeport Sulphur Company dari Louisiana, Amerika Serikat yang bernama **Forbes K. Wilson** menemukan laporan Dozy. Laporan tersebut menggugah semangat Forbes K. Wilson yang juga seorang manajer eksplorasi dari Freeport Sulphur Company untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian pada tahun 1960 bersama Del Flint, Forbes K. Wilson pergi ke Papua yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Dengan peralatan yang lebih lengkap dan canggih Wilson menemukan bahwa Gunung Bijih tersebut tingginya mencapai 179 meter di atas permukaan laut dan diperkirakan kandungan tembaganya dapat mencapai hingga kedalaman 360 meter.<sup>84</sup>

Freeport belum dapat melaksanakan niatnya untuk segera menambang kekayaan alam Papua yang telah mereka temukan tersebut karena pada saat itu kondisi politik Indonesia sedang mengalami berbagai gejolak. Baru pada awal kekuasaan rezim Orde Baru Freeport mengajukan izin dan menjadi Penanam Modal Asing pertama di Indonesia.

---

<sup>83</sup> George A. Mealey, *Op. cit.*, hlm. 51-78. Gambar *Ekspedisi Colijn* dan *J. J. Dozy* dapat dilihat pada lampiran 27.

<sup>84</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam UU No. 11 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, investasi asing di bidang pertambangan umum dilakukan melalui penerapan sistem Kontrak Karya (KK), yaitu perjanjian antara pemerintah dengan investor yang berbadan hukum Indonesia, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak pemilik (*principal*) sedangkan perusahaan pertambangan bertindak sebagai kontraktor. Perjanjian kontrak karya secara khusus memberi hak tunggal kepada investor untuk melakukan penelitian sumberdaya mineral yang terkandung dalam wilayah kontrak karya, dan kemudian menambang, mengolah dan memasarkan endapan mineral yang ditemukan. Hak tunggal ini diberikan sebagai konsekuensi atas kesediaan menanggung resiko atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi dimana resiko kegagalannya sangat tinggi, disamping pemenuhan pembayaran pajak dan kewajiban lainnya yang disebutkan dalam Kontrak Karya.

Dalam melaksanakan operasinya, pemegang Kontrak Karya mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya, termasuk mempekerjakan sub kontraktor untuk melaksanakan tahap-tahap operasinya. Pemegang Kontrak Karya juga mempunyai kewajiban seperti menanam modal, membayar pajak dan pungutan-pungutan lain, kewajiban mengikuti standar pertambangan yang ditetapkan pemerintah, kewajiban melaksanakan peraturan lingkungan hidup, dan kewajiban melaksanakan standar keselamatan kerja dan kesehatan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk memperoleh suatu kontrak karya pertambangan, kontraktor yang berminat harus mengajukan aplikasi yang disertai surat keterangan dari Duta Besar Republik Indonesia di negara asalnya. Kemudian dilakukan perundingan tentang jangka waktu berlakunya kontrak karya dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Kehutanan. Setelah tahap ini dilalui, rancangan kontrak diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan DPR. Setelah itu, atas rekomendasi DPR dan BKPM kontrak diajukan kepada Presiden. Bila disetujui, Presiden memberikan persetujuan dalam bentuk surat persetujuan dan sekaligus menunjuk Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani kontrak karya tersebut. Seluruh proses ini sedikitnya memakan waktu satu setengah tahun. Karena waktu tunggu yang sangat panjang, pemerintah biasanya mengeluarkan Izin Prinsip kepada Kontraktor disertai Surat Izin Penelitian Pendahuluan (SIPP) agar kontraktor dapat melakukan berbagai pekerjaan persiapan sambil menunggu keluarnya kontrak karya.<sup>85</sup>

Kebijakan kontrak karya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Bersumber pada itu, maka semua peraturan tentang pertambangan disesuaikan. Untuk mengurangi kesan kepemilikan, pemerintah menggunakan alasan penguasaan demi

---

<sup>85</sup> Al Rahab Amirudin, *Op. cit.*, hlm. 33. Mengenai perusahaan jasa pertambangan di luar minyak dan gas bumi dapat dilihat dalam *SK Menteri Pertambangan No. 432/Kpts/M/Pertamb/1972*, pada lampiran 1.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepentingan pemasukan negara, kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan dengan memakai aset yang dikuasai oleh negara.<sup>86</sup>

Kontrak karya pertama (KK I) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 1967. Kontrak karya generasi pertama tersebut hanya diberikan kepada satu perusahaan yaitu PT. Freeport Indonesia Company untuk memulai penambangan tembaga di Ertsberg, Papua. Dalam kontrak karya tersebut, Freeport diizinkan untuk mengimpor seluruh peralatannya tanpa dikenal penjadwalan untuk melakukan nasionalisasi saham dengan masa konsesi tiga puluh tahun. Dalam Kontrak Karya I ini, Freeport juga diberi fasilitas *tax holiday* dan keringanan pajak selama tiga puluh tahun, tidak dibebani biaya pembebasan atas tanah, serta tidak memiliki kewajiban untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan daerah.<sup>87</sup>

Setelah KK I ditandatangani, Freeport segera mengontrak Bechtel sebuah perusahaan konstruksi terkemuka dari Amerika Serikat untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk keperluan penambangan. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi:

- a. Jaringan jalan darat sepanjang 74 mil mulai dari pantai ke tempat pertambangan pada ketinggian 3.700 meter dpl.;
- b. Jalan sepanjang 1.100 meter melalui Pegunungan Cartenzs dan lintasan kawat trem untuk membawa batu yang mengandung mineral ke lokasi pengolahan yang berada di ketinggian 2.800 meter dpl.;

---

<sup>86</sup> *Loc. cit.*

<sup>87</sup> *Tax holiday* adalah pembebasan dari kewajiban membayar pajak selama waktu yang telah ditentukan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Sambungan pipa untuk membawa konsentrat tembaga dari pabrik ke pelabuhan Amapare di Laut Arafuru;
- d. Kota dengan kapasitas 1.500 jiwa dan sebuah lapangan terbang yang berjarak 22 mil dari pelabuhan laut, kota tersebut adalah yang sekarang disebut kota Timika;
- e. Sarana pemukiman untuk para pekerjanya di lokasi yang berjarak 10 km dari pertambangan, lokasi tersebut dikenal dengan nama Tembagapura.

Berbagai material yang digunakan untuk pembuatan infrastruktur, konstruksi pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Begitu juga dengan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari para pekerja dan staf ahli Freeport didatangkan dari Singapura dan Australia.<sup>88</sup>

Dalam usahanya PT. Freeport Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mengeksplorasi, menambang, memproses dan memasarkan konsentrat tembaga dan produk-produk lainnya dari wilayah Kontrak Karya PTFI di Papua.
- b. Melakukan usaha yang menguntungkan dan menciptakan nilai tambah dalam rangka mendatangkan laba bagi para pemegang saham, karyawan dan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga mampu menarik investasi-investasi lain dalam bisnis PTFI di Indonesia.

---

<sup>88</sup> Al Rahab Amirudin, *Op. cit.*, hlm. 34-35.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Mendorong terciptanya suatu lingkungan kerja yang menantang dan mendirikan sebuah organisasi yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuannya, dengan para karyawan yang memiliki motivasi, kemampuan, tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.<sup>89</sup>

PT. Freeport Indonesia mulai melakukan pengeboran eksplorasi di Ertsberg pada bulan Desember 1967. Operasi penambangan dimulai pada tahun 1969. Konstruksi dalam skala besar dimulai pada bulan Mei 1970 dan pengapalan (ekspor) pertama konsentrat tembaga berlangsung pada bulan Desember 1972. Pada bulan Maret 1973 proyek pertambangan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto dan sekaligus meresmikan Kota Tembagapura. Sepuluh tahun kemudian (1983) Freeport mengalami krisis karena bahan tambang yang diambil dari Puncak Ertsberg menipis dan rendahnya harga pasar, ditambah dengan berkurangnya minat para investor dan keharusan Freeport membayar hutang-hutangnya. Menghadapi kenyataan ini operasi Freeport hampir dihentikan karena terus merugi.<sup>90</sup>

Perubahan besar kemudian terjadi pada tahun 1986 ketika **James Robert Moffet** diangkat menjadi *Chief Executive Officer* (CEO) yang ditunjukkan dengan peningkatan upaya-upaya eksplorasi secara intensif. Hasil eksplorasi itu adalah ditemukannya cadangan emas dan tembaga di *Grasberg* atau “Gunung Rumpit” yang memungkinkan PTFI memasuki suatu babak baru yang lebih menggairahkan dan menguntungkan. Dengan diketahuinya kandungan bahan tambang emas sebesar 2,16 milyar ton

---

<sup>89</sup> PTFI General Induction, hlm. 3.

<sup>90</sup> Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta, Pustaka Raja, 2003, hlm. 66.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(cadangan emas terbesar di dunia) dan tembaga sebesar 22 juta ton lebih (nomor 3 terbesar di dunia), PTFI bergairah untuk membangun prasarana secara lengkap dan eksplorasi produksi secara besar-besaran.<sup>91</sup> Pada bulan Desember 1991 Kontrak Karya II ditandatangani, yang memberikan hak kepada PTFI untuk beroperasi selama 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan selama 2 x 10 tahun. Ini berarti KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan apabila ada perpanjangan dua kali, baru berakhir pada tahun 2041.<sup>92</sup>

Sampai saat ini karyawan yang terlibat dalam operasi tambang PTFI mencapai 16.000 orang. Dari data bulan Maret 2002 diketahui bahwa karyawan PTFI sebanyak 7.438 orang, sedang selebihnya adalah para kontraktor PTFI dan karyawan perusahaan privatisasi. Sepuluh persen karyawan PTFI adalah staf. Karyawan PTFI terdiri dari 98 persen orang Indonesia yang 25 persennya adalah orang Papua. Para karyawan PTFI berasal dari berbagai suku di Papua dan ratusan pulau di Indonesia. Sedangkan karyawan asing yang berjumlah dua persen diantaranya berasal dari Amerika, Australia, Kanada, Filipina dan Afrika Selatan. Oleh karena itu gugus kerja PTFI beraneka ragam dalam ras dan etnis.<sup>93</sup>

Daerah operasi PT. Freeport Indonesia meliputi dataran tinggi dan dataran rendah yang cuacanya bervariasi sesuai dengan lokasi. Dataran tinggi terdiri dari sebagian besar hutan pegunungan dan pegunungan

---

<sup>91</sup> Lihat gambar *Grasberg* pada lampiran 21.

<sup>92</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 66. Sejarah singkat atau *Kronologi Berdirinya PTFI* dapat dilihat pada lampiran 30.

<sup>93</sup> *PTFI General Induction*, hlm. 29.

tinggi. Cuaca pada umumnya basah dan dingin. Temperaturnya berkisar antara 8° C -22° C. Di daerah dataran tinggi selain jumlah oksigennya jauh lebih sedikit juga sering tertutup kabut tebal yang mengakibatkan berkurangnya daya pandang. Sementara itu daerah dataran rendah terdiri dari rawa yang luas di dekat pantai yang ditumbuhi mangrove sedangkan di daerah tanah datar berupa hutan. Cuaca pada umumnya panas, basah dan lembab dengan temperatur 29° C-32° C dan hujan deras sepanjang tahun.<sup>94</sup>

### **B. Berdirinya Kota Timika**

Sebelum menjadi nama kota, Timika pada awalnya adalah nama sebuah lapangan udara yang dibangun oleh Freeport Sulphur Company pada tahun 1968. Kata "*timika*" berasal dari kata "*timuka* atau *timiko*" yang artinya buaya, yaitu untuk menyebut daerah yang banyak buayanya. Daerah tersebut adalah pantai di bagian Selatan Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Fakfak yang dihuni oleh suku Kamoro.

Timika kemudian digunakan untuk menyebut daerah di sekitar lapangan udara yang dibangun oleh Freeport Sulphur Company tersebut. Semula penduduknya masih sebatas penduduk asli yang jumlahnya sedikit dan tinggal di daerah rawa dan pegunungan berdasarkan suku, diantaranya adalah suku Kamoro dan Amungme. Mereka hidup dengan sistem perekonomian tradisional yaitu dengan mata pencaharian meramu sagu,

---

<sup>94</sup> Orientasi K3, hlm. 2. *Peta Area Penambangan dan Daerah Kerja Freeport* dapat dilihat pada lampiran 17.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mencari ikan dan berburu babi serta memasarkan sebagian hasilnya dengan sistem barter.

Setelah Freeport Sulphur Company memperoleh izin untuk membuka usaha tambang di Papua khususnya di daerah Mimika dari pemerintah Indonesia, maka segera mendirikan perusahaan dengan nama PT. Freeport Indonesia yang telah diawali dengan pembangunan lapangan udara Timika serta beberapa ruas jalan. Dengan berdirinya PT. Freeport tersebut, Timika berkembang menjadi pusat kegiatan penduduk sekitar karena di situ mulai dibangun berbagai fasilitas oleh PT. Freeport Indonesia untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Timika kemudian mengalami perkembangan di bidang pemerintahan karena arus keluar-masuk penduduk di wilayah ini jauh lebih intensif dibanding wilayah-wilayah lain. Mengingat intensifnya mobilitas penduduk, maka pemerintah daerah membuat perwakilan kecamatan Mimika Baru di Timika. Perwakilan kecamatan ini ditempatkan di Timika untuk membawahi beberapa desa yang karena jaraknya terlalu jauh, sulit diawasi langsung oleh pemerintah daerah di kota kecamatan Mapurujaya. Di samping itu, karena perkembangan yang pesat dari kegiatan perusahaan tambang Freeport dan terlalu jauh serta sulitnya prasarana dan sarana perhubungan antara Kecamatan Mimika Timur dengan Kabupaten Fakfak, maka khusus

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kecamatan Mimika Timur, Akimuga dan Mimika Barat ditangani langsung oleh pembantu Bupati yang ditempatkan di Timika.<sup>95</sup>

Meskipun secara formal wilayah kekuasaan pembantu Bupati meliputi tiga kecamatan, tetapi konsentrasi tugasnya lebih banyak di Mimika Timur karena kegiatannya lebih berkembang pesat dibanding kecamatan lainnya. Bahkan jumlah penduduk menduduki tempat kedua setelah Kecamatan Fakfak dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan di Kecamatan Mimika Timur dibangun kantor-kantor pemerintahan yang setingkat dengan wilayah kabupaten. Di samping itu juga ada kantor-kantor pemerintahan yang berada di bawah koordinasi kecamatan Mimika Timur.<sup>96</sup>

Volume kegiatan ekonomi penduduk Kecamatan Mimika Timur terus mengalami perkembangan sehingga disediakan fasilitas perdagangan. Penduduk sudah dapat menjual hasil buminya secara khusus yang berupa sayur, buah dan ikan kepada Freeport melalui Koperasi Unit Desa. Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan khusus kepada penduduk asli yaitu suku Kamoro dan Amungme berupa bibit binatang ternak, seperti sapi, babi dan ayam.<sup>97</sup>

Berkembangnya usaha Freeport di Kecamatan Mimika Timur mengundang para pendatang, baik dari wilayah lain di Irian Jaya maupun propinsi lain di Indonesia. Sebagian dari mereka bekerja di Freeport,

---

<sup>95</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Op. cit.*, hlm. 15-16. *Jumlah desa dan keadaan alam di Kecamatan Mimika Timur* dapat dilihat pada tabel dalam lampiran 6.

<sup>96</sup> *Nama-nama Kantor Pemerintahan* dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 8.

<sup>97</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Op. cit.*, hlm. 18.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebagian lagi membuka usaha sendiri (wiraswasta). Usaha-usaha wiraswasta yang menjadi daya tarik Kecamatan Mimika Timur adalah perkayuan, angkutan, bangunan, penginapan, hiburan, bengkel dan peternakan.<sup>98</sup>

Penduduk asli setempat di Kecamatan Mimika Timur mayoritas beragama Kristen Protestan dan Katolik. Sedangkan para pendatang umumnya beragama Islam, mereka berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar) dan transmigran dari Jawa (Jawa dan Sunda). Untuk umat Islam tidak ada perbedaan antara satu masjid dengan masjid lainnya. Sedangkan gereja dibedakan menurut agamanya, yaitu gereja Katolik, Protestan, Kingmi dan Pantekosta. Orang Kamoro dan Amungme pada umumnya beragama Katolik dan Kingmi, sedangkan yang beragama Protestan dan Pantekosta kebanyakan adalah pendatang yang berasal dari Sorong, Biak, Toraja dan Minahasa. Tidak ada organisasi formal yang berlandaskan agama tetapi pertemuan keagamaan sering dilakukan oleh penduduk.<sup>99</sup>

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas juga disediakan, sebagian atas bantuan Freeport dan sebagian lainnya dari Departemen Kesehatan. Di samping itu juga dibangun fasilitas-fasilitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Sekolah-sekolah tersebut negeri dan swasta, sekolah swasta dikelola oleh yayasan Katolik dan yayasan Cendrawasih Freeport.<sup>100</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Mimika Timur mengalami peningkatan pesat pada tahun 1987 sampai tahun 1992, yaitu dari 23.152

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 22. *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama* lihat dalam tabel pada lampiran 9.

<sup>100</sup> *Jumlah Fasilitas SD* dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 10.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jiwa menjadi 34.693 jiwa. Kalau dilihat dari perkembangan penduduk kabupaten Fakfak dari tahun 1982 sampai dengan 1987, terlihat bahwa angka pertumbuhan melonjak pada tahun 1984 sampai dengan 1987. hal ini disebabkan adanya penduduk transmigran yang ditempatkan di kabupaten ini. Di samping karena banyaknya pendatang.<sup>101</sup>

Timika terus berkembang menjadi sebuah kota yang semakin modern karena aktivitas ekonomi para pendatang baru, pemerintah, Freeport sebagai sponsor utama dan kegiatan spontan penduduknya. Pada awal tahun 1996 penduduk Timika mencapai 35.000 jiwa dengan 15.000-nya terkonsentrasi di daerah pemukiman sebelah Selatan bandara Timika. Prosentase penambahan penduduk di Kabupaten Mimika 16% per tahun dan terkonsentrasi di kota Timika. Sampai dengan tahun 2003 jumlah total penduduk Kabupaten Mimika mencapai 131.715 jiwa.

Pusat Timika terdiri dari dua wilayah, yaitu Kwamki Baru di sebelah Utara dan Koperapoka di sebelah selatan dengan populasi 7.000 jiwa. Jantung kota Timika terdiri dari pasar yaitu pasar raya yang biasa disebut Pasar Swadaya Murni, pasar ini berdekatan dengan pangkalan taksi dan minibus, gedung bioskop, toko-toko kecil, bank-bank dan perkantoran yang melayani kesibukkan kegiatan perdagangan pusat kota Timika. Menurut ukurannya, Timika seperti halnya beberapa kota lain di Indonesia kecuali kegiatan perdagangan atau bisnis yang tidak didominasi oleh etnis Cina. Secara keseluruhan di kota Timika terdapat gedung-gedung sekolah,

---

<sup>101</sup> S. Budhisantoso, dkk., *Op. cit.*, hlm. 26-27. *Data Perkembangan Jumlah Penduduk* dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 7.

telekomunikasi, kantor pos, hotel, gedung bioskop, apotek, bank, masjid, gereja dan restoran. Sedangkan industri kerajinan yang berkembang di Timika tidak jauh dari material-material bangunan, seperti furniture, cetakan-cetakan beton, genteng atap dan bahan-bahan bangunan lainnya. Di samping itu juga ada toko yang menyediakan barang-barang seni dan souvenir asli buatan lokal, yaitu kerajinan orang Papua.<sup>102</sup>

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berdirinya Kota Timika

1. Faktor pendukung
  - a. Faktor ekologi

Timika adalah sebuah kota yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor ekologi, yaitu sumber daya alam yang terkandung di hampir seluruh wilayah Timika yang berupa tembaga, emas dan perak. Kekayaan sumber daya alam tersebut mendorong para investor asing yang dimotori oleh Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha pertambangan di Timika. Keberadaan perusahaan asing yang mengeksplorasi, mengeksploitasi dan memasarkan kekayaan alam Timika yang berupa tembaga, emas dan perak inilah yang memicu tumbuh dan berkembangnya Kota Timika.

---

<sup>102</sup> George A. Mealey, *Op. cit.*, hlm. 327. *Denah Kota Timika* dapat dilihat pada lampiran 15.

### b. Faktor teknologi

Faktor ekologi tersebut mendorong Freeport untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan dan sekaligus pemasarannya. Dalam kegiatan operasionalnya Freeport menggunakan hasil-hasil teknologi modern seperti alat-alat transportasi, telekomunikasi, pertambangan dan lain-lain yang memungkinkan infrastruktur di Timika semakin berkembang.

### c. Faktor politik

Adanya dukungan dari pemerintah Indonesia merupakan faktor penting bagi berlangsungnya kegiatan operasional Freeport. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berupa ijin penambangan. Dengan memiliki ijin yang tertuang dalam perjanjian Kontrak Karya, Freeport membangun berbagai prasarana dan infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional penambangannya di Papua. Salah satu infrastruktur yang dibangun Freeport adalah Kota Timika. Dukungan dari pemerintah yang berupa perjanjian Kontrak Karya merupakan jaminan bagi sahnya seluruh kegiatan operasional Freeport di Indonesia. Dengan demikian Freeport memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalankan dan mengembangkan operasional penambangannya di Indonesia khususnya di Papua. Kota Timika merupakan salah satu bentuk infrastruktur yang dibangun Freeport untuk menunjang kegiatan operasionalnya.



### d. Faktor ekonomi

Kemampuan Freeport untuk terus membangun infrastruktur yang mendukung bagi kegiatan penambangannya tentu saja ditunjang dengan ketersediaan dana atau modal yang dimiliki Freeport. Modal tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Freeport McMoRan Copper & Gold Incorporate dengan beberapa investor dari beberapa negara, seperti Australia dan Jepang. Faktor ekonomi yang mendorong Freeport mengembangkan usahanya di Timika adalah adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, baik bagi Freeport sendiri, karyawan maupun pangsa pasar internasional. Adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang dialami oleh berbagai pihak tersebut semakin menggiatkan kegiatan operasional Freeport, dan hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya Kota Timika sebagai salah satu urat nadi gerak operasional Freeport.

### 2. Faktor penghambat

#### a. Faktor geografis

Lingkungan alam wilayah Kabupaten Mimika pada umumnya berupa daratan, rawa-rawa, tebing dan pegunungan yang sulit dijangkau oleh alat transportasi dan telekomunikasi. Dengan demikian proses pembangunan Kota Timika tidak dapat berjalan dengan lancar dan cepat karena kontak dengan dunia luar atau daerah lain sulit dilakukan. Kondisi ini sangat menghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Timika.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan berbagai sarana dan fasilitas karena akses dengan dunia luar yang terbatas mengakibatkan Timika kekurangan sumber daya manusia yang berpotensi dan terdidik. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya motor penggerak sekaligus pelaku pembangunan bagi tumbuh dan berkembangnya Kota Timika.

### b. Faktor sosial

Faktor sosial yang menghambat perkembangan Kota Timika adalah konflik yang sering terjadi di wilayah Timika. Konflik tersebut sebenarnya merupakan hal biasa bagi masyarakat di kawasan Mimika. Sejarah sosial di Kabupaten ini menunjukkan bahwa konflik sosial merupakan hal yang selalu muncul dalam bentuk perang suku maupun sengketa dalam bentuk lain, terutama dengan penduduk yang dianggap pendatang. Kehadiran PTFI dapat dikatakan menjadi sumber konflik baru, karena di samping konflik-konflik lama masih mewarnai kehidupan sosial masyarakat, Freeport menambah kompleksitas konflik di daerah ini. Di samping menambah kemajemukan masyarakat, kehadiran PTFI yang merupakan perusahaan multinasional yang sangat modern peralatannya menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat di kawasan Kabupaten Mimika. Kehadiran Freeport juga menimbulkan perubahan lingkungan hidup yang berpengaruh langsung terhadap sumber mata pencaharian

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penduduk, sehingga diperlukan perubahan nilai secara signifikan agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup.<sup>103</sup>

Perubahan-perubahan yang cepat tersebut melahirkan konflik-konflik sosial yang semakin tajam. Perubahan dan konflik berjalan beriringan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Konflik-konflik tersebut dipicu oleh kehadiran Freeport yang menimbulkan dampak sosial lingkungan dan benturan dua kebudayaan di Mimika, yaitu budaya tradisional dan budaya industri modern.

Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten. Oleh karena itu, manifestasi atau perwujudan konflik melalui protes-protes dan demonstrasi, seakan mengatakan kepada publik bahwa pertentangan pemerintah dan PT FI dengan masyarakat adat Papua ini adalah perseteruan yang "abadi". Indikasi ini diperkuat dengan adanya dominasi kekuasaan atas hak-hak sipil maupun adat masyarakat setempat. Konflik ini merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) karena apa yang terlihat dan teramati publik hanyalah konflik-konflik di permukaan, sementara hakikat konflik (laten) yang lebih besar nyaris tidak mudah dideteksi.<sup>104</sup>

Sejak Juli 1996 memang ada dana 1% dari laba kotor perusahaan untuk masyarakat Timika. Layaknya dana "bancakan", dana 1 % bagi

---

<sup>103</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 99-100.

<sup>104</sup> Cecep Darmawan, *Freeport dan Kerusuhan Abepura*, Pikiran Rakyat, 21 Maret 2006.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pihak masyarakat adat menjadi sumber konflik internal diantara mereka. Dana tersebut disyalir sebagai media peredam setelah adanya kerusuhan Maret 1996. Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) awalnya menolak menerima dana tersebut. Masyarakat adat Amungme menolak semua bentuk perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat setempat selain Lemasa. Sementara masyarakat adat lain (Komoro, dll.) merasa berhak juga atas dana tersebut. Terjadilah konflik-konflik internal sebagai babak baru persoalan PT FI yang berkepanjangan. Walaupun kemudian dibentuk 7 yayasan yang mengelola dana tersebut dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan adat setempat melalui SK Gubernur Irja, konflik-konflik diantara mereka tetap saja terjadi. Intinya adalah ketidakpuasan, ketidakadilan, dan pengelolaan yang tidak profesional.

Konflik-konflik sekitar PT FI telah dimulai sejak perusahaan itu berdiri. Pada saat persiapan awal proyek PT FI sekira 1960-1973 telah terjadi konflik dengan masyarakat adat setempat berkaitan dengan pengakuan identitas dan pandangan hidup yang berhubungan dengan alam dan konsep tentang Hai (konsepsi nenek moyang mereka di alam "atas"). Di samping itu konflik pertama terjadi manakala tim ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk membawa barang-barang keperluan rombongan, tetapi pada akhirnya tidak dibayar. Kekecewaan dan merasa ditipu merupakan awal dari konflik ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Konflik berikutnya yang dikenal dengan konflik *January Agreement* yang dibuat tahun 1974. Isinya menyangkut kesepakatan antara PTFI dengan masyarakat suku Amungme dalam kaitan pematokan lahan penambangan dan batas tanah milik PT FI dengan masyarakat adat setempat. Namun pada kenyataannya, diduga PT FI telah mengambil tanah adat jauh di luar batas yang telah disepakati. Masyarakat adat semakin tergeser dan menjadi kaum pinggiran (*peripheral* saja). Konflik-konflik berkaitan dengan *January Agreement* terus saja berlanjut sampai pembentukan Lemasa tahun 1992.

Konflik lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah. Lemasa yang dikomandoi oleh Tom Beanal kemudian mengadakan musyawarah adat Lemasa (7-13 Desember 1998) yang menghasilkan 4 resolusi yang berisi tentang resolusi SDA, HAM, gugatan terhadap PTFI dan meminta dialog nasional. Lemasa memang diyakini telah berubah dari gerakan sosial mejadi gerakan politik. Tahun 2003 terjadi kerusuhan di Timika, penyebab awal kerusuhan tersebut, bermula dari adanya peresmian Provinsi baru. Kemudian kematian orang AS di Timika juga memperpanjang daftar masalah PT FI ini.<sup>105</sup> Konflik-konflik yang sering terjadi di kawasan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan Kota Timika sebagai salah satu produk dari kehadiran Freeport.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**PENGARUH PT. FREEPORT INDONESIA**  
**TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DI SEKITARNYA**  
**DAN MASYARAKAT KOTA TIMIKA**

**A. Pengaruh PT. Freeport Indonesia Terhadap Lingkungan Fisik di Sekitarnya**

Sebagaimana kegiatan manusia lain, operasional PTFI mengandung aspek-aspek yang membawa dampak terhadap lingkungan hidup. Aspek-aspek tersebut berupa kegiatan, produk atau pelayanan yang dapat berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Dampak-dampak lingkungan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup karena kegiatan, produk atau pelayanan PTFI. Oleh karena itu PTFI mempunyai komitmen untuk meminimalkan dampak dari kegiatan operasi penambangannya, untuk mereklamasikan dan menanam kembali areal yang terkena dampak. PTFI mempunyai komitmen untuk melindungi lingkungannya dan melestarikan keseimbangan alam di daerah operasinya.<sup>106</sup>

Untuk mewujudkan komitmennya, PTFI melaksanakan audit tahunan terhadap pengelolaan lingkungan dan sistem pemantauannya serta secara sukarela melakukan audit lingkungan eksternal setiap tiga tahun dan secara terbuka mengumumkan hasil-hasilnya. Produk-produk dari operasional PTFI yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup diantaranya berupa *overburden*, *aliran batuan asam*, *tailing* dan *limbah bukan hasil proses tambang*.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> *Profil Ringkas PT. Freeport Indonesia*, Timika, PTFI, 2000.

<sup>107</sup> *PTFI General Induction*, hlm. 40.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Overburden* adalah lapisan penutup yang membungkus kandungan bijih tambang yang hanya mengandung logam bernilai kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Operasional penambangan PTFI di Grasberg menangani antara 500.000-800.000 ton overburden setiap harinya. Overburden menimbulkan aliran batuan asam yang berakibat buruk terhadap mata air. Untuk menimbun overburden dibutuhkan tempat-tempat yang sangat luas dan penimbunannya berpotensi menyebabkan tanah longsor apabila ditempatkan di lereng yang tidak stabil. Oleh karena itu dalam pengelolaan overburden PTFI sangat berhati-hati dengan mengontrol dan meminimalkan produksi aliran batuan asam serta memantau stabilitas lereng-lereng timbunan.

*Aliran Asam Batuan (Acid Rock Drainage)* dihasilkan bila bahan sulfida di dalam overburden terkena air dan udara sehingga membentuk asam dan melarutkan logam-logam yang terkandung di dalamnya. Larutan asam ini dapat keluar dari timbunan overburden. ARD membawa dampak terhadap air permukaan dan air bawah tanah. Dalam pengelolaannya ARD dikontrol dengan menaikkan tingkat pH-nya sampai ke tingkat netral sebelum dialirkan bebas. Aliran batuan asam juga diolah di Instalasi Pemrosesan ARD yang berada di Mile Post 74 PTFI untuk memperoleh kandungan larutan tembaga yang ada.

*Tailing* adalah batuan sisa proses pengapungan logam-logam yang berharga dari proses pengkonsentrasian di tempat penggilingan. Dari 250 ribu ton bijih yang dikirim ke tempat penggilingan setiap harinya hanya tiga persen-nya yang mengandung tembaga dan emas, sisanya adalah tailing.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kadar kandungan benda padat yang tinggi dalam tailing dan jumlah yang besar mengakibatkan berkelok-keloknya aliran sungai di wilayah pengendapan. Tailing juga mengganggu kehidupan di perairan karena bahan-bahan padatnya. Seperti telah disetujui oleh pemerintah, tailing hasil operasional PTFI dialirkan ke sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa menuju ke daerah endapan yang disebut Area Pengendapan Ajkwa (ADA).

Untuk mencegah melubernya tailing dari tempat yang telah ditentukan, PTFI membangun Tanggul Timur (*East Levee*) dan Tanggul Barat (*West Levee*) di sepanjang sungai Ajkwa sehingga tailing tersebut mengendap tanpa mempengaruhi tempat-tempat lainnya. Tanggul-tanggul tersebut dibangun kuat agar dapat bertahan lama untuk meminimalisasi dampak yang muncul pada ekosistem hutan dan muara sungai. Proyek Pengelolaan Sungai Tailing (TRMP) memantau tailing untuk mengetahui proses pengendapannya di ADA. Environmental Department mereklamasi dan merehabilitasi wilayah-wilayah yang telah stabil karena endapan tailing telah mengeras. Apabila memungkinkan, Environmental Development menjadikan wilayah tailing sebagai lahan pertanian dan melakukan penanaman tumbuhan produksi.<sup>108</sup>

Limbah yang tidak dihasilkan dari proses tambang (*non-process waste*) adalah limbah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan pendukung seperti perumahan, kantor, rumah sakit dan aula makan. PTFI merupakan sebuah proyek penambangan dan penggilingan yang sangat besar yang didukung oleh berbagai fasilitas dengan populasi kira-kira 20.000 jiwa di dua

---

<sup>108</sup> Gambar *Daerah Pembuangan Tailing Sungai Aijwa dan Daerah Pengolahan Tailing* dapat dilihat pada lampiran 23.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kota yaitu Kuala Kencana dan Tembagapura serta empat tempat kediaman yaitu Portsite Camp, Timika Base Camp, Mile 38 Camp dan Ridge Camp. Di antara fasilitas-fasilitas pendukung tersebut juga terdapat bengkel-bengkel perawatan untuk melayani ribuan kendaraan ringan, alat berat dan truk angkut (*haul truck*), pergudangan, tiga pusat perbelanjaan, restoran, klinik dan sebuah rumah sakit. Area-area tempat tinggal dan berbagai fasilitas tersebut menghasilkan limbah cair yang sebagian besar adalah limbah rumah tangga dan limbah padat atau sampah. Laboratorium-laboratorium yang berada di Timika, Tembagapura dan area penggilingan juga menghasilkan limbah yang dikategorikan sebagai bahan-bahan berbahaya.

Limbah-limbah tersebut bila tidak dikelola secara benar berpotensi menyebabkan masalah-masalah kesehatan dan mempengaruhi sumber-sumber daya alam yang ada, baik air tanah maupun tanah itu sendiri. Melalui mitra privatisasinya PT. TDS (*Tata Disantara Townsite Services*), PTFI mengoperasikan sejumlah sistem penampungan limbah dan Instalasi Pengolahan Limbah (*Sewage Treatment Plants*) secara biologis yang berlokasi dari Portsite sampai ke area tambang. Setiap STP dirancang untuk meminimalisasi resiko-resiko lingkungan dan bahaya terhadap manusia yang telah memenuhi standar pengolahan limbah Pemerintah Indonesia.

PTFI juga menggunakan produk bahan bakar dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan penggilingan, sehingga itu muncul resiko tertumpahnya bahan bakar tersebut dari pipa-pipa saluran dan tangki-tangki penampungannya. Di samping itu juga dapat muncul resiko tumpahan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

konsentrat dari pipa-pipa dan tangki saluran serta tumpahan reagen kimia berbahaya dari tempat penggilingan. Tumpahan bahan bakar, konsentrat dan bahan kimia dapat merusak lingkungan dan menyebabkan gangguan terhadap air dan tanah. Oleh karena itu PTFI merancang pipa-pipa saluran dengan pertimbangan langkah-langkah pencegahan seperti kolam tumpahan (*dump pond*), katup periksa (*check valve*), tekanan, katup-katup isolasi, perlindungan katodik dan program pemantauan ketebalan dinding.<sup>109</sup>

Aspek-aspek dan dampak-dampak lingkungan PTFI dikontrol dan dikelola melalui Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Environmental Department, yang merupakan sistem pengelolaan secara menyeluruh. SML telah memiliki sertifikasi standar ISO 14001. SML PTFI dirancang untuk mencapai target-target pengelolaan lingkungan yang efektif. Jantung dari SML PTFI adalah Pernyataan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy Statement) yang ditulis oleh Manajemen dan disetujui oleh General Manajer PTFI. SML merangkum seluruh persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi standar ISO 14001.<sup>110</sup>

Pernyataan Kebijakan Lingkungan PTFI berfungsi sebagai pijakan bagi SML PTFI dan secara garis besar menyatakan tujuan serta prinsip-prinsip PTFI dalam hubungannya dengan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Pernyataan Kebijakan Lingkungan PTFI memberikan kerangka tindakan dan menyatakan tujuan-tujuan serta target-target lingkungan PTFI. Pernyataan Kebijakan Lingkungan menyatakan komitmen PTFI untuk:

---

<sup>109</sup> Gambar Proses Operasi Penambangan sampai ke Pelabuhan Pengapalan Freeport dapat dilihat pada lampiran 22.

<sup>110</sup> PTFI General Induction, hlm. 42.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan lingkungan hidup.
2. Meminimalisasi dampak-dampak lingkungan atau mencegah polusi.
3. Secara terus-menerus memperbaiki kinerja lingkungannya.
4. Memasukkan aspek-aspek lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, perancangan dan pengoperasian.
5. Memastikan dikomunikasikannya kebijakan tersebut secara luas.
6. Bekerjasama dengan masyarakat-masyarakat sekitar dengan rasa saling menghormati.<sup>111</sup>

Bila dikaji lebih dalam, kehadiran PT. Freeport Indonesia di bumi Papua sesungguhnya lebih memberikan dampak negatif bagi lingkungan alam sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai pencemaran air dan tanah yang merusak ekosistem alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan satwa di sekitarnya. Wilayah operasi Freeport berada di sekitar dan di dalam lingkungan Cagar Alam Lorentz yang menjadi taman nasional dan merupakan salah satu dari wilayah alamiah terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu sebarang apapun besarnya usaha yang dilakukan Freeport untuk meminimalisasi dampak operasi penambangannya terhadap lingkungan sekitar namun tidak mampu mengembalikan kondisi alam yang penuh potensi dan alami.

Kehancuran lingkungan dalam skala masif merupakan akibat fatal dari operasi penambangan Freeport terutama disebabkan oleh aktifitas-aktifitas penambangan bijih, penimbunan batuan limbah, dan pengolahan bijih serta

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembuangan pasir atau lumpur sisa (*tailing*). Penggalian gunung Grasberg menyebabkan perubahan bentang alam secara signifikan. Gunung Grasberg pada masa akhir penambangan akan merupakan lubang raksasa menganga dengan diameter sekitar 2,5 km dengan kedalaman 700 m. Penggalian gunung Grasberg juga menyebabkan hilangnya vegetasi-vegetasi asli dan hewan yang hidup di sana. Operasi penambangan dan penimbunan batuan limbah juga dapat merubah hidrologi air permukaan dan air tanah, baik terhadap pola aliran permukaan, laju aliran serta tinggi muka air tanah. Penggalian yang dilakukan untuk mendapatkan bijih mengakibatkan terpotongnya jalur aliran permukaan maupun aliran tanah yang mengakibatkan perubahan pola tersebut.<sup>112</sup>

Operasi pertambangan Freeport yang dimulai sejak tahun 1972 terbukti telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Kerusakan-kerusakan yang paling parah antara lain adalah:

1. Berubahnya bentang alam akibat pembongkaran lahan, seperti Gunung Grasberg yang akan berubah menjadi lubang raksasa dan Danau Wanagon, danau suci masyarakat Amungme akan menjadi bukit limbah yang sangat asam.
2. Tercemarnya ekosistem akibat air asam tambang yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan jika masuk dalam rantai makanan makhluk hidup.
3. Rusaknya tiga badan sungai utama dari hulu hingga hilir di wilayah Timika, yaitu Sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa sebagai tempat

---

<sup>112</sup> Amiruddin Al Rahab, *Op. cit.*, hlm. 199-201.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembuangan tailing. Kerusakan sungai-sungai tersebut secara otomatis mematikan kehidupan di dalam sungai serta flora fauna yang sangat bergantung pada sungai tersebut.

4. Sungai yang menjadi korban pembuangan tailing merambah ke sungai lainnya di sebelah Timur Sungai Ajkwa, yaitu Sungai Kopi dan Minajerwi. Dampak pembuangan tailing juga berpengaruh sampai ke wilayah pesisir dan laut di perairan Timika.<sup>113</sup>

Di samping itu, akibat kelalaian operasi PTFI telah menimbulkan bencana terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Misalnya dengan jebolnya Danau Wanagon akibat pembuangan limbah batuan dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan daya dukungnya dan meluapnya Sungai Ajkwa, Kopi dan Minajerwi karena tidak mampu menampung tailing yang begitu banyak.

### **B. Pengaruh PT. Freeport Indonesia Terhadap Masyarakat Kota Timika**

Sejak awal berdirinya PTFI mempunyai beberapa komitmen untuk ikut membangun kehidupan masyarakat sekitar bagi kehidupan yang lebih baik sekaligus meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasi penambangannya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadiran PTFI sebagai suatu perusahaan tambang kelas dunia yang beroperasi di Papua membawa

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Tumbuh dan berkembangnya Kota Timika adalah salah satu bukti nyata pengaruh keberadaan PTFI dalam bentuk tata ruang lingkungan, ekonomi, sosial dan pemerintahan di Papua. Sementara itu, keberadaan PTFI juga memberikan sumbangan dalam skala nasional di bidang ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Timika. Timika adalah Ibukota Kabupaten Mimika sekaligus Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah, jadi Timika merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Dengan demikian Mimika dapat sama dengan Timika karena Timika merupakan bagian atau berada di dalam Mimika, tetapi Timika belum tentu atau tidak sama dengan Mimika karena Timika adalah bagian dari wilayah Mimika.

Sumbangan PTFI di bidang ekonomi yang berskala nasional tersebut antara lain:

1. Masuknya investor asing ke Irian Jaya/Indonesia

Kehadiran PTFI terutama setelah ditemukan cadangan bijih Grasberg, memberi pengaruh besar terhadap investor untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan. Minat berinvestasi khusus bagi Propinsi Irian Jaya meningkat karena mereka dapat belajar dari pengalaman Freeport dari segi-segi teknis pertambangan maupun non teknis seperti program pengembangan masyarakat. Di samping itu juga karena telah tersedia infrastruktur umum

dan ekonomi yang lebih lengkap, khususnya di Kabupaten Mimika. Kehadiran investor-investor pertambangan tersebut dapat membuka isolasi daerah dan pembangunan infrastruktur baru.<sup>114</sup>

### 2. Perkembangan sektor swasta nasional

Sektor swasta nasional, baik berskala besar, menengah maupun kecil berkembang cukup pesat di Mimika. Hal ini berkaitan dengan kebijakan privatisasi dan pemberdayaan dunia usaha nasional dimana kebutuhan-kebutuhan PTFI telah dialihkan dan dikontrakkan kepada perusahaan swasta nasional. Sampai saat ini ada sedikitnya 22 perusahaan yang menjadi rekanan PTFI yang menyediakan berbagai macam jasa, baik langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan pertambangan PTFI sebagai bisnis utama (*core-business*).<sup>115</sup>

### 3. Perkembangan ekonomi kerakyatan

Pengaruh positif yang dapat dirasakan atas kehadiran PTFI adalah berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat, baik dari luar maupun penduduk asli Papua. Dari keadaan masyarakat meramu atau yang baru mengenal ekonomi pasar pada tahap yang sangat sederhana, kini berkembang semangat kewirausahaan di kalangan penduduk setempat. Secara khusus PTFI membina kewirausahaan putra daerah melalui Program Inkubator bisnis yang menekuni usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, jasa angkutan, industri

---

<sup>114</sup> August Kafiari, *PT. Freeport Indonesia dan masyarakat Adat Suku Amungme*, Timika, Forum Lorentz, 2000, hlm. 55-56. Bandingkan: Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua* (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2003).

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 56-58.

bahan bangunan (bata tela, batu pasir dan kayu olahan) serta usaha pertamanan dan seni ukir.<sup>116</sup>

#### 4. KAPET Biak-Mimika

Berdasarkan Keppres No. 90 Tahun 1996, telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak-Mimika sebagai bagian dari sistem pengembangan ekonomi kewilayahan secara terpadu. Penentuan Kabupaten Mimika di bagian Selatan Irian juga sebagai pendukung KAPET Biak, memberi kesan kuat pengakuan pemerintah atas peranan yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan ini dalam memacu perkembangan ekonomi nasional, terutama di Propinsi Irian Jaya.<sup>117</sup>

Di samping manfaat yang diberikan PTFI melalui berbagai kegiatan di atas, masih banyak usaha-usaha lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik sebagai kompensasi atas dampak negatif pertambangan maupun program-program yang sejak awal dicanangkan. Motivasi pencanangan program-program PTFI didorong oleh beberapa kepentingan seperti: kepentingan PTFI sendiri agar kelangsungan usahanya berlanjut, kepentingan pemerintah pusat dan regional serta kepentingan masyarakat setempat.<sup>118</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi PTFI terhadap perekonomian nasional sangat besar, yang berasal dari berbagai macam pajak yang dibayarkan, royalti, deviden dan kemampuannya menyediakan lapangan kerja. Sementara itu PTFI juga

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

<sup>117</sup> *Loc. cit.*

<sup>118</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 69.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membangun berbagai prasarana fisik berupa: pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan raya, fasilitas air minum, listrik, telekomunikasi dan lain-lain yang merupakan aset pembangunan lokal.

Di samping itu, PTFI secara khusus menyediakan dana bagi masyarakat setempat yang disebut *Freeport Fund for Irian Jaya Development* (FFIJD). Dana ini disalurkan melalui lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat) lembaga-lembaga adat, melalui pemerintah maupun dikelola langsung oleh Freeport.<sup>119</sup>

Program-program khusus yang ditujukan bagi masyarakat Irian Jaya cukup banyak dengan sasaran masyarakat di pedesaan. Dari dana FFIJD sebesar 1% (dari keuntungan kotor) ditambah dengan sumber-sumber lain, beberapa program yang sudah atau sedang dilaksanakan antara lain:

### 1. Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2)

Program ini dicanangkan sejak tahun 1996, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung proyek Freeport. PWT2 dikelola oleh yayasan-yayasan yang didasarkan pada etnisitas masyarakat Mimika dan sekitarnya. Ada delapan yayasan yang mewakili tujuh suku, yaitu Amungme, Kamoro, Damal, Dani, Moni, Nduga dan Ekagi. Jenis-jenis proyek lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik (perumahan) tersebut mengalami kegagalan karena kemampuan manajerial proyek (yayasan) sangat terbatas.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>120</sup> *Loc. cit.*, Bandingkan: August Kafiari, *PT. Freeport Indonesia dan masyarakat Adat Suku Amungme* (Timika: Forum Lorentz, 2000).

### 2. Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM)

LPM dibentuk pada akhir tahun 1998. LPM mengelola dana FFIJD dengan pendekatan wilayah. Melalui surat kesepakatan (*memorandum of understanding*) antara PTFI, pemerintah dan LPM-Irja, kewenangan penuh untuk mengelola dana FFIJD secara mandiri diberikan kepada LPM-Irja. Pengelolaan dana model ini pun mengalami banyak masalah yang menjadi penyebab konflik dalam masyarakat.<sup>121</sup>

### 3. Program Rekognisi

PTFI mengakui adanya hubungan yang khusus antara masyarakat setempat dengan tanah tumpah darah mereka. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PTFI melaksanakan program rekognisi dalam bentuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi umum kepada masyarakat lokal atas penggunaan sementara tanah mereka. Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang tanahnya terkena limbah industri, yaitu tailing yang menghancurkan tanaman yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Amungme dan Kamoro. Program ini terutama diarahkan pada suku Amungme dan Kamoro dengan membangun sarana fisik berupa perkampungan baru beserta prasarana umum lainnya seperti jalan, jembatan, sumur dan tangki air. Pembangunannya melibatkan masyarakat setempat sebagai

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

upaya pembelajaran masyarakat dengan bimbingan dan pembinaan dari kontraktor yang memenuhi syarat.<sup>122</sup>

#### 4. Community Lesson Office (CLO)

CLO adalah bagian dari program rekognisi yang dikelola langsung oleh Freeport sebagai upaya mengetahui kebutuhan-kebutuhan nyata di masyarakat. Di dalam struktur CLO terdapat manajer senior, asisten manajer dan village lesson officer (VLO). Jabatan pertama dan kedua dipegang oleh staf Freeport dari Divisi Community Development, sedangkan VLO dipegang oleh tokoh-tokoh masyarakat atau kepala desa baik dari kalangan suku Kamoro maupun Amungme. CLO adalah petugas penghubung masyarakat yang mensosialisasikan program-program perusahaan di desa-desa, menerima umpan balik dan pertanyaan, menengahi konflik-konflik yang menyangkut isu-isu perusahaan dan memberikan informasi mengenai operasi dan dampak perusahaan. CLO juga membantu komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat dengan mengadakan pertemuan bersama secara rutin untuk bertukar pikiran dan meningkatkan hubungan.<sup>123</sup>

Kehadiran PTFI di samping membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar di bidang ekonomi juga membawa dampak positif di bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya. Di bidang kesehatan masyarakat setempat terutama dari tujuh suku (Amungme, Kamoro, Damal,

---

<sup>122</sup> *Loc. cit.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dani, Ekari, Moni, Nduga) dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang dibangun dengan menggunakan dana FFIJD. PTFI melaksanakan berbagai kegiatan dalam program kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan dukungan dan pelatihan bagi Posyandu, imunisasi, perawatan menjelang persalinan dan pengendalian penyakit Tuberculucis (TBC) serta penyakit menular seksual (penyakit kelamin). PTFI juga bekerjasama dengan Puskesmas pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat-inap dan rawat-jalan bagi masyarakat setempat. Di samping itu Departemen Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Malaria (*Public Health & Malaria Control*) PTFI memberikan obat-obat untuk pencegahan dan perawatan awal penyakit, berkunjung ke rumah-rumah secara rutin memeriksa mereka yang mengidap malaria, bekerjasama dengan penduduk dalam upaya membasmi sarang-sarang nyamuk dengan memakai cara-cara yang ramah lingkungan dan memberikan pengobatan secara langsung.<sup>124</sup>

Di bidang pendidikan PTFI melaksanakan program-program yang mendukung bagi terciptanya generasi-generasi muda asli Papua yang cerdas, berkualitas dan siap kerja, diantaranya dengan:

1. Memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada para pelajar dan mahasiswa Papua.
2. Melalui Yayasan Pendidikan Tuarek membeli seragam sekolah, membayar uang sekolah, menyewa kamar dan asrama bagi para pelajar

---

<sup>124</sup> *Komitmen Untuk Masyarakat Papua*, Timika: PT. Freeport Indonesia, 2000, hlm. 3.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya dengan menggunakan dana FFIJD.

3. Menerima anak-anak dari suku-suku setempat untuk belajar di sekolah perusahaan, menyediakan guru-guru khusus, serta menampung mereka dalam asrama di Tembagapura dan Kuala Kencana.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan praktis bagi penduduk lokal, baik bagi mereka yang akan mencari pekerjaan maupun mereka yang sudah diterima sebagai karyawan perusahaan. Program ini didukung dengan dibukanya sebuah Pusat Pengembangan Ketrampilan Dasar yang dibangun oleh PTFI.<sup>125</sup>

Selain itu PTFI juga memberikan prioritas bagi penduduk setempat yang ingin bekerja di perusahaan ini bahkan dalam manajemen perusahaan paling tinggi pun ditempati oleh penduduk lokal. Para karyawan putera daerah Papua selain mendapat perawatan kesehatan, perumahan, makanan dan manfaat-manfaat lain yang diberikan secara langsung oleh perusahaan juga memperoleh program-program lain yang menjamin adanya keadilan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya setempat.<sup>126</sup>

Di bidang sosial dan budaya PTFI mendorong manajemen dan karyawan untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang masyarakat asli, sejarah dan lingkungan mereka yang berubah. PTFI berupaya untuk peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang-orang Papua untuk melestarikan kebudayaan mereka yang unik karena adanya pengaruh perkembangan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>126</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kebudayaan yang modern. Oleh karena itu perusahaan mendukung program-program kebudayaan, seperti Festival Seni dan Budaya Asmat, sejumlah kegiatan dan perayaan budaya masyarakat pegunungan dan membantu penyelenggaraan program tahunan Festival Seni dan Budaya Kamoro di Timika. Para konsultan PTFI bekerjasama dengan para ahli kebudayaan dan lingkungan merancang program-program eko-wisata di beberapa desa sekitar serta memberi kesempatan kepada para karyawan Freeport dan juga wisatawan untuk menyaksikan dan menghayati keunikan budaya, tradisi-tradisi dan keberlimpahan sumber alam daerah setempat.<sup>127</sup>

Di sisi lain, secara kultural pertemuan dua kebudayaan yang sangat kontras di wilayah Mimika juga menjadi sumber konflik. Pada satu sisi ada masyarakat asli yang sangat tradisional, pada sisi lain ada Freeport dengan budaya industri modern. Budaya industri modern inilah yang lebih dominan sehingga masyarakat yang terdominasi merasa putus asa dan tersingkir dalam menghadapi perubahan yang berada di luar jangkauannya.<sup>128</sup> Sementara itu kebijakan PTFI yang dianggap kurang pas di mata penduduk asli merupakan penyebab konflik yang berkepanjangan antara PTFI dengan masyarakat Papua. Cara berpikir mereka yang sangat berbeda menyebabkan terjadinya benturan kebudayaan. PTFI merupakan perwujudan budaya modern yang mempunyai ciri-ciri:

1. Orientasi budaya ke masa depan.
2. Menilai tinggi ilmu dan teknologi.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>128</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 89.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Menghargai kreativitas dan perubahan.
4. Sistem kontrol yang kuat melalui supremasi hukum.
5. Menempatkan alam sebagai hal yang terpisah dengan manusia.

Sedangkan masyarakat tradisional pada umumnya sebagai penerima budaya modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Orientasi budaya pada harmoni sosial yang sedang berlangsung atau yang sudah dijalani secara turun-temurun.
2. Unsur rasa lebih kuat dari pada rasio.
3. Bertahan terhadap perubahan sosial.
4. Hukum negara dan kebudayaan masyarakat berbeda.
5. Menempatkan alam sebagai satu kesatuan dengan manusia (monisme).<sup>129</sup>

Cara berpikir yang berbeda menghasilkan budaya yang berbeda pula. PTFI adalah produk budaya modern yang menghasilkan budaya perusahaan (*corporate culture*), sedangkan masyarakat sekitarnya adalah pelaku dan pencipta budaya tradisional bersumber dari masyarakat primordial. Ikatan mereka dengan alam, suku dan adat-istiadat sangat kuat. Kehadiran budaya modern di tengah-tengah masyarakat tradisional menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat setempat, baik yang bersumber dari kebijakan perusahaan maupun yang bersumber dari internal masyarakat. Faktor kepercayaan dan perasaan tidak berdaya membuat masyarakat adat tidak berani masuk dalam pusaran perubahan yang terus-menerus digerakkan oleh PTFI bersama dengan ekses-eksesnya. Masyarakat asli belum siap menerima

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, Hal. 118-119.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perubahan apalagi dalam ritme yang demikian cepat karena dibawa oleh perusahaan raksasa yang bertaraf internasional. Ketidakmampuan mereka memposisikan diri secara tepat di tengah-tengah perubahan itu menimbulkan gerakan yang tidak terarah. Mereka membentuk lembaga swadaya atas dasar kesukuan dan menuntut persamaan hak pekerjaan diperusahaan tetapi sulit diajak mengembangkan kemampuan diri melalui pendidikan maupun latihan-latihan keterampilan yang disediakan oleh PTFI, pemerintah dan LSM. Sedangkan komitmen sosial yang tertuang dalam berbagai kebijakan belum mampu memuaskan tuntutan masyarakat setempat, sehingga konflik terus berlanjut.<sup>130</sup>

Dampak lain dari kehadiran PTFI adalah bertambah majemuknya masyarakat Mimika karena perusahaan banyak mendatangkan pekerja dari luar Mimika dan Irian Jaya. Perkembangan wilayah yang pesat karena kehadiran Freeport juga menarik pendatang lebih banyak lagi ke Mimika. Dengan demikian potensi konflik di daerah ini semakin besar, baik dalam bentuk perang suku maupun sengketa dalam bentuk lain terutama dengan penduduk yang dianggap “pendatang”. Dalam hubungannya dengan pendatang, dampak yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap sikap penduduk asli pada Freeport dan pegawai-pegawainya adalah adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Masyarakat asli yang belum memperoleh kesempatan memiliki rumah yang disediakan PTFI secara fisik sangat kontras penampilannya. Apalagi bila dibandingkan dengan kehidupan

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 119-125.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

di Kuala Kencana dan Tembagapura yang merupakan duplikasi kota modern di Amerika Serikat. Kesenjangan sosial dari segi penampilan fisik maupun pendapatan terjadi baik antara penduduk asli dengan pegawai PTFI maupun dengan pendatang pada umumnya, karena tenaga kerja yang terserap ke PTFI dari penduduk asli baru 1.376 orang dari keseluruhan karyawan Freeport 17.000 orang atau kurang dari 10%.<sup>131</sup>

Pesatnya pertumbuhan Timika yang dipacu oleh PTFI dan migrasi pada umumnya, melahirkan suatu masyarakat yang kompleks menurut ukuran kesukuan, pekerjaan, agama dan kelas-kelas ekonomi. Masalahnya, di tengah masyarakat yang kompleks dan perubahan yang cepat itu tidak ada satupun lembaga sosial yang stabil kecuali Freeport. Bahkan pemerintah daerah nampak tidak berdaya memandu dan menanggulangi arah perubahan dan eksekusi perubahan yang sedang berlangsung. Dapat dikatakan bahwa PTFI merupakan roda penggerak sekaligus lambang perubahan, mewakili suatu dunia baru yang begitu asing dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi penduduk di sekitarnya, Freeport nampak sangat berkuasa sehingga orang cenderung menjauhkan diri darinya atau tetap mengikutinya sambil protes. Freeport beroperasi dengan suatu pola kerja dan pada tingkat pengambilan keputusan yang sama sekali di luar jangkauan dan di luar daya tangkap penduduk asli yang merasa diri “tuan rumah” dan pemilik tanah. Dengan kehidupan statis yang sudah dijalannya secara turun temurun, tentu sangat

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sulit bagi mereka untuk menempatkan diri di tengah-tengah perubahan yang sangat pesat akibat proses industrialisasi yang dimanifestasikan oleh Freeport.

Proses industrialisasi di manapun selalu menjadi pendorong perubahan sosial, di mana ada pihak-pihak yang menerima setengah hati, ada pula yang menolak. Bahkan dampak sosial berupa perubahan-perubahan fisik maupun struktur sosial ditanggapi oleh masyarakat asli di kawasan Mimika dengan rasa putus asa karena ketidakmampuannya mengikuti perputaran roda industrialisasi sehingga timbul konflik yang berkepanjangan.<sup>132</sup> Sementara itu di lain pihak berbagai dampak lingkungan fisik yang ditimbulkan oleh PTFI juga menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar karena perubahan lingkungan fisik yang terjadi mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh UGM dan PTFI pada tahun 1999 berhasil mengidentifikasi dampak sosial PTFI terhadap masyarakat Nawaripi dan Tipuka sebagai berikut:

1. Akses beberapa sub-suku Nawaripi (*taparu*) ke hutan sagu terhalang sehingga mereka kehilangan sumber makanan. Sedangkan untuk berganti mata pencaharian mereka sangat sulit karena terbatasnya keterampilan dan wawasan.
2. Ketergantungan terhadap alam bergeser ke arah ketergantungan terhadap PTFI. Ketergantungan kepada orang luar bagi orang Kamoro merupakan perubahan sosial yang cukup signifikan karena secara tradisional mereka

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

adalah orang-orang bebas yang pada dasarnya mampu menentukan dan melaksanakan sendiri apa yang diinginkan.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Kamoro karena pengaruh alam yang bergeser ke arah ketergantungan kepada pihak luar menyebabkan jatidiri orang Kamoro Nawaripi menjadi luntur. Nilai-nilai spiritual yang berpengaruh sangat besar terhadap hakekat keberadaan mereka sebagai manusia sangat terpengaruh oleh perubahan-perubahan fisik di lingkungan mereka. Identitasnya sebagai komunitas Kamoro yang menyatu dengan alam menghilang karena pemukimannya dipindah dari lokasi asal secara tersebar.
4. Pemindahan lokasi mukim yang dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda hingga berdirinya Freeport mengakibatkan perubahan ikatan sosial masyarakat Kamoro yang ditunjukkan dengan semakin longgarnya ikatan solidaritas antar taparu. Hilangnya tanah ulayat karena tertimbun tailing juga memperlemah peran lembaga sosial taparu yang berfungsi sebagai penjaga teritorial atau wilayah ulayat.<sup>133</sup>

Dampak sosial PTFI terhadap masyarakat Amungme nampaknya lebih mendalam dibanding masyarakat Kamoro, meskipun keduanya mempunyai dasar filsafat alam yang sama yaitu menganggap adanya kesatuan antara alam manusia dengan alam semesta (lingkungan fisik). Hal ini disebabkan, kerusakan alam akibat penambangan bagi suku Amungme ada di puncak gunung yang merupakan tempat pemujaan, tempat suci dan tempat arwah

---

<sup>133</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 91-96.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

leluhur orang Amungme. Puncak gunung juga merupakan lambang kepala ibu, bagian dari tubuh manusia yang sangat dihormati atau lambang martabat kemanusiaan. Kini tempat itu sudah dihancurkan orang tanpa permisi, tanpa minta ijin atau berunding dulu dengan pemiliknya. Sikap itulah yang dianggap melukai hati orang Amungme. Mereka menganggap bahwa pihak Freeport tidak menghargai hak-hak orang Amungme dan tidak menempatkan mereka “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Air sungai yang bercampur dengan tailing juga membuat mereka bertambah sedih, karena dulu airnya jernih, sebagai lambang air mata ibu yang dipancarkan dari puncak gunung.

Itulah gambaran kesedihan orang Amungme atas kerusakan lingkungan tanah ulayat mereka yang bukan sekedar mempengaruhi kehidupan dari segi ekonomi tetapi menyangkut dunia batin orang Amungme. Memang dari segi ekonomi, mereka sudah mengenal cara bercocok tanam secara menetap pada lereng-lereng gunung. Dengan adanya akses jalan yang dibangun PTFI mereka dapat memasarkan hasil bumi ke kota. Rumah-rumah dan sarana pendidikan cukup lengkap, beberapa diantaranya dapat bekerja di PTFI. Pemukiman orang Amungme di Kwamki Lama cukup memadai yang dibangun dengan dana rekognisi dari PTFI. Meskipun demikian luka hati nampaknya belum terobati, sehingga protes-protes yang paling gencar dilakukan oleh suku Amungme sejak awal PTFI beroperasi sampai sekarang.

Sementara itu, suku Kamoro nampak lebih kompromistis meskipun secara ekonomi kehidupan mereka lebih banyak terganggu namun karena dunia spiritualnya tidak terlukai. Kalaupun ada luka hati tidak separah orang

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Amungme, karena lebih menyangkut aspek kehidupan ekonomi, bukan religi. Hal yang sama-sama dialami adalah, adanya pergeseran adat-istiadat dan banyak menyesuaikan dengan kehidupan modern. Sebagian dari mereka sudah menyadari akan arti pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk mengejar kemajuan bagi generasi baru, meskipun kedisiplinan bersekolah belum dihayati benar oleh sebagian orang tua maupun anak-anaknya.<sup>134</sup>

Bila ditinjau dari sektor ekonomi, nampaknya kehadiran Freeport memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sektor ekonomi nasional khususnya masyarakat sekitar. Namun hal ini perlu ditinjau lebih dalam lagi, apakah kehadiran Freeport sungguh memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan membawa pada kemajuan-kemajuan hidup yang lebih berarti atau malah sebaliknya dimana kekayaan alam negara semakin dikuras habis dan manfaatnya lebih dinikmati orang asing dari pada masyarakat sekitar.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

## BAB IV PERKEMBANGAN TIMIKA TAHUN 1960-2001

### A. Perkembangan Timika di Berbagai Bidang

#### 1. Kondisi umum

##### a. Letak geografis dan batas wilayah

Luas Kabupaten Mimika adalah 21.522 Km<sup>2</sup> yang secara astronomi terletak pada 134,45°-137,45° BT dan 400°-510° LS. Bagian Utara berbatasan dengan pegunungan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, bagian selatan dengan Laut Arafuru, bagian barat dengan Kabupaten Fakfak dan bagian Timur dengan Kabupaten Merauke. Daerah ini memiliki lima kelas kemiringan berkisar 1-3% sampai > 40% dengan enam bentangan alam. Jenis tanah terbentuk dari batuan tua berupa sedimen dan batuan ubahan, bertekstur alluvial kasar sampai gambut. Wilayah hutan didominasi hutan bakau (*mangrove*) dan sagu (*Metrocylon sp.*). Iklim termasuk tipe A (menurut *Schmit* dan *Ferguson*), curah hujan rata-rata 3.525 mm/tahun (tipe hujan A menurut *Koopen*) dengan suhu terendah berkisar 6°C (daerah pantai) dan tertinggi berkisar 26°C -30°C (daerah pegunungan).<sup>135</sup>

##### b. Kondisi topografis dan iklim

Kondisi topografi Kabupaten Mimika cukup beragam yang ditandai dengan wilayah datar, wilayah rawa-rawa, wilayah

---

<sup>135</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002. Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika 2002-2006*, Timika, 2002, hlm. 19-20.

perbukitan dan wilayah pegunungan yang diselimuti kabut abadi. Wilayah laut berada di perairan Arafura. Kabupaten Mimika memiliki berbagai jenis kekayaan alam, baik di laut, dataran rendah, rawa-rawa, maupun di perbukitan. Dataran rendah dan rawa-rawa ditumbuhi hutan bakau dan hutan sagu hingga ke puncak gunung yang bertebing curam dan bersalju.

Statistik Badan Meteorologi dan Geofisika memperlihatkan bahwa curah hujan di wilayah Kabupaten Mimika berkisar antara 2.109 mm sampai 5.035mm, atau rata-rata 3.525mm. curah hujan tertinggi terjadi sepanjang bulan Maret hingga Oktober, sementara musim kemarau cenderung tidak pasti. Suhu udara pada siang hari setiap hari mencapai rata-rata 30°C di wilayah pantai dan 20°C di pegunungan. Sementara pada malam hari, suhu udara biasanya mendekati titik beku untuk wilayah pegunungan. Kecepatan angin rata-rata mencapai 1,0-2,4 knot/jam, penyinaran matahari antara 14,3-26,6 sedangkan kelembaban nisbi berkisar antara 75-85% dengan rata-rata angka tahunan 78%.<sup>136</sup>

c. Kondisi hidrologi, jenis tanah dan batuan

Sungai di wilayah Kabupaten Mimika terbentang dari wilayah Kecamatan Mimika barat hingga Kecamatan Agimuga serta beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Ombo, Aijwa, Minajerwi, Otakwa, Agimuga dan Cemara yang semuanya bermuara

---

<sup>136</sup> *Loc. cit.*

di pantai perairan Arafura. Lebak sungai di bagian hilir berkisar antara 100-150 m dengan kedalaman pada musim kemarau antara 3-6 m atau 5-8 m pada musim hujan.

Jenis tanah di Kabupaten Mimika pada umumnya merupakan tanah hasil lapukan batuan dasar sebagai residual soil dan transported soil. Tanah di wilayah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tanah aluvial dengan tekstur halus hingga kasar dan tanah gambut. Jenis tanah aluvial tersusun dari podsolik merah kuning yang penyebarannya hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

Sementara itu satuan batuan di wilayah ini umumnya berumur prakambium-recen yang dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi beberapa formasi. Jenis batuan terdiri dari batuan sedimen, yaitu batuan pasir, batuan lempung, batuan gamping, batuan terobosan, batuan ubahan dan batuan hasil perombakan. Semua jenis batuan tersebut tersebar di wilayah pegunungan dan sungai.<sup>137</sup>

## 2. Bidang Ekonomi

### a. Pertumbuhan ekonomi

Tahun 1960 perekonomian Irian Jaya secara umum dikelola oleh Departemen-departemen Pemerintah Belanda karena Irian Jaya masih dalam kekuasaan Belanda. Dari tahun 1949 Sampai dengan tahun 1962 perekonomian Irian Jaya diorientasikan pada kegiatan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 21



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perdagangan yang mengalami defisit-defisit besar pada neraca pembayaran perdagangan. Kegiatan perdagangan tersebut berupa import barang kebutuhan seperti beras dan ekspor barang hasil bumi seperti minyak mentah, bunga pala dan kayu. Kegiatan perdagangan tersebut masih terpusat di kota-kota di pesisir pantai seperti Hollandia (Jayapura), Manokwari, Biak, Merauke dan Sorong. Sementara penduduk di daerah pedalaman seperti daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Timika masih menggunakan sistem barter dalam transaksi yaitu dengan saling menukar barang kebutuhan yang diperoleh dari bertani, beternak dan berburu.<sup>138</sup>

Uang belum penting bagi kehidupan sebagian besar penduduk, termasuk hampir seluruh penduduk di daerah pegunungan yang kebanyakan masih menggunakan kapak persegi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Uang Rupiah Irian Barat (IBRp) mulai beredar baru pada tahun 1963 yang nilainya sama dengan "gulden" Belanda.

Tahun 1963 pada saat Pemerintahan Irian Barat diserahkan oleh Kekuasaan Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) kepada Republik Indonesia, beberapa perubahan penting dalam ekonomi dan pemerintahan ditangguhkan sampai Agustus 1969, yaitu setelah dilaksanakannya Pepera. Setelah Irian Jaya mempunyai status otonom tahun 1969, aktivitas ekonomi berada di bawah pengawasan

---

<sup>138</sup> Ross Garnaut & Chris Manning, *Op. cit.*, hlm. 19-25.

Departemen-departemen Pemerintah Propinsi yang dikoordinasi oleh *Sektor Khusus*. Tahun 1965 terjadi inflasi yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang kebutuhan dan menimbulkan pasar gelap. Antara tahun 1967-1969 terjadi beberapa kali kekurangan bahan pokok di Irian. Baru pada tahun 1970 keadaan ekonomi stabil kembali.<sup>139</sup>

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Mimika baru mulai terlihat pada tahun 1992 sebagai dampak perkembangan usaha Freeport. Pendapatan penduduk meningkat, yang semula hanya dari bertani dan beternak kemudian menjadi bertambah dari usaha dagang dan jasa. Penduduk juga sudah menggunakan uang sebagai alat tukar barang.

Bila dilihat PDRB perkapita termasuk tambang maka rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Mimika pada tahun 1993 sebesar 49.5 juta rupiah, tahun 1996 di atas 82.5 juta rupiah, tahun 1998 sebesar 205,1 juta rupiah dan tahun 2000 sebesar 177.7 juta rupiah. PDRB perkapita tanpa tambang lebih realistis dimana tahun 1993 sebesar 1.9 juta rupiah, tahun 1996 sebesar 4.7 juta rupiah dan pada tahun 2000 telah mencapai 4.3 juta rupiah.<sup>140</sup>

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga kostan. Bila diamati secara series pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mimika dengan sektor

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 44-48.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertambangan, tampak bahwa perkembangan perekonomian Nasional relatif tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Mimika. Pada tahun 1997, saat terjadi krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika tanpa sub sektor pertambangan sebesar 6.58%, tahun 1998 saat puncak krisis ekonomi pertumbuhannya hanya 1.20% dan mulai beranjak meningkat pada tahun 1999 sebesar 3.21% dan pada tahun 2000 sebesar 9.87%.

### b. Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Mimika lebih didominasi oleh lahan pertanian ladang, yaitu seluas 13.637 Ha yang kebanyakan terdapat di wilayah Kecamatan Mimika Baru dan Mimika Timur. Sedangkan lahan pertanian sawah relatif kecil, yaitu hanya seluas 104 Ha. Kecilnya lahan pertanian ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan di sektor pertanian. Secara keseluruhan, Kecamatan Mimika Timur memiliki areal pertanian yang paling luas, yaitu 5.733 Ha, diikuti oleh Kecamatan Mimika Baru seluas 5.719 Ha dan yang paling kecil terdapat di Kecamatan Mimika Barat yang hanya mencapai 549 Ha.

Sempitnya lahan pertanian menyebabkan relatif terbatasnya tingkat produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Mimika. Jenis tanaman produksi didominasi oleh jenis umbi-umbian, dimana varietas betatas menempati tingkat produksi tertinggi. Selain itu juga

terdapat sagu, keladi, singkong dan sedikit padi serta jagung. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat produksi serta terbatasnya varietas tanaman yang bisa dikembangkan.

Data lain yang dapat dipakai untuk menunjukkan kinerja pertanian adalah pengembangan tanaman sayur dan buah. Di wilayah ini sudah dikembangkan berbagai jenis sayur dan buah seperti pisang, cabe, tomat, sawi, kacang tanah dan sebagainya walaupun masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Data yang lengkap tentang produksi sayur dan buah sulit diperoleh kecuali untuk Kecamatan Mimika Baru. Kecamatan Mimika Baru memiliki berbagai keunggulan relatif dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti lahannya yang relatif luas, ketersediaan sarana produksi pertanian, serta kedekatan dengan pusat pendidikan dan informasi.<sup>141</sup>

### c. Peternakan

Populasi ternak di wilayah Kabupaten Mimika antara lain terdiri dari sapi, babi, kambing, ayam buras dan itik. Data yang berhasil dikumpulkan seperti terlihat dalam tabel berikut, menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada populasi sapi, yaitu dari 410.142 ekor pada 1997 menjadi 655 ekor pada tahun 1999. Populasi yang lain terus mengalami peningkatan

---

<sup>141</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada periode yang sama: babi, dari 1.512 ekor menjadi 3.980 ekor dan; ayam buras, dari 682 ekor menjadi 32.500 ekor.

Tabel Jumlah Ternak di Kabupaten Mimika  
Tahun 1997-1999

Jenis Populasi Ternak	1997	1999
Sapi	410.142	655
Babi	1.512	3.980
Ayam buras	682	32.500

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002. Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika 2002-2006*. Timika. 2002.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya tingkat permintaan dengan harga yang juga bagus serta teknologi perawatan yang relatif mudah. Diversifikasi jenis ternak agak sulit dilakukan karena sulitnya mendapatkan bibit non-lokal seperti sapi dan kambing. Biaya untuk mendapatkan bibit dari luar Timika cukup tinggi karena mahal transportasi.<sup>142</sup>

#### d. Perkebunan

Luas areal perkebunan di Mimika juga mengalami peningkatan yang cukup berarti selama periode 1990-1995. Areal tersebut digunakan untuk mengembangkan tanaman kopi, kelapa dan coklat. Ketiga jenis komoditas ini terutama dijumpai di Kecamatan Mimika Timur karena iklimnya yang cocok serta perawatannya relatif mudah. Selain itu juga dikembangkan jenis tanaman karet dan pala yang dikembangkan di Kecamatan Mimika Barat. Areal perkebunan

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kecamatan Agimuga yang letaknya memang relatif terpencil.<sup>143</sup>

e. Perikanan

Pada sektor perikanan Kabupaten Mimika mengembangkan jenis udang, ikan sembilang, ikan kakap dan kepiting. Produksi kepiting cukup tinggi di wilayah Kecamatan Mimika Timur, sedangkan udang di Kecamatan Mimika Barat. Produksi ikan relatif rendah dan tidak tersedia cukup data yang menggambarkan dinamikanya.<sup>144</sup>

f. Kehutanan

Hutan di wilayah ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai hutan suaka alam (PPA), hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan konservasi. Areal terluas terdapat di Kecamatan Agimuga. Secara keseluruhan luas hutan di wilayah Kabupaten Mimika telah mengalami penyusutan terutama untuk kawasan hutan produksi terbatas, yaitu dari 1.452.246 Ha pada tahun 1993 menjadi hanya 293.600 Ha pada tahun 1995. hal itu disebabkan oleh adanya praktek penebangan bebas. Penyusutan areal hutan juga disebabkan oleh pembukaan areal hutan untuk wilayah pemukiman, perkebunan dan perladangan oleh dan untuk para pendatang, serta terkena timbunan pasir sisa penambangan PT. Freeport Indonesia.

---

<sup>143</sup> *Loc. cit.*

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Sementara untuk areal hutan konservasi, terjadi peningkatan dari 729.246 Ha menjadi 1.617.299 Ha pada periode yang sama. Demikian halnya dengan hutan suaka alam dan hutan lindung yang relatif tidak mengalami perubahan sebagai hasil dari keseriusan pemerintah dalam mencegah penggundulan hutan.

Hutan di wilayah ini ditumbuhi berbagai jenis kayu, seperti kayu besi, matoa, gaharu, kayu putih, kayu cina, kayu dragon serta berbagai jenis rotan. Dari data yang tersedia produksi yang cukup tinggi terdapat pada jenis kayu besi dan kayu cina yang banyak terdapat di Kecamatan Mimika Timur dan Mimika Baru.<sup>145</sup>

g. Industri dan perdagangan

Kabupaten Mimika menghasilkan beberapa jenis kerajinan patung walaupun dalam jumlah yang relatif terbatas, di samping beberapa jenis souvenir dan tikar. Selain itu juga sudah terdapat industri mebel, penggergajian kayu, pengolahan ikan asin, pembuatan batako, pengolahan kerupuk, beberapa industri jasa (perbengkelan, periklanan, wartel dan persewaan kendaraan), koperasi, toko serta usaha kios yang merupakan unit usaha paling dominan. Industri yang terdapat di wilayah ini umumnya masih berskala kecil yang secara keseluruhan berjumlah 1.516 unit usaha, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Mimika Baru (Timika) yang berjumlah 1.221 unit usaha.

---

<sup>145</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perkembangan tersebut merupakan dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan penambangan emas oleh PT. Freeport Indonesia yang memang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Mimika Baru. Sementara Kecamatan Mimika Barat sama sekali belum memiliki kegiatan industri dalam skala apapun. Di Mimika Baru, Mimika Timur dan Agimuga sudah terdapat industri berskala menengah dan besar, tetapi jumlahnya sangat kecil, yaitu di bawah 10%.

Pasar merupakan salah satu sarana penting penggerak roda perekonomian. Di Kabupaten Mimika secara keseluruhan terdapat 14 buah pasar dimana 9 diantaranya berada di kecamatan Mimika Baru (Timika). Kondisinya pun beragam, ada yang sama sekali tidak bisa digunakan, ada yang sedang dalam proses pembangunan, dan sebagian lagi mengalami kerusakan. Ada juga pasar darurat dan koperasi. Di beberapa wilayah transmigrasi juga sedang dikembangkan pasar. Supermarket hanya ada di Mimika Baru sebanyak dua buah.<sup>146</sup>

### h. Lembaga keuangan

Jumlah lembaga keuangan di Kabupaten Mimika tahun 1999 adalah sebanyak 34 buah, di mana 29 buah berada di Kecamatan Mimika Baru. Lembaga keuangan perbankan semuanya terpusat di Kecamatan Mimika Baru, yaitu tiga bank pemerintah, dua bank

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



swasta dan 29 koperasi. Kebutuhan keuangan lebih banyak dilayani oleh koperasi karena di wilayah ini baru terdapat beberapa bank pemerintah dan swasta.<sup>147</sup>

i. Tenaga kerja

Tahun 1961, 10.500 orang Irian atau lebih dari setengah tenaga buruh penduduk asli bekerja dalam dinas pemerintah, yang lain bekerja dalam industri bangunan yang sebagian besar tergantung pada kontrak-kontrak pemerintah. Sebagian besar dari tenaga kerja tersebut tidak memiliki keterampilan khusus dimana sebanyak 30% dari mereka tidak pernah mendapat pendidikan sekolah. Beberapa dari mereka bekerja dalam dinas pemerintahan yang tergolong sebagai pegawai rendah dan sedikit sekali yang memegang jabatan administratif tingkat menengah.<sup>148</sup>

Tahun 1961-1963 terjadi imigrasi besar-besaran dari pulau-pulau lain di Indonesia yang mengisi lowongan-lowongan di Irian. Mereka adalah para pegawai tenaga ahli pemerintahan dan perusahaan, para petani sebagai transmigran dan pendatang yang pindah dengan biaya sendiri. Tahun 1969 permintaan tenaga ahli mengalami peningkatan yang besar sejalan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing pertambangan dan penangkapan ikan. Para tenaga ahli tersebut banyak didatangkan dari Filipina, Korea, Jepang, Australia dan Amerika Serikat. Beberapa tenaga ahli juga

---

<sup>147</sup> *Loc. cit.*

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

ditarik dari propinsi-propinsi lain di Indonesia dengan penawaran upah yang tinggi.<sup>149</sup>

Tahun 1999 data tenaga kerja Mimika menunjukkan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5.205 orang, pada tahun 2000/2001 turun menjadi 3.285 orang. Pada per Maret 2002 meningkat lagi menjadi 5.412 orang yang terdiri dari asal putra daerah sebanyak 1.684 orang dan non putra daerah sebanyak 3.728 orang. Bila diperinci lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 4.838 orang dan perempuan 574 orang dan sebagian besar berada di Kecamatan Mimika Baru. Dari jumlah tersebut diperinci lagi berdasarkan tingkat pendidikan ternyata tamatan SLTA menempati urutan pertama, yaitu 3.712 orang, menyusul SD 562 orang, SLTP 527 orang, Sarjana 378 orang dan Sarjana Muda 233 orang. Jumlah penempatan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan ijin tenaga kerja asing sebanyak 345 orang yang tersebar pada 18 perusahaan.<sup>150</sup>

### 3. Bidang Sosial

#### a. Penduduk

Dalam tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika terlihat bahwa pada tahun 1998 jumlah penduduk sebesar 68.568 jiwa, tahun 1999 sebesar 79.690 jiwa, tahun 2000 sebesar 90.518 jiwa dan tahun 2001 sebesar 118.170 jiwa.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 26. Lihat *Tabel Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Mimika Tahun 1999-2002* pada lampiran 12.

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika  
Tahun 1998-2001

Tahun	1998	1999	2000	2001
Jumlah	68.568	79.690	90.518	118.170

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002. Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika 2002-2006*. Timika. 2002.

Jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Mimika Baru, yaitu 60% dengan pertumbuhan penduduk 16% pertahun dan tingkat kepadatan tahun 2001 adalah 5.3 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan ini dikarenakan Mimika Baru merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian. Kepadatan penduduk daerah perkotaan adalah 20.7 orang/km<sup>2</sup>, sedangkan daerah pedalaman hanya 1.1-2.9 orang/km<sup>2</sup>.

Salah satu penyebab adalah tingginya tingkat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Mimika, sementara tingkat kematian dan kelahiran relatif konstan. Kehadiran PT. Freeport menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang, baik untuk bekerja di perusahaan tersebut maupun untuk membuka usaha lain seperti perdagangan dan jasa. Pertumbuhan penduduk juga berkaitan dengan sosialisasi program KB yang dinilai masih belum optimal kepada masyarakat lokal.<sup>151</sup>

## b. Pendidikan

Tahun 1961 dalam anggaran Pemerintah Belanda pendidikan mendapatkan jatah yang cukup besar tetapi pendidikan tidak

<sup>151</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002, *Op. cit.* hlm. 26-27.

disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor perekonomian modern. Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan nilai-nilai Belanda dan agama Kristen. Bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda walaupun yang lebih sering dipakai adalah bahasa Melayu. Pendidikan kemudian berkembang pesat di bawah pemerintahan Indonesia. Di sekolah-sekolah dasar pada tahun 1972 terdaftar 123.700 murid, jumlahnya dua kali lebih banyak daripada tahun 1961.<sup>152</sup> Walaupun tahun 1970 sekolah dasar negeri tumbuh dengan pesat namun 85% murid masih terdaftar di sekolah-sekolah misi. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pengantar di semua sekolah. Jumlah murid terbesar adalah di kota-kota, sedangkan di daerah pedalaman masih sangat sedikit.<sup>153</sup>

Tahun 2000 jumlah sarana pendidikan tingkat TK di Mimika sebanyak 16 buah, dengan jumlah guru 49 orang dan murid 902 orang. Tingkat SD sebanyak 63 buah dengan jumlah guru 392 orang dan jumlah murid 12.566 orang. Sedangkan tingkat SLTP sebanyak 11 buah dengan tenaga pengajar 147 orang dan jumlah murid 2.875 orang. Pada tingkat SLTA (umum dan kejuruan) terdapat 5 buah dengan jumlah guru 89 orang dan murid 1.398 orang. Dalam tahun 2000 telah dibuka pula Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan

---

<sup>152</sup> Lihat *Tabel Jumlah Murid dan Alokasi Dana Pendidikan Irian Barat* pada lampiran 13.

<sup>153</sup> Ross Garnaut dan Chris Manning, *Op. cit.*, hlm.. 24.

jumlah murid 40 orang, pengajar 3 orang (tetap) dan berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.<sup>154</sup>

Tabel Jumlah Sarana Pendidikan, Guru & Murid Kabupaten Mimika Tahun 2000

Tingkat Pendidikan	Sarana Pendidikan	Guru	Murid
TK	16	49	902
SD	63	392	12.566
SLTP	11	147	2.875
SLTA (Umum & Kejuruan)	5	89	1.398
SPK	1	3	40

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002. Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika 2002-2006*. Timika, 2002.

Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang menempuh jenjang pendidikan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Mimika yang berusia sekolah, yaitu kelompok umur antara 7-24 tahun. Ini berarti pekerjaan pemerintah setempat masih sangat berat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, mengingat kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan juga masih rendah

### c. Kesehatan

Penyakit yang paling menonjol di Kabupaten Mimika pada tahun 2001 berturut-turut adalah malaria, yaitu 11.459 kasus (27.49%), Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan diare sebanyak 8.155

---

<sup>154</sup> *Loc. cit.*

kasus (19.56%), HIV/AIDS sebanyak 264 kasus dan 14 orang diantaranya meninggal.

Jumlah infrastruktur kesehatan di Kabupaten Mimika pada tahun 2000 terdiri dari 7 Puskesmas dan 46 Puskesmas Pembantu yang penyebarannya kurang merata. Jumlah terbesar di Mimika Timur dengan 1 buah Puskesmas dan 19 Puskesmas Pembantu. Fasilitas fisik tersebut dilengkapi dengan dukungan sumber daya manusia yang terdiri dari 10 orang dokter dan 75 perawat untuk tingkat Puskesmas dan 29 perawat untuk Puskesmas Pembantu. Tenaga medis tersebut lebih banyak terdapat di Mimika Baru dengan 8 orang dokter dan 54 orang perawat. Tenaga medis yang paling minim terdapat di Kecamatan Agimuga.<sup>155</sup>

#### 4. Sarana dan prasarana fisik

##### a. Transportasi

Jalan Timika-Mapuru Jaya merupakan urat nadi perekonomian daerah Kabupaten Mimika yang menghubungkan Kota Timika sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan Puumako sebagai pelabuhan muat bongkar barang. Pembangunan jalan Mapuru Jaya-Puumako yang dimulai sejak tahun 1995/1996 yang dikelola oleh propinsi sampai saat ini belum selesai seluruhnya. Untuk mendukung dinamika transportasi darat sudah dikembangkan empat buah

---

<sup>155</sup> *Loc. cit.*

terminal: tiga terminal di Kecamatan Mimika Baru dan satu terminal di Kecamatan Mimika Timur.<sup>156</sup>

Sampai pada tahun 2001, panjang jalan yang telah terbangun adalah 406.130 Km, terdiri dari jalan propinsi 42.50 Km dan jalan kabupaten 364.130 Km. kondisi jalan yang baik hanya 79.825 Km, rusak sedang 96.883 Km dan rusak berat 229.992 Km. sedangkan permukaan jalan yang sudah diaspal sepanjang 76.655Km, perkerasan/kerikil 82.246 Km dan jalan tanah 247.730 Km. panjang ruas jalan di Kabupaten Mimika sangat beragam.

Di Mimika Baru, ruas jalan yang beraspal adalah 103.627 Km, jalan berkerikil 36.42 Km dan jalan tanah sepanjang 32.83 Km. secara umum jaringan jalan di wilayah ini relatif baik tetapi masih membutuhkan pembenahan karena ruas jalan yang mengalami kerusakan jauh lebih panjang dibandingkan dengan ruas jalan yang baik (158Km berbanding 13 Km).

Kondisi jalan di kecamatan lain relatif lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi ruas jalan di Mimika Baru. Di Kecamatan Mimika Timur misalnya, jalan beraspal hanya 31.33 Km sedangkan jalan tanah sepanjang 58.1 Km. Kondisi yang lebih parah terdapat di Kecamatan Mimika Barat di mana hanya terdapat ruas jalan sepanjang 5,5 Km yang adalah jalan tanah dan dalam kondisi rusak. Kecamatan Agimiga memiliki ruas jalan tanah sepanjang 25

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm.. 28.

Km dan dalam keadaan rusak. Prasarana jembatan yang menghubungkan Poumako ke Pelabuhan Nusantara di mana saat ini sedang dibangun antara lain: Jembatan Poumako I (180 m) selesai 80%; Jembatan Poumako II (170 m); Jembatan Poumako III (80 m) dan; Jembatan Poumako IV (45 m).

Prasarana pelabuhan rakyat pembangunannya pada tahun 2000 dengan bantuan Pemda Tingkat I dan tahun 2001 dari bantuan PT. Freeport yang sekarang telah selesai. Penyelesaian pembangunan pelabuhan rakyat ini sangat diutamakan agar kegiatan pembangunan jembatan Poumako I tidak mengganggu lalu lintas pelayaran kapal. Sedangkan pembangunan prasarana pelabuhan besar atau dermaga Pelabuhan Nusantara saat ini telah terealisasi 50%.

Prasarana transportasi udara satu-satunya adalah bandara udara Timika yang dapat didarati pesawat udara berbadan lebar jenis Boeing 747. Sampai pada tahun 2002, telah beroperasi tiga perusahaan penerbangan yang melayani jalur penerbangan ke Timika, antara lain Garuda Indonesia, Merpati Nusantara dan Kartika Airlines.<sup>157</sup>

b. Infrastruktur listrik dan telekomunikasi

Angka kepemilikan jaringan listrik di Kabupaten Mimika masih relatif rendah. Pengguna listrik paling banyak terdapat di Kecamatan Mimika Baru, yaitu sebanyak 9.296 KK dan yang

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.



terendah di Kecamatan Agimuga yang hanya mencapai 29 KK. Sementara yang belum memiliki jaringan listrik jauh lebih banyak terutama untuk tiga kecamatan selain Mimika Baru.

Sementara itu jumlah keluarga yang memiliki telepon hanya ada di kecamatan Mimika Baru dan Mimika Timur. Demikian halnya dengan radio komunikasi. Sementara fasilitas televisi sudah menyebar ke semua kecamatan kecuali Agimuga yang sama sekali tidak memiliki fasilitas komunikasi apapun. Fasilitas telekomunikasi yang tersedia di wilayah ini juga masih terbatas, yaitu wartel 15 buah, telepon umum 26 buah dan kantor pos 1 buah yang semuanya terkonsentrasi di Kecamatan Mimika Baru.<sup>158</sup>

### 5. Pemerintahan

Wilayah administrasi Kabupaten Mimika pada awalnya adalah Kecamatan Mimika Timur yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1996 ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Otonom. Penetapan dari wilayah kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten didasarkan atas pertimbangan:

- a. Ukuran wilayah yang sedemikian luas sehingga menyulitkan pelayanan kepada masyarakat;

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

- b. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sehingga tidak mampu ditangani pemerintahan kecamatan;
- c. Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Timika ditunjuk sebagai Ibu Kota Propinsi, meskipun pembentukan ini ditangguhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 karena alasan kondisi politik. Penunjukan ini lebih didasarkan atas potensi sumber daya alam dan potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika yang sangat menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>159</sup>

Sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah per 1 Januari 2001, maka Kabupaten Mimika telah melaksanakan sejumlah kegiatan penting antara lain:

- a. Pembentukan DPRD;
- b. Reorganisasi dan restrukturisasi kelembagaan pemerintah dan;
- c. Pemekaran wilayah kecamatan.<sup>160</sup>

Pembentukan dan peresmian DPRD Kabupaten Mimika pada tanggal 8 Januari 2001 memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui distribusi kewenangan yang telah diberikan kepada daerah, serta berpedoman pada PP No. 84 Tahun

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>160</sup> *Peta Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Mimika* dapat dilihat pada lampiran 16.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan penataan kelembagaan pemerintah melalui reorganisasi dan restrukturisasi, menjadi 17 Dinas, 5 Badan, 3 Kantor dan 11 Bagian. Pelantikan para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian diikuti pula dengan pelantikan eselon yang didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- a. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan;
- c. Kemampuan keuangan daerah dan;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur di daerah.

Berdasarkan data terakhir, jumlah PNS di Kabupaten Mimika per Januari 2002 sebanyak 584 orang terdiri dari Golongan IV 13 orang, Golongan III 240 orang, Golongan II 295 orang dan Golongan I 36 orang. Dari data tersebut dapat diketahui pula jenjang pendidikan akhir para aparatur pemerintah, yaitu S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 161 orang, Diploma 60 orang, SLTA 297 orang, SLTP 37 orang dan SD 23 orang. Sebagai dampak kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi maka jabatan struktural yang tersedia sebanyak 610 jabatan, diantaranya yang baru terisi hanya 259 jabatan, dan sisanya 351 masih lowong. Hal ini berarti bahwa dari jumlah PNS sebanyak 584 orang, terdapat sekitar 325 orang yang belum memegang jabatan dikarenakan antara lain belum memenuhi persyaratan kepangkatan/golongan maupun tingkat pendidikan.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan, maka telah dilaksanakan pemekaran wilayah kecamatan dari 4 kecamatan menjadi 12 kecamatan, 76 desa dan 6 kelurahan.<sup>161</sup>

### **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Timika**

#### 1. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Timika adalah semua kondisi yang berada di dalam batas wilayah administratif Kabupaten Mimika yang mungkin berfungsi sebagai kekuatan atau sebaliknya sebagai kelemahan.

##### a. Kekuatan:

- 1) Sumber daya alam seperti tambang atau bahan galian yang sangat potensial.
- 2) Sumber daya perikanan laut yang sangat besar.
- 3) Akses keluar wilayah dan keluar negeri melalui bandar udara sangat tinggi, apalagi telah didukung oleh tiga perusahaan penerbangan seperti Garuda, Merpati Nusantara dan Kartika Airlines.
- 4) Taman Nasional Lorentz yang memiliki daya tarik nasional dan internasional.
- 5) Dukungan pelabuhan laut yang relatif lancar dan rutin.

---

<sup>161</sup> Ross Garnaut dan Chris Manning, *Op. cit.*, hlm. 30-31. Lihat *Nama-nama dan Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa di Papua* pada tabel dalam lampiran 11.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 6) Keberadaan perusahaan multinasional dan nasional seperti PT. Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya yang sangat berarti bagi pembangunan lokal.
- 7) Kedekatan lokasi dengan Australia dan Asia Pasifik merupakan peluang bagi pengembangan ekonomi.
- 8) Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu 6,58% pada tahun 1998 menjadi 9,87% pada tahun 2000.
- 9) Peningkatan pendapatan yang relatif tinggi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB per kapita tanpa tambang yang sangat cepat, yaitu dari:
  - a) 1,9 juta rupiah pada tahun 1993 menjadi 4,7 juta rupiah pada tahun 1996 dan kemudian menjadi 4,3 juta rupiah pada tahun 2000.
  - b) Tersediannya lembaga keuangan perbankan yang terpusat di Kecamatan Mimika Baru, baik bank pemerintah, swasta dan koperasi.
  - c) Prasarana pelabuhan pembangunan (Pelabuhan Rakyat) telah selesai sementara Pelabuhan Nusantara sedang dalam proses penyelesaian sehingga dalam waktu dekat dapat berfungsi memacu kegiatan ekonomi daerah.
  - d) Perangkat Daerah atau lembaga pemerintahan kabupaten telah menjadi lengkap dengan dibentuknya 17 dinas, 5 badan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan 3 kantor yang diharapkan dapat lebih mampu memberikan pelayanan publik.

e) Telah dilakukan pemekaran kecamatan, desa dan kelurahan sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>162</sup>

b. Kelemahan:

- 1) Secara umum kualitas sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat masih rendah, baik menyangkut keterampilan dan pengetahuan maupun sikap mental, pola pikir dan etos kerja.
- 2) Munculnya keresahan sebagai akibat adanya kesenjangan sosial yang terlalu mencolok.
- 3) Masih banyak penduduk yang memiliki daya beli yang sangat rendah dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi.
- 4) Masih lemahnya pengelolaan dana masyarakat yang sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi untuk memacu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Mimika.
- 5) Skala usaha tanaman perkebunan dan perdagangan masih kecil meskipun memiliki potensi yang cukup besar, seperti pala, kopi, kelapa, kelapa sawit, coklat dan karet.
- 6) Masih rendahnya kondisi kesehatan masyarakat dan masih merebaknya berbagai jenis penyakit seperti malaria, infeksi saluran pernafasan akut, dan secara khusus meningkatnya

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penyebaran penyakit HIV/AIDS yaitu dari 80 orang pada tahun 2000 menjadi 264 pada tahun 2002.

- 7) Kapasitas pemerintahan yang masih terbatas baik di bidang eksekutif maupun legislatif karena usia Kabupaten Mimika yang masih relatif muda. Misalnya ada 351 jabatan yang masih lowong dari 610 jabatan karena persyaratan kepangkatan dan pendidikan yang belum terpenuhi.
- 8) Masih banyak wilayah yang terisolasi, sulit dijangkau dan sulit berkomunikasi sehingga banyak kawasan potensial yang belum bisa dikembangkan dan mendapatkan pelayanan publik karena masih banyak penduduk yang tergolong miskin dan terbelakang (di pedalaman, pesisir pantai, terpencar dan terpencil).
- 9) Masih banyak jalan yang harus diperbaiki karena mengalami kerusakan, yaitu dari 406.130 km yang terbangun hanya 79.825 km yang tergolong baik, sedangkan yang lain tergolong rusak (96.883 km) dan rusak berat (229.922 km).
- 10) Rusaknya lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari “tailing” hasil pembuangan dari aktivitas PT. Freeport Indonesia.
- 11) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah masih belum memadai sehingga informasi mengenai potensi kekayaan kabupaten di seluruh wilayah tersebut belum terungkap secara menyeluruh.

- 12) Kondisi keamanan, kohesi sosial (hubungan antar etnis) dan masalah disintegrasi masih rentan yang mempengaruhi niat investor untuk menanamkan modalnya.
- 13) Masih lemahnya penegakan supremasi hukum oleh aparat yang mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas dan pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap perempuan.
- 14) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari lemahnya manajemen pelayanan dan pembangunan.<sup>163</sup>

### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Timika adalah semua kondisi yang dapat menjadi peluang atau sebaliknya menjadi ancaman.

#### a. Peluang:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan sumber dana bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 36-38.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3) Adanya kebijakan nasional tentang Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memungkinkan Kabupaten Mimika menjadi salah satu pusat pertumbuhan regional yang penting.
  - 4) Adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap pemberian Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Propinsi Papua dapat mendorong Kabupaten Mimika untuk lebih cepat membangun.
  - 5) Adanya kemungkinan Kabupaten Mimika untuk menjadi Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah sesuai dengan Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 yang memungkinkan daerah ini memiliki prospek cerah dimasa mendatang.
  - 6) Adanya globalisasi dalam perdagangan bebas dapat mendorong Kabupaten Mimika untuk memasuki pasar internasional Korea Selatan, Singapura, India, Filipina dan sebagainya.
  - 7) Pengembangan industri berbasis ekspor akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekspor dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.<sup>164</sup>
- b. Ancaman:
- 1) Adanya keterbatasan kewenangan dalam mengelola dan mengeksploitasi hasil laut oleh peraturan perundangan tingkat nasional.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2) Adanya kompetisi antar daerah yaitu berlomba dalam menarik investor serta melakukan kegiatan ekspor dimasa mendatang.
- 3) Masuknya migran dari luar Kabupaten Mimika yang cukup tinggi yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk sebesar 12.74% selama periode 1990-2000 sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kegiatan PT. Freeport Indonesia, yang pada gilirannya menambah kompleksitas masalah sosial dan politik di Kabupaten Mimika.
- 4) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengkritisai kinerja pemerintahan secara umum di Kabupaten Mimika secara khusus terutama mengenai pelanggaran HAM dan keadilan setelah reformasi digulirkan.
- 5) Adanya tindakan yang tidak adil dari pihak pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat lokal.
- 6) Adanya wacana yang berkembang untuk melepaskan diri dari NKRI yang sering memicu konflik dan mengganggu ketentraman masyarakat.
- 7) Adanya tuntutan yang tinggi dari Undang-Undang Otonomi daerah dan Otonomi Khusus tentang kinerja pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.

Adanya tuntutan masyarakat Papua secara keseluruhan agar pemerintahan lokal benar-benar secara profesional menyelesaikan masalah

masyarakat, memenuhi aspirasi mereka dan memperhatikan keanekaragaman budaya Papua.<sup>165</sup>

### C. Posisi Penduduk Asli dalam Perkembangan Timika

#### 1. Penduduk asli di wilayah Timika

Penduduk asli yang tinggal di sekitar wilayah Timika yang merupakan bagian dari Kabupaten Mimika terdiri dari berbagai macam suku, namun yang terbesar adalah suku Amungme dan Kamoro. Suku Amungme dan Kamoro menganggap suku-suku lain seperti Dani, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekagi, Delem, Kupel dan Ngalum sebagai pendatang. Sebagian besar dari mereka hidup di lembah-lembah pegunungan bagian tengah dan terbagi dalam kelompok-kelompok suku menurut tempat tinggalnya, yaitu:

- a. Sebelah Utara dari pegunungan bagian tengah didiami oleh suku-suku Damal, Dani dan Delem.
- b. Sebelah Selatan dari pegunungan bagian tengah didiami oleh suku-suku Amungme dan Nduga.
- c. Sebelah Timur dari pegunungan bagian tengah didiami oleh suku-suku Nduga, Kupel dan Ngalum.
- d. Sebelah Barat dari pegunungan bagian tengah didiami oleh suku-suku Moni dan Ekagi.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>166</sup> *Peta Wilayah Suku-Suku* dapat dilihat pada lampiran 18.

Sedangkan lebih ke Selatan dari pegunungan bagian tengah, yang mendiami pesisir pantai Irian Jaya adalah suku Kamoro. Kedua suku inilah yang paling berperan serta dalam mewarnai sejarah perkembangan PT. Freeport Indonesia dan Kota Timika karena posisi tempat tinggal mereka paling dekat dan berada di sekitar wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia dan Kota Timika. Suku Amungme mendiami wilayah bagian selatan pegunungan tengah Irian jaya atau bagian utara wilayah Mimika. Kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat Amungme disebut *Amungsa*. Sedangkan suku Kamoro menempati wilayah bagian selatan, yang terdiri dari dataran rendah.<sup>167</sup>

### a. Kehidupan suku Amungme

Kata Amungme berasal dari dua kata, yaitu *Amung* yang berarti utama atau intisari dan *Me* yang berarti manusia. Jadi Amungme mempunyai pengertian manusia utama. Orang Amungme berpikir bahwa ia adalah manusia utama di atas manusia lain. Mereka percaya bahwa mereka adalah intisari dari alam sekitarnya. Alam memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sehingga orang Amungme sangat menghargai dan menjaga alam sekitar dengan cara tidak sembarangan merusak lingkungan hidup. Bila merusak lingkungan hidup berarti merusak diri mereka sendiri. Besarnya penghargaan terhadap alam diungkapkan dalam bentuk upacara pengucapan syukur

---

<sup>167</sup> Tom Beanal, *Op. cit.*, hlm. 2-3.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atas berkah yang didapat dari alam, misalnya dengan mengadakan pesta kesuburan dan pesta panen.<sup>168</sup>

Suku Amungme mendiami dataran tinggi di kawasan Kabupaten Mimika sehingga mempunyai ciri-ciri budaya dataran tinggi (*highland*). Penduduk dengan budaya dataran tinggi ini berada pada batas 50 mil ke arah pegunungan bagian timur, selatan, barat dan pegunungan Jayawijaya (Wamena). Sedangkan penduduk yang berkebudayaan dataran rendah mendiami kawasan dengan batas 50 mil ke arah dataran rendah dan pantai di bagian timur dan barat wilayah Mimika.<sup>169</sup>

Suku Amungme tinggal terpecah di beberapa lembah yang terletak di antara gunung-gunung yang terjal seperti Lembah Tsinga, Lembah Oea, Lembah Jila, Lembah Waa dan Lembah Bella. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Agimuga dan Timika berasal dari lembah-lembah tersebut.<sup>170</sup>

Orang Amungme pada umumnya percaya akan adanya roh-roh leluhur yang tetap mengawasi dan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa hidup manusia dan alam sekitarnya tidak terpisah dari roh-roh yang hidup di dalamnya. Manusia, alam dan roh leluhur mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga hubungan di antara ketiganya harus tetap dijaga agar selalu harmonis. Mereka percaya

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9. *Gambar Orang Amungme* dapat dilihat pada lampiran 28.

<sup>169</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 46.

<sup>170</sup> *Gambar Pemukiman Suku Amungme di Perkampungan Banti yang Dibuat Freeport* dapat dilihat pada lampiran 24.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa Tuhan ada di langit dan di bumi, serta percaya adanya sorga yang disebut *hai*. Di dalam pandangan suku Amungme, *hai* tidak sekedar berarti sorga tetapi merujuk pada tiga elemen kehidupan, yaitu suatu kekayaan magis yang mampu membawa kepada para leluhurnya, berkaitan dengan kehidupan abadi dan suatu gerakan dalam mencari kehidupan kekal dan kesejahteraan.<sup>171</sup>

Makna *hai* bagi orang Amungme begitu mendalam, sehingga banyak gerakan yang dilakukan untuk mengejar atau mencapai *hai*. Bentuk gerakan biasanya berupa perlawanan atau peperangan dan perpindahan secara geografis ke suatu tempat yang dianggap sebagai lokasi *hai*.

Sebagai rumpun suku yang berdiam di dataran tinggi, orang Amungme dan suku-suku tetangganya mempunyai tradisi perang. Perang bagi suku-suku bangsa yang berdiam di pegunungan mempunyai makna yang sangat dalam dan merupakan bagian dari sistem sosial.

Dalam struktur adat suku Amungme setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Siapapun dapat memperoleh status sosial yang lebih tinggi asal mempunyai prestasi yang baik dalam masyarakat. Setiap orang Amungme yang berprestasi mendapat predikat *menagawan* untuk laki-laki atau *inagawan* untuk perempuan. Predikat tersebut diberikan antara lain

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karena seseorang berhasil memenangkan perang suku, mempunyai kekayaan yang banyak berupa ternak, kulit bia (kerang), kebun yang luas dan sikap kepribadiannya dalam kehidupan masyarakat yang dianggap terpuji, misalnya suka menolong yang lemah, jujur dan mau memperhatikan kepentingan orang banyak. Setiap tingkatan wilayah adat mempunyai seorang menagawan, sehingga dalam susunan adat Amungme terdapat tingkatan menagawan.<sup>172</sup>

Pemerintahan Amungme terdapat di setiap kampung dan bersifat otonom. Langkah yang diambil demi kepentingan masyarakat kampung harus dibicarakan dan diselesaikan oleh masyarakat kampung itu sendiri, dengan mendengarkan pendapat orang yang ditokohkan (menagawan) oleh masyarakat kampung tersebut. Setiap keputusan yang penting bagi masyarakat suatu kampung, harus diketahui oleh menagawan kampung tetangga atau menagawan lembah tetangga. Rasa persatuan di antara masyarakat kampung sangat kuat, tetapi dalam kesehariannya mereka masing-masing memiliki hak otonomi penuh.

Masyarakat Amungme dalam menjalankan kegiatan keseharian, segala keputusan yang menyangkut kepentingan umum misalnya perluasan kampung, pekerjaan gotong-royong membuka kebun, pesta kecil-kecilan dan upacara adat sebuah keluarga harus dibicarakan anggota *itorei* dengan melibatkan menagawan dari *itorei* yang

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

bersangkutan. Setelah mendapatkan kata sepakat setiap kepala keluarga memberitahukan hasil kesepakatan kepada istri dan anak-anak untuk kemudian dilaksanakan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari peran menagawan lebih menonjol, meskipun terdapat struktur pemerintahan adat yang diakui.<sup>173</sup>

### b. Kehidupan suku Kamoro

Suku Kamoro berdiam di dataran rendah wilayah Mimika, sehingga mereka memiliki corak budaya dataran rendah (*lowland*). Bila orang Amungme fokus kegiatannya berkisar pada kawasan gunung yang cocok untuk berkebun, beternak dan berburu, maka aktivitas orang Kamoro berfokus pada sungai dan sekitarnya. Mereka lebih banyak mengambil sumber-sumber yang tersedia di lingkungan alam daripada mengusahakannya untuk menunjang kehidupan mereka.<sup>174</sup>

Kampung-kampung yang didiami suku Kamoro adalah: Mapurunjaya, Koperapoka, Maumako, Hiripao, Kongapu, Mwapi, Nawaripi, Iwaka, Miako, Aikawapuka, Kaekwa, Tiwaka, Atuka dan Nawaripi. Kampung dan desa-desa tersebut kecuali Nawaripi dan Koperapoka terletak di pinggiran dan tengah-tengah hutan dekat aliran sungai. Sedangkan Nawaripi dan Koperapoka terletak di dalam Kota Mimika.

---

<sup>173</sup> *Bagan Struktur Pemerintahan Adat Suku Amungme* dapat dilihat pada lampiran 19.

<sup>174</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 57. *Gambar Orang Kamoro* dapat dilihat pada lampiran 29.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di dalam suku Kamoro terdapat klen-klen yang dalam bahasa setempat yang disebut *taparu*. Setiap desa terdiri dari beberapa taparu dan beberapa taparu dikepalai oleh seorang kepala suku yang disebut *Weyaiiku* (sama dengan *Menagawan* pada suku Amungme).

Suku Kamoro pada umumnya memandang tanah sebagai dusun atau tanah tumpah darah, yang berarti bahwa tanah dapat menyimpan berbagai sumber daya alam baik pada wilayah pantai, sungai maupun dusun yang harus diwariskan terus secara turun temurun oleh klen (*taparu*). Karena ketergantungan yang sangat besar terhadap alam, maka alam juga disakralkan oleh orang Kamoro, seperti halnya pada suku Amungme. Tanah (*tapare*) diibaratkan seorang ibu (*enae tapare*) dan tanah itulah yang memberikan nafas kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu, orang Kamoro yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai anak yatim piatu yang selalu hidup murung tanpa daya. Karena kedudukannya yang suci itu, maka orang Kamoro tidak mengenal adanya jual-beli tanah. Tanah yang merupakan warisan leluhur harus dilestarikan dan diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Melepaskan hak atas tanah berarti memutus hubungan dengan tanah.<sup>175</sup>

Interaksi suku Kamoro dengan orang luar (Eropa dan Cina) sudah berlangsung sejak abad ke-17, karena pemukiman orang Kamoro yang ada di sekitar pantai sering didatangi atau sebagai tempat

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

singhah pedagang-pedagang dari berbagai negara. Pada tahun 1926 orang Kamoro mulai mengenal peradaban Barat, yaitu dengan masuknya misionaris gereja Katolik Roma yang mendirikan gereja di Kokonao.

Pada tahun 1930, perkampungan orang Kamoro yaitu Mimika diserang dan dihancurkan oleh orang Asmat. Peristiwa tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda mencoba melindungi orang Kamoro dengan membuat pemukiman menetap di sepanjang pantai dan memperkenalkan ekonomi uang dengan mengajari mereka berkebun karet, kopi, teh, kelapa dan tanaman perkebunan lainnya. Namun usaha Belanda ini gagal karena orang Kamoro lebih suka menjalani kehidupan tradisinya sebagai peramu. Mereka selalu berpindah tempat untuk menangkap sagu, berburu dan menangkap ikan.

Sebelum kedatangan Belanda dan misionaris, orang Kamoro hidup terpencar-pencar dan belum menetap. Pada waktu itu orang Kamoro dijuluki sebagai manusia perahu karena sebagian besar waktunya dihabiskan di perahu. Mereka juga melihat perahu sebagai benda yang sakral karena begitu besar jasanya kepada mereka.

Dalam hubungannya dengan tanah, pandangan orang Kamoro tidak jauh berbeda dengan orang Amungme. Beberapa hal yang mengandung persamaan adalah: pertama, mengibaratkan tanah dengan ibu; kedua, tidak mengenal hak milik perorangan melainkan hak ulayat

dan; ketiga, zona-zona penggunaan tanah. Orang Kamoro membagi zona penggunaan tanah menjadi tiga bagian, yaitu zona pemukiman/perkampungan, zona pertanian dan zona perkebunan atau zona penyangga.

Pemerintahan adat suku kamoro agak berbeda dengan suku Amungme, di mana pada suku Amungme struktur didasarkan pada penguasaan wilayah, sedangkan suku Kamoro membaginya berdasarkan bidang tugas. Di samping itu ada taparu yang bekerja berdasarkan wilayah kerja dan khusus mengatur serta mengawasi tanah adat atau hak ulayat.

Dilihat dari segi penguasaan wilayah, taparu identik dengan kepala klen, membawahi kampung-kampung kecil. Beberapa wilayah taparu digabung dalam kampung yang diketuai oleh Weyaiaku. Beberapa kampung digabung dalam desa yang umumnya tidak dikepalai oleh orang-orang yang berasal dari pejabat adat tetapi diambil dari luar struktur sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional.<sup>176</sup>

### 2. Posisi penduduk asli dalam perkembangan Timika

Sejak sebelum PTFI beroperasi, masyarakat Mimika secara internal termasuk masyarakat majemuk. Paling tidak ada tujuh suku besar beserta sub-sub sukunya, di mana suku terbesar adalah Kamoro dan Amungme. Di luar itu, ada pendatang dari kabupaten lain seperti Sorong, Merauke,

---

<sup>176</sup> *Bagan Susunan Pemerintahan Adat Suku Kamoro* dapat dilihat pada lampiran 20.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Fakfak dan ditambah dengan pendatang dari luar Irian Jaya seperti Makasar, Maluku, Jawa dan Batak. Kemajemukan ini semakin bertambah dengan beroperasinya PTFI. Dengan demikian, berbicara mengenai posisi penduduk asli dalam perkembangan PTFI dan Kota Timika sangat kompleks pula karena masing-masing kelompok masyarakat memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda yang dapat menghambat ataupun mendukung perkembangan PTFI dan Kota Timika.<sup>177</sup>

Di Timika ada tiga kelompok masyarakat, yaitu penduduk asli, pendatang di luar PTFI dan PTFI. Ketiganya saling berinteraksi namun arah sasarannya berbeda. Penduduk asli selalu menuntut hak-haknya yang merasa sebagai pemilik tanah, PTFI sebagai perusahaan berusaha mencari untung yang sebesar-besarnya dan masyarakat pendatang terbagi dua yaitu yang sekedar menumpang hidup sebagai transmigran dan pendatang non transmigran yang sudah tinggi kesadaran bisnisnya sehingga berorientasi pada perekonomian modern. Pendatang non transmigran inilah yang memainkan peran sebagai “mediator” di antara berbagai kelompok karena dengan cara itu mereka dapat hidup dan bertahan. Pendatang ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, pengacara dan LSM.<sup>178</sup>

Dilihat dari segi budaya, para pendatang sangat berbeda dengan penduduk asli terutama yang masih tinggal di pedesaan. Di samping

---

<sup>177</sup> Ngadisah, *Op. cit.*, hlm. 132.

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keanekaragaman adat istiadat yang dimiliki, mereka juga mempunyai cara berpikir yang lebih maju, wawasan luas dan daya kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu kehidupan ekonomi para pendatang pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan penduduk asli. Para pendatang yang bekerja di PTFI di samping memiliki gaji yang lebih terjamin juga mendapat fasilitas yang sangat memadai dari perusahaan, seperti rumah, asrama dan kendaraan bagi karyawan pada level tertentu. Kehidupan pendatang dan penduduk asli belum bisa membaur terutama dengan karyawan Freeport karena penjagaan lokasi yang sangat ketat dan tempat pemukiman yang terpisah jauh dari penduduk asli. Akibatnya, interaksi sosial tidak terbangun dan prasangka-prasangka sosial dan kecemburuan sosial dari penduduk asli makin kuat. Pola pemukiman seperti ini juga merupakan salah satu benih konflik antara penduduk asli dengan pihak Freeport.<sup>179</sup>

Gejala seperti itu tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi merupakan gejala umum yang sering terjadi pada proyek-proyek pertambangan besar. Harapan mendapatkan pekerjaan dari sektor pabrik di kalangan penduduk asli sangat besar, namun karena ketidakcocokan latar belakang pendidikan atau ketrampilan yang dimiliki menyebabkan penduduk asli yang diterima sangat sedikit dan ditempatkan sebagai tenaga kasar. Hal ini menimbulkan perasaan tersisih bagi penduduk asli, sehingga mereka menempatkan diri sebagai “*out group*”. Situasi ini memposisikan

---

<sup>179</sup> *Loc. cit.*

penduduk asli lebih banyak menjadi “penonton” daripada subyek yang aktif dalam perusahaan. Kalaupun ada aktivitas, umumnya penduduk asli bergerak pada posisi pinggiran, yaitu bekerja sebagai buruh harian atau menjadi *supplier* bahan makanan dari sektor pertanian dalam jumlah yang terbatas karena persyaratan mutu yang tinggi.<sup>180</sup>

Dalam kasus Freeport, karena alasan mutu, kesinambungan dan ketepatan waktu, penyediaan makanan untuk karyawan dilakukan oleh perusahaan dari Jakarta. Penyediaan bahan makanan dan kebutuhan lain oleh penduduk asli sangat terbatas jumlahnya. Menurut Kafiar seperti dikutip oleh Ngadisah, jumlah uang yang dibelanjakan oleh Freeport untuk membeli produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Mimika seperti sayur-mayur, daging, ikan, kayu olahan serta berbagai produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan putra daerah binaan PTFI, mencapai lebih dari delapan milyar rupiah pertahun.<sup>181</sup>

Kebijakan PTFI ini ternyata tidak mendapat respon sesuai yang diharapkan, karena masyarakat asli pada umumnya tidak menjaga kualitas dan kontinuitas produk atau tidak disiplin mengikuti bimbingan dari petugas PTFI. Hanya beberapa buah inkubator bisnis yang mampu bertahan sebagai supplier PTFI dari ratusan inkubator bisnis yang dibina oleh PTFI. Akibatnya, peluang-peluang yang sudah dibuka oleh PTFI diambil alih oleh para pendatang, bahkan melibatkan perusahaan-

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perusahaan besar dari Jakarta. Hal ini menyebabkan semakin tertinggalnya gerak langkah penduduk asli dibandingkan pendatang. Para pendatang nampaknya lebih siap dalam menangkap berbagai peluang bisnis mitra PTFI dibanding penduduk asli, sehingga kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli semakin lebar terutama dari segi ekonomi. Dengan kehadiran PTFI, struktur perekonomian di Kabupaten Mimika terdiri dari dua sistem (dualisme ekonomi). Pada satu sisi terdapat sektor pertanian berskala kecil beserta ekonomi peramu yang ditandai dengan tingkat produktivitas yang rendah, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Pada sisi yang lain terdapat aktivitas perekonomian modern, yang dijalankan oleh PTFI dengan ciri produktivitas tinggi dan berorientasi kepada pasar dunia.<sup>182</sup>

Kecuali transmigran, para pendatang umumnya bekerja pada sektor modern, baik yang bekerja pada PTFI maupun sektor perdagangan dan jasa. Keadaan di Mimika berbeda dengan migrasi di wilayah perkotaan, di mana pada umumnya kaum migran bekerja pada sektor informal, karena pendatang biasanya memiliki pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Migrasi yang terjadi karena industri besar dilakukan oleh orang-orang yang terampil, sedangkan urbanisasi justru sebaliknya. Pendatang yang bekerja pada sektor formal di Mimika nampak kurang intensif bergaul dengan penduduk asli, terutama dari karyawan PTFI. Para karyawan PTFI menghabiskan libur cutinya di daerah asal, sedangkan

---

<sup>182</sup> *Loc. cit.*

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akhir pekan dinikmati di rumah atau kota dalam lingkungan PTFI, yaitu Tembagapura dan Kuala Kencana. Sementara itu beberapa istri karyawan yang mempunyai keterampilan tertentu seperti memasak, menjahit, merajut dan bercocok tanam bergabung dalam satu kelompok pembina penduduk asli. Warga yang dibina adalah yang berada di sekitar Tembagapura, seperti penduduk asli di Desa Banti dan Waa.<sup>183</sup>

Dengan melihat berbagai situasi di atas, dalam perkembangan PT. Freeport dan Kota Timika penduduk asli berada di berbagai posisi atau peran. Secara langsung dan tidak langsung mereka berperan sebagai pendukung berkembangnya PT. Freeport dan Kota Timika, yaitu dengan kesediaannya memberikan tanahnya sebagai lahan pertambangan dan kegiatan lain yang mengikutinya. Sebagai subyek pembangunan dan tenaga kerja mereka juga sangat berperan dan mendukung dalam memajukan usaha PT. Freeport dan perkembangan Kota Timika. Tetapi di lain pihak mereka juga merupakan obyek atau sasaran dari perkembangan PT. Freeport dan Kota Timika itu sendiri, karena berbagai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Freeport dan Pemerintah ditujukan untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan penduduk asli. Di sisi lain penduduk asli juga dapat dikatakan sebagai penghambat perkembangan PT. Freeport dan Kota Timika, yaitu dengan keterbatasan intelektual dan keterampilan yang mereka miliki serta seringnya mereka mengajukan berbagai tuntutan yang berujung pada konflik dan perang. Dengan demikian jelas bahwa penduduk asli

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 145-147.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat dan obyek sekaligus subyek dalam perkembangan PT. Freeport dan Kota Timika.



**BAB V  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdirinya Kota Timika dilatarbelakangi oleh kedatangan bangsa Barat di Papua. Mereka menemukan sumber daya alam bahan tambang berupa tembaga. Temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat dengan mendirikan perusahaan tambang di Papua bernama PT. Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan di daerah yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya Freeport membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur di Timika, sehingga Timika yang semula adalah daerah pemukiman kecil suku Kamoro kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Proses berdirinya Kota Timika berjalan seiring dengan perkembangan Freeport, karena Freeport memegang peranan ekonomi yang sangat kuat. Aktivitas ekonomi para pendatang baru, pemerintah, Freeport sebagai sponsor utama dan kegiatan spontan penduduknya membuat Timika terus berkembang menjadi sebuah kota yang semakin modern. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berdirinya Kota Timika, baik faktor pendukung seperti ekologi, teknologi, politik dan ekonomi, maupun faktor penghambat seperti kondisi geografis dan sosial.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. PT. Freeport Indonesia di Papua ini membawa pengaruh bagi lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika. Bagi lingkungan fisik di sekitarnya kehadiran Freeport cenderung memberikan pengaruh negatif, yaitu semakin terkurasnya sumber daya alam yang tidak tergantikan. Di samping itu, limbah operasional Freeport juga menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan alam yang merusak ekosistem alam dan membahayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dampak operasional Freeport terhadap lingkungan fisik yang sangat kelihatan adalah terjadinya perubahan fisik geografis di wilayah Timika, yaitu berubahnya bentang alam gunung menjadi lubang raksasa. Sedangkan bagi masyarakat Kota Timika kehadiran Freeport cenderung memberikan pengaruh positif, yaitu memajukan perekonomian sampai pada skala nasional. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya para investor asing ke Papua dan berkembangannya kegiatan ekonomi kerakyatan di wilayah Timika. Secara khusus kehadiran Freeport membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat Timika, yaitu dari sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Selain itu kehadiran Freeport di Timika juga membawa perubahan struktur sosial dan perubahan kebudayaan. Sering terjadi benturan antara budaya modern yang dibawa Freeport dengan budaya tradisional yang dimiliki oleh penduduk asli di wilayah Timika yang berujung pada konflik. PTFI adalah produk budaya modern yang menghasilkan budaya perusahaan (*corporate culture*), sedangkan masyarakat sekitarnya adalah pelaku dan pencipta budaya tradisional

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bersumber dari masyarakat primordial. Ikatan mereka dengan alam, suku dan adat-istiadat sangat kuat. Kehadiran budaya modern di tengah-tengah masyarakat tradisional menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat setempat, baik yang bersumber dari kebijakan perusahaan maupun yang bersumber dari internal masyarakat. Masyarakat asli belum siap menerima perubahan apalagi dalam ritme yang demikian cepat karena dibawa oleh perusahaan raksasa yang bertaraf internasional. Dampak lain dari kehadiran PTFI adalah bertambah majemuknya masyarakat Mimika karena perusahaan banyak mendatangkan pekerja dari luar Mimika dan Irian Jaya. Perkembangan wilayah yang pesat karena kehadiran Freeport juga menarik pendatang lebih banyak lagi ke Mimika. Dengan demikian potensi konflik di daerah ini semakin besar, baik dalam bentuk perang suku maupun sengketa dalam bentuk lain terutama dengan penduduk yang dianggap “pendatang”. Dalam hubungannya dengan pendatang, dampak yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap sikap penduduk asli pada Freeport dan pegawai-pegawainya adalah adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Masyarakat asli yang belum memperoleh kesempatan memiliki rumah yang disediakan PTFI secara fisik sangat kontras penampilannya dengan kehidupan di Kuala Kencana dan Tembagapura yang merupakan duplikasi kota modern di Amerika Serikat.

3. Dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai tahun 2001 bila dilihat dari segi ekonomi, sosial, sarana dan prasarana fisik dan pemerintahan, pertumbuhan Timika menunjukkan kemajuan yang signifikan. Timika

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sekarang menjadi kota modern dengan status sebagai Ibukota Kabupaten Mimika sekaligus Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah. Perkembangan Timika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penduduk asli di wilayah ini juga memegang peranan yang penting dalam perkembangan Kota Timika. Mereka adalah suku Amungme dan Kamoro, di samping ada beberapa suku lain seperti Dani, Ekagi, Moni, Damal dan Sempan. Selain sebagai salah satu pihak pelaku atau tokoh pembangunan Kota Timika hingga berkembang seperti sekarang ini, mereka juga berstatus sebagai "pemilik" atau pemegang hak ulayat atas wilayah dimana Freeport beroperasi dan Timika tumbuh.

### **B. Saran**

Dengan melihat berbagai peristiwa yang terjadi dalam proses perkembangan Kota Timika, penulis memberikan saran bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi pembaca penelitian ini khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, agar bersedia memperdalam dan memperluas penelitian ini dengan penelitian lain yang relevan atau dengan metode dan pendekatan yang berbeda untuk memperkaya pengetahuan dan karya ilmiah tentang Kota Timika.
2. Bagi PT. Freeport Indonesia, agar bersikap lebih bijaksana dengan sistem bagi hasil yang adil terhadap bangsa Indonesia khususnya terhadap masyarakat sekitar sebagai pemilik bumi Papua. Selain itu juga agar terus

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengupayakan langkah-langkah meminimalisasi dampak operasional terhadap lingkungan alam sekitar sehingga tidak merusak ekosistem alam dan membahayakan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah, agar memperkuat atau memperbaiki sistem kontrol terhadap kegiatan Freeport dan berani menindak tegas setiap kesalahan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta tidak berpihak pada pihak manapun yang berkepentingan.
4. Bagi bangsa Indonesia, mari kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan pendidikan agar mampu mengelola kekayaan alam kita tanpa harus berbagi atau bergantung dengan bangsa lain!

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahab, Amirudin. 2003. *Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer*. Jakarta: ELSAM.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Beanal, Tom. 1996. *Amungme Magaboarat Negel Jombe-Peibei*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- , 2000. *PT. Freeport Indonesia dan Masyarakat Adat Suku Amungme*. Forum Lorentz.
- Bintarto, 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta: UP. Spring.
- , 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Budhisantoso, S., dkk., 1995. *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*. Jakarta: Depdikbud.
- , 1995. *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan: Kasus Gilimanuk-Jepara*. Jakarta: Depdikbud.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daldjoeni, N. 1982. *Seluk-beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota)*. Bandung: Alumni.
- Djopari, John R.G., 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Garnaut, Ross dan Chris Manning. 1997. *Irian Jaya the Transformation of a Melanesian Economy*. Canberra: Australian National University Press.
- , 1979. *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Giay, Benny. 2000. *Menuju Papua Baru*. Jayapura: Deiyai.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah; Penerjemah Noghroho Notosusanto*. Jakarta: UI Press.
- Herman Renwarin., dkk. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya dari Hollandia ke Kota Baru (1910-1963)*. Jakarta: Proyek IDSN Depdikbud.
- Khairuddin, H., 2000. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mealey, George A., 1996. *Grasberg*. Singapore: Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc.
- Nas, P.J.M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota Dalam Tiga Bagian*, Terj. & Ed. Sukanti Suryochondro. Jakarta: Bhratara karya Aksara.
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Petocz, Ronald G., 1987. *Konservasi Alam dan Perkembangan di Irian Jaya*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Poerwadarminta. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo. 1983. *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sartono Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sastrapratedja, M., dkk., 1986. *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sedyawati, Edi, dkk., 1997. *Tuban: Kota Pelabuhan di Jalan Sutra*. Jakarta: Depdikbud.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Soekanto, Soerjono. 1985. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.

-----, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudihantara, Y., *Ekologi Pemukiman dalam Perspektif Pembangunan: Pemukiman Berwawasan Lingkungan*. Semarang: Soegijapranata Catholic University Press.

Sumule, Agus (Ed.). 2003. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia.

Surjomihardjo, Abdurrachman. 2000. *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Ware, Caroline F. 1940. *The Cultural Approach to History*. New York: Kennikat Press, Inc.

Widjojo, Muridan S., 2001. *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Widja, I Gde. 1989. *Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.

### Dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2002 Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika Tahun 2002-2006*, Timika 2002.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 *Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya*, dalam Lembar Negara No. 38/1996 dan Tambahan Lembar Negara No. 3650.

SK Menteri Pertambangan No. 432/Kpts/M/Pertamb/1972 Mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999 *Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong*, dalam Lembar Negara No. 1999/173; Tambahan Lembar Negara No. 3894.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2000 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999*, dalam Lembar Negara No. 72/2000 dan Tambahan Lembar Negara No. 3960.

### Artikel:

Mansoben, J.R. 2004. Arti Sebuah Nama: Penggunaan Nama Papua Untuk Menggantikan Irian Jaya. Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXX, No. 1, Hal.1. Jakarta: LIPI.

*Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial*. Artikel Th. I No. 5 Juli 2002. [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org). Download jam 15.32 hari Jumat, 24 Juni 2005.

### Koran:

Darmawan, Cecep. Freeport dan Kerusakan Abepura. *Pikiran Rakyat*. 21 Maret 2006.

### Brosur:

Komitmen Untuk Masyarakat Papua. 2000. Timika: PTFI.

Orientasi K3. 2000. Timika: PTFI.

Profil Ringkas PTFI. 2000. Timika: PTFI.

PTFI General Induction. 1996. Singapore: Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc.

*Lampiran 1***MENTERI PERTAMBANGAN****REPUBLIK INDONESIA****SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN****No. : 423 / Kpts / M / Pertamb / 1972****TENTANG****PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN****DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI****MENTERI PERTAMBANGAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi sangat diperlukan usaha-usaha di bidang jasa-jasa pertambangan di luar minyak dan gas bumi.

b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Jasa Pertambangan di luar minyak dan gas bumi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

3. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo.

Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan.

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Dalam Negeri;.

4. Bedrijfreglementering Ordonantie 1934 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang penyaluran Perusahaan-perusahaan dan Peraturan-peraturan Pemerintah No.53 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan;
5. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 tentang Pembubaran Kabinet Ampera dan Pembentukan Kabinet Pembangunan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KETENTUAN TENTANG PERUSAHAAN JASA  
PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI**

Pasal 1

Istilah-istilah

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

(a) Usaha-usaha pertambangan :

ialah usaha-usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi

(b) Jasa-jasa pertambangan ialah jasa-jasa yang sebagai pemegang usaha-usaha pertambangan.

(c) Jasa-jasa pertambangan :

ialah perusahaan yang menjalankan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1967, termasuk perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha-usaha pertambangan baik dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri maupun penanaman Modal Asing.

(d) Perusahaan Jasa Pertambangan

ialah perusahaan baik dengan penanaman modal dalam Negeri maupun dengan modal asing, yang sesuai dengan Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934-jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957, bergerak di bidang pemberian jasa-jasa perusahaan pertambangan.

(e) Izin Usaha Pertambangan :

ialah idzin yang diberikan oleh Menteri Pertambangan cq. Pejabat Instansi yang ditunjuk, untuk dapat menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa-jasa pertambangan.

(f) Penanaman Moda Dalam Negeri:

ialah penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 6 tahun 1968. Jo. Undang-undang No. 12 tahun 1978.

(g) Penanaman Modal Asing:

ialah penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 1 tahun 1967 jo. Undang-undang No. 11 tahun 1970.

## Pasal 2

### Lapangan Usaha

Lapangan usaha perusahaan Jasa Pertambangan meliputi :

- (a) Pemetaan geologi dan eksplorasi mineral baik di darat, di laut, dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan.
- (b) Pengukuran tanah dan pemetaan umum dalam rangka kegiatan eksplorasi/eksploitasi mineral.
- (c) Pemboran baik dalam rangka eksplorasi mineral maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil.
- (d) Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas di lingkungan proyek-proyek pertambangan.
- (e) Usaha-usaha lainnya sejenis yang menurut pendapat Menteri Pertambangan dianggap langsung berhubungan dengan, serta menunjang usaha-usaha pertambangan termasuk antara lain pembuatan (manufacturing) alat-alat pertambangan.

## Pasal 3

### Perizinan

(1) Setiap perusahaan Jasa Pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 1, ayat (d) di atas, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Menteri Pertambangan cq. Pejabat yang ditunjuk, untuk mendapatkan idzin usaha pertambangan.

(2) Setiap perusahaan Jasa Pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 1, ayat (d) di atas, yang menjalankan usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing, diwajibkan mengikutsertakan modal nasional yang besarnya setiap kali ditetapkan oleh Menteri Pertambangan.

(3) Perusahaan di luar Perusahaan Jasa Pertambangan yang secara insidental menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa-jasa pertambangan, diwajibkan pula meminta izin terlebih dahulu.

#### Pasal 4

##### Pelanggaran

Tanpa mengurangi sanksi-sanksi yang dikenakan dalam rangka perundang-undangan tentang penanaman modal dan perundang-undangan lainnya, maka setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 dikenakan sanksi –sanksi sebagaimana termaksud dalam pasal 14 Bedrijfreglementerings Ordonantie 1934.

#### Pasal 5

##### Penggunaan Jasa-jasa Pertambangan

Perusahaan pertambangan hanya dibenarkan menggunakan jasa-jasa Perusahaan Jasa Pertambangan yang telah mendapat izin usaha pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan ini.

#### Pasal 6

##### Penugasan

Pemberian izin usaha pertambangan dan tata-usahnya serta pengaturan selanjutnya ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan.

#### Pasal 7

##### Ketentuan Peralihan

Perusahaan Jasa Pertambangan yang telah menjalankan usaha-usahnya sebelum dikeluarkan Surat Keputusan ini, diwajibkan mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan ini, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Keputusan ini.

#### Pasal 8

##### Penutup

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 1972

MENTERI PERTAMBANGAN

Cap tertanda

**(Prof.Dr.Ir.SOEMANTRI BRODJONEGORO)**

SALINAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH.

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan.
2. Sekretariat Negara
3. Gubernur Bank Sentral Sd. ID, DD, Pertambangan, DD, Migas.
4. Semua Biro, PTPKLN.
5. Direktorat Pertambangan

*Lampiran 2*

## Undang-<sup>2</sup>, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc.

---

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 54 TAHUN 1996 (54/1996)

Tanggal: 13 AGUSTUS 1996 (JAKARTA)

Sumber: LN 1996/38; TLN 3650

Tentang: PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA DI WILAYAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud dimasa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia maka pembangunan wilayah yang jauh dari jangkauan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak perlu ditangani dengan cara lebih mendekatkan upaya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sekitarnya melalui satuan administrasi pemerintahan yang lebih proporsional;
- c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan b, serta dalam rangka memacu pembangunan wilayah Mimika di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak maka wilayah Mimika dipandang perlu ditetapkan sebagai Kabupaten Mimika yang bersifat administratif;

Mengingat:



1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
3. Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya.

**BAB II****PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,**

## DAN IBUKOTA

## Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Kabupaten Mimika dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

## Pasal 3

(1) Wilayah Kabupaten Mimika meliputi wilayah sebagai berikut:

a. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak terdiri dari:

- 1) Kecamatan Mimika Barat;
- 2) Kecamatan Mimika Timur;
- 3) Kecamatan Agimuga.

b. Sebagian wilayah Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai terdiri dari:

- 1) Desa Singa;
- 2) Desa Hoya;
- 3) Desa Jila.

(2) Wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah-wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mimika Barat;
- b. Kecamatan Mimika Timur;
- c. Kecamatan Mimika Baru;
- d. Kecamatan Agimuga.

## Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai dikurangi dengan wilayah

Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

(1) Wilayah Kabupaten Mimika mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uwapa, Kecamatan Mapia, Kecamatan Kamu, Kecamatan Tigi, Kecamatan Paniai Timur dan Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sawaerma Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Ibukota Kabupaten Mimika berkedudukan di Kota Timika Kecamatan Mimika Baru.

Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Barat berkedudukan di Desa Kokonau.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Timur berkedudukan di Desa Wania.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Baru berkedudukan di Desa Kwamki.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Agimuga berkedudukan di Desa Kaliarma.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

##### Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Mimika dikepalai oleh seorang Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.

##### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang dan melaksanakan urusan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat atasnya.

##### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayahnya;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan masyarakat Kabupaten Mimika di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- d. meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali dan mengembangkan potensi di wilayahnya;
- e. menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat Kabupaten Mimika untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- f. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat atasnya.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN

#### PEMERINTAHAN

##### Pasal 11

(1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Mimika, dibentuk Sekretariat Wilayah, satuan kerja atau Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kedudukan dan kewenangan Instansi Vertikal di Kabupaten Mimika adalah setingkat dan sama dengan Instansi Vertikal pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

##### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan otonomi Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya di Kabupaten Mimika dapat dibentuk Suku Dinas Tingkat I.

## BAB V

### ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 13

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mimika ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 14

Pengaturan mengenai kepegawaian dan pembiayaan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri terkait, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika,

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya mengenai tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, Badan-badan Usaha Milik Daerah, Utang-piutang, perlengkapan kantor, arsip, dan dokumentasi, yang kegunaan dan keberadaannya ada di wilayah Kabupaten Mimika.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 16

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak tetap berlaku bagi Kabupaten Mimika sebelum diubah atau dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 78

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA DI WILAYAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

I. UMUM.

Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 50.592 Km<sup>2</sup>, geografis wilayah membujur dari barat ke timur, terletak dibagian selatan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, dalam rangka pembinaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih intensif kepada masyarakat, maka di kawasan bagian timur Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika yang meliputi tiga wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga dengan pusat kedudukan di Kota

Timika.

Meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika dan dalam rangka pembinaan, pengendalian, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah, sesuai dengan perkembangan kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya di wilayah, dipandang perlu Wilayah Kerja pembantu Bupati Fak-Fak di Mimika yang meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga serta ditambah dengan sebagian wilayah Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai terdiri dari Desa Singa, Desa Hoya dan Desa Jila dibentuk menjadi Kabupaten yang bersifat administratif yaitu Kabupaten Mimika.

Dibentuknya Kabupaten Mimika pada dasarnya telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor 01/KPTS/DPRD-FF/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak terhadap Pembentukan Kabupaten Mimika.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

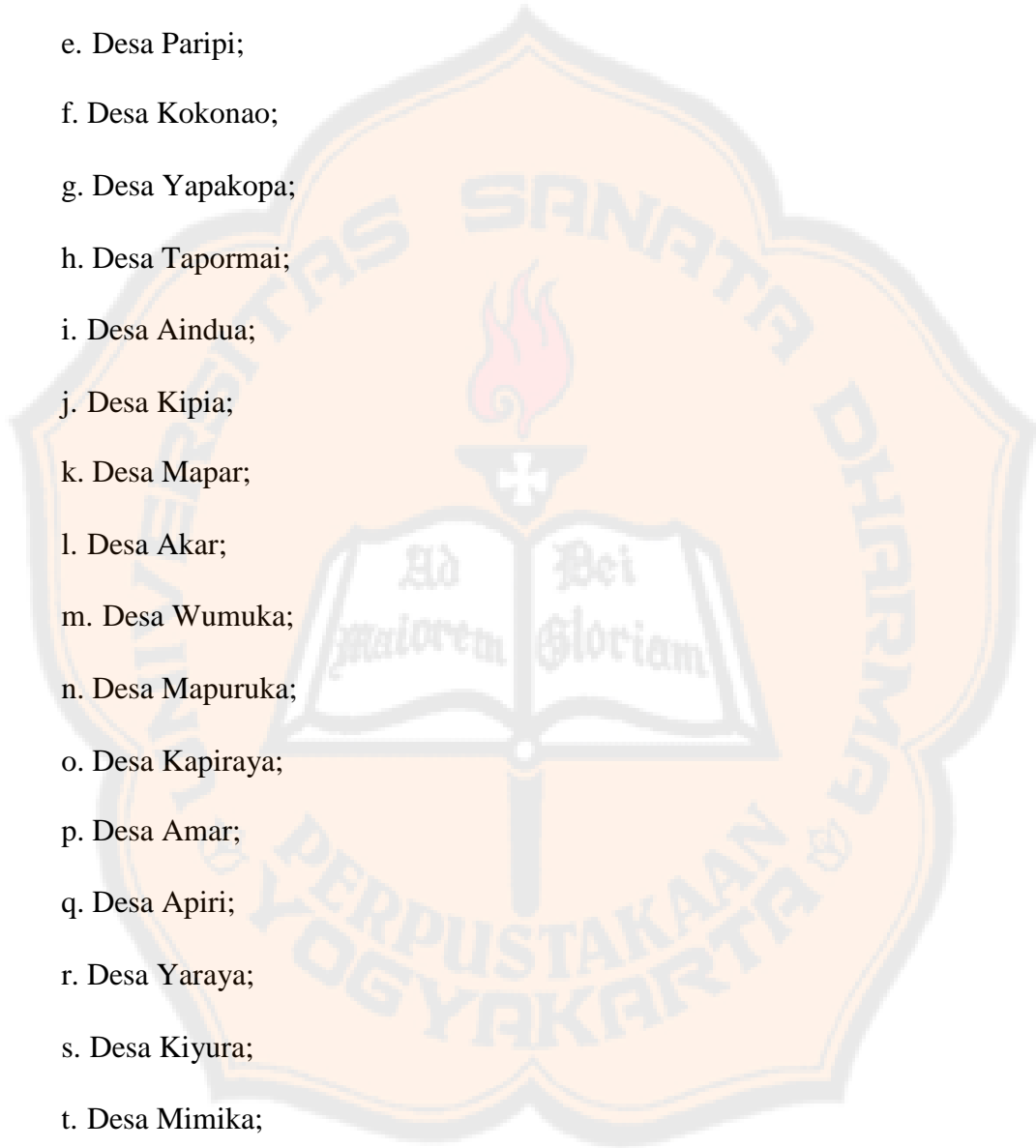
Jumlah Desa dan Kelurahan dimasing-masing Kecamatan setelah Kabupaten Mimika ditata dan ditetapkan menjadi 4 Kecamatan, menjadi sebagai berikut:

Wilayah Kecamatan Mimika Barat terdiri dari:

a. Desa Potoway Buru;



- b. Desa Umar;
- c. Desa Pronggo;
- d. Desa Uta;
- e. Desa Paripi;
- f. Desa Kokonao;
- g. Desa Yapakopa;
- h. Desa Tapormai;
- i. Desa Aindua;
- j. Desa Kipia;
- k. Desa Mapar;
- l. Desa Akar;
- m. Desa Wumuka;
- n. Desa Mapuruka;
- o. Desa Kampiraya;
- p. Desa Amar;
- q. Desa Apiri;
- r. Desa Yaraya;
- s. Desa Kiyura;
- t. Desa Mimika;
- u. Desa Migiwiya;
- v. Desa Kawar;
- w. Desa Manaware.



Wilayah Kecamatan Mimika Timur terdiri dari:

- a. Kelurahan Wania;
- b. Desa Kekwa;
- c. Desa Tiwaka;
- d. Desa Atuka;
- e. Desa Kamora;
- f. Desa Aikawapuka;
- g. Desa Mwapi;
- h. Desa Kaugapu;
- i. Desa Hiripau;
- j. Desa Tipuka;
- k. Desa Amamapare;
- l. Desa Pomako;
- m. Desa Omowita;
- n. Desa Ohotna;
- o. Desa Fanamo;
- p. Desa Iwaka.

Wilayah Kecamatan Mimika Baru terdiri dari:

- a. Kelurahan Tembagapura;
- b. Kelurahan Kwamki;
- c. Desa Tsinga;
- d. Desa Arwandop;

- e. Desa W a a;
- f. Desa Harapan;
- g. Desa Koperapoka;
- h. Desa Inaoga;
- i. Desa Naweripi;
- j. Desa Komoro Jaya;
- k. Desa Singa.

Wilayah Kecamatan Agimuga terdiri dari:

- a. Desa Kiliarma;
- b. Desa Amungun;
- c. Desa Aromsolki;
- d. Desa Fakafuku;
- e. Desa Newa;
- f. Desa Pafak;
- g. Desa Wenin;
- h. Desa Sumapro;
- i. Desa Wapu;
- j. Desa Hoya;
- k. Desa Jila.

Pasal 4

Dengan dikurangnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, dan wilayah hasil pengurangan tersebut menjadi Kabupaten Mimika, maka urusan Otonomi Daerah di wilayah dimaksud yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak diserahkan pula kepada

Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Mimika, Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Mimika ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Mimika, maka untuk mencapai daya-guna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, untuk dipergunakan bagi kepentingan Kabupaten Mimika.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan berupa penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Demikian pula halnya dengan Badan-badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Mimika, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Begitu juga mengenai utang-piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Mimika diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

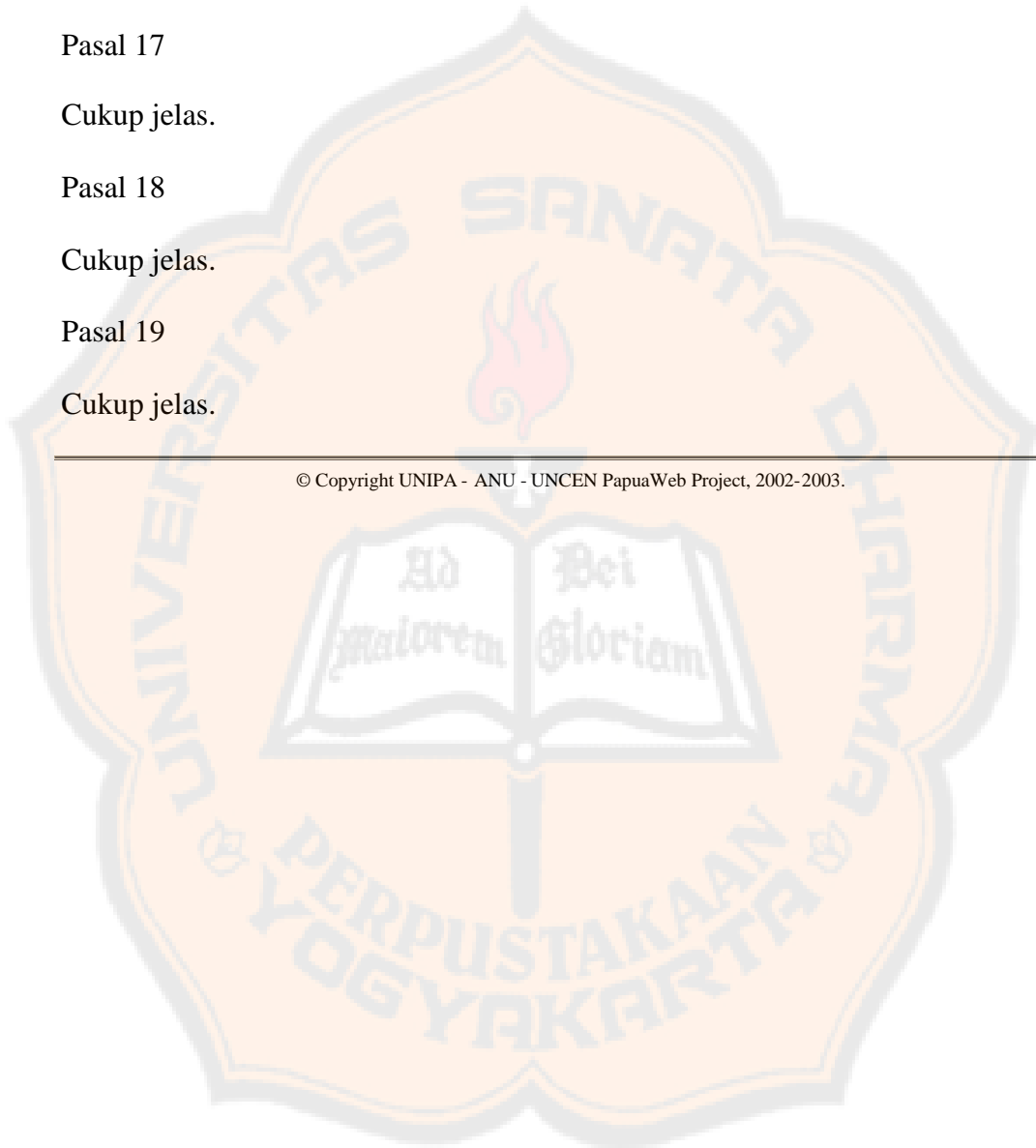
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



*Lampiran 3*

## Undang-<sup>2</sup>, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc.

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

• Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 45 TAHUN (45/1999)

Tanggal: 4 OKTOBER 1999 (JAKARTA)

Sumber: LN NO. 1999/173; TLN NO. 3894

Tentang: PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya masing-masing dibentuk menjadi Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong dibentuk menjadi Kota Sorong;

c. bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat;
- d. Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

#### Pasal 3

Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah:

- a. Kabupaten Biak Numfor;
- b. Kabupaten Yapen Waropen;
- c. Kabupaten Nabire;

d. Kabupaten Paniai; dan

e. Kabupaten Mimika.

Pasal 4

Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah:

a. Kabupaten Sorong;

b. Kabupaten Manokwari;

c. Kabupaten Fak-Fak; dan

d. Kota Sorong.

Pasal 5

Kabupaten Paniai terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Paniai Timur;

b. Kecamatan Paniai Barat;

c. Kecamatan Aradide;

d. Kecamatan Tigi;

e. Kecamatan Homcyo;

f. Kecamatan Sugapa;

g. Kecamatan Agisiga;

h. Kecamatan Bibida;

i. Kecamatan Tigi Timur;

j. Kecamatan Bogobaida; dan

k. Kecamatan Biandoga.

Pasal 6

Kabupaten Mimika terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Mimika Barat;
- b. Kecamatan Mimika Timur;
- c. Kecamatan Mimika Baru; dan
- d. Kecamatan Agimuga.

Pasal 7

Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Mulia;
- b. Kecamatan Ilaga;
- c. Kecamatan Ilu,
- d. Kecamatan Sinak;
- e. Kecamatan Beoga; dan
- f. Kecamatan Fawi.

Pasal 8

Kota Sorong terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Sorong Barat; dan
- b. Kecamatan Sorong Timur.

Pasal 9

(1) Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(2) Dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Mimika dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah Propinsi

Irian Jaya dihapus.

(3) Dengan dibentuknya Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Sorong dikurangi dengan Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Dengan dibentuknya Kota Sorong, Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten Sorong dihapus.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur.

Pasal 12

(1) Propinsi Irian Jaya Tengah mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya Barat.

(2) Propinsi Irian Jaya Barat mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah dan Teluk Cendrawasih;
- c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
- d. sebelah barat dengan Laut Seram dan Laut Halmahera.

(3) Kota Sorong mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Makbon dan Selat Dampir;

- b. sebelah timur dengan Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Aimas dan Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong; dan
- d. sebelah barat dengan Selat Dampir.

(4) Kabupaten Paniai mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Yapen Waropen;
- b. sebelah timur dengan Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Napan, Kecamatan Mapia, dan Kecamatan Kamu, Kabupaten Nabire.

(5) Kabupaten Mimika mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Uwapa, Kecamatan Mapia, dan Kecamatan Kamu, Kabupaten Nabire, Kecamatan Tigi, Kecamatan Tigi Timur dan Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai serta Kecamatan Ilaga dan Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Irian Jaya Timur;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Laut Arafuru; dan
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya Barat.

(6) Kabupaten Puncak Jaya mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Memberamo Tengah dan Kecamatan Memberamo Hulu, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya Timur serta Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Irian Jaya Tengah;
- b. sebelah timur dengan Kecamatan Karubaga dan Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya Timur;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Mimika Baru dan Kecamatan Agimuga, Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya Tengah; dan
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Sugana dan Kecamatan Paniai Timur

Kabupaten Paniai, Propinsi Irian Jaya Tengah.

(7) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(8) Penentuan batas wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 13

(1) Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Pemerintah Propinsi Irian Jaya Barat, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dan Pemerintah Kota Sorong wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

(1) Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah berkedudukan di Timika.

(2) Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat berkedudukan di Manokwari.

(3) Ibukota Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali.

(4) Ibukota Kabupaten Mimika berkedudukan di Timika.

(5) Ibukota Kabupaten Puncak Jaya berkedudukan di Mulia.

#### BAB III

## KEWENANGAN DAERAH

### Pasal 15

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.

(3) Kewenangan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Irian Jaya Barat dan Gubernur Irian Jaya Tengah selaku wakil Pemerintah.

### Pasal 16

(1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

## BAB IV

## PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 17

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dipilih dan disahkan seorang Bupati/Walikota dan seorang Wakil Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

(1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabupaten/Kota, dinas-dinas Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong terdiri atas:

a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Daerah masing-masing; dan

b. anggota ABRI yang diangkat.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur disesuaikan dengan jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya Timur setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.

(5) Dengan terbentuknya Kota Sorong jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sorong setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kota Sorong.

#### Pasal 21

(1) Pada saat terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat, untuk pertama kali diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.

(2) Pada saat terbentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Penjabat Bupati Kabupaten Paniai, Penjabat Bupati Kabupaten Mimika, Penjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya, dan Penjabat Walikota Sorong untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Irian Jaya Timur.

#### Pasal 22

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Gubernur Irian Jaya Timur dan Bupati Sorong sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing

menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sorong, yang berada dalam Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Kabupaten Sorong yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;

d. utang piutang Propinsi Irian Jaya Tengah yang kegunaannya untuk Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kota Sorong; dan

e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

#### Pasal 23

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

terhitung sejak diresmikannya pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur, berdasarkan pembagian hasil pendapatan yang diperoleh dari Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat.

(3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

(4) Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

(5) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan sebagai akibat pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

#### Pasal 24

Pembiayaan akibat perubahan nama Propinsi Irian Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Irian Jaya Timur.

#### Pasal 25

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Propinsi Irian Jaya Timur tetap berlaku bagi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Sorong tetap berlaku bagi Kota Sorong sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

#### Pasal 26

(1) Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ibukota sementara ditetapkan di Sorong.

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun, Ibukota Propinsi Irian Jaya Barat yang definitif telah difungsikan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttu.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR  
173

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN

JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA,

KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

#### I. UMUM

Propinsi Irian Jaya mempunyai wilayah seluas, yaitu 404.669 km persegi dengan geografis yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit dalam perkembangannya walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan masih diperlukan peningkatan. Propinsi Irian Jaya juga memiliki makna yang khas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna khas tersebut juga terdapat di dalam aspek dinamika budaya, struktur pranata adat istiadat, potensi wilayah, dan struktur sosial kemasyarakatan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi beserta lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

Perkembangan Propinsi Irian Jaya tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,41 % pertahun. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya berjumlah 1.436.439 jiwa dan pada 1998 meningkat menjadi 2.225.102 jiwa. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya.

Propinsi Irian Jaya memiliki sumber daya pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, serta memiliki prospek yang cukup baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, karena memiliki letak yang sangat strategis yaitu merupakan pintu gerbang ke arah lingkaran Pasifik.

Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya dan Kota Administratif Sorong dalam perkembangannya juga telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan penyesuaian struktur pemerintahan agar dapat mengimbangi beban tugas dan volume kegiatan yang terus meningkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1982, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya tanggal 10 Juli 1999, Nomor 10/DPRD/1999 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Terhadap Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Irian Jaya, maka Propinsi Irian Jaya perlu dimekarkan menjadi tiga Propinsi, yaitu dengan membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten Administrasi Puncak Jaya perlu dibentuk menjadi Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong dibentuk menjadi Kota Sorong.

Propinsi Irian Jaya Tengah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Propinsi Irian Jaya yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika, sedangkan Propinsi Irian Jaya Barat juga merupakan wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fak-Fak.

Untuk meningkatkan dan memperkuat peranan putra daerah asli Irian Jaya dalam formasi kepegawaian dan jabatan negeri, diberikan prioritas kepada putra daerah tersebut sedemikian rupa dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini bukan berarti bahwa putra daerah Irian Jaya lainnya yang telah memiliki ikatan sejarah perjuangan dan pengabdian dalam membangun Irian Jaya khususnya dan putra Indonesia pada umumnya diabaikan.

Di samping itu, hak adat dalam komunitas budaya suku-suku asli Irian Jaya, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi dan dijamin pengembangan serta



pemberdayaannya secara dinamis dan sejaras dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka pengembangan wilayah dan melihat potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang terutama untuk sarana dan prasarana, serta untuk kesatuan perencanaan, dan pembinaan wilayah, maka Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong harus benar-benar dioptimalkan dan ditata serta dikonsolidasikan mengenai jaringan sarana dan prasarana dalam satu sistem kesatuan pengembangan yang terpadu dengan Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten serta Kota yang ada di Propinsi Irian Jaya Timur, Propinsi Irian Jaya Tengah, dan Propinsi Irian Jaya Barat. Propinsi Irian Jaya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom

Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat setelah dibentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat dirubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Merauke. Selanjutnya dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Kabupaten Mimika yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, serta Kota Administratif Sorong yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 dihapus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Fasal 2

Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya.

Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya berasal dari Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, Kabupaten Mimika berasal dari Kabupaten Administratif Mimika yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, dan Kota Sorong berasal dari wilayah Kota Administratif Sorong yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

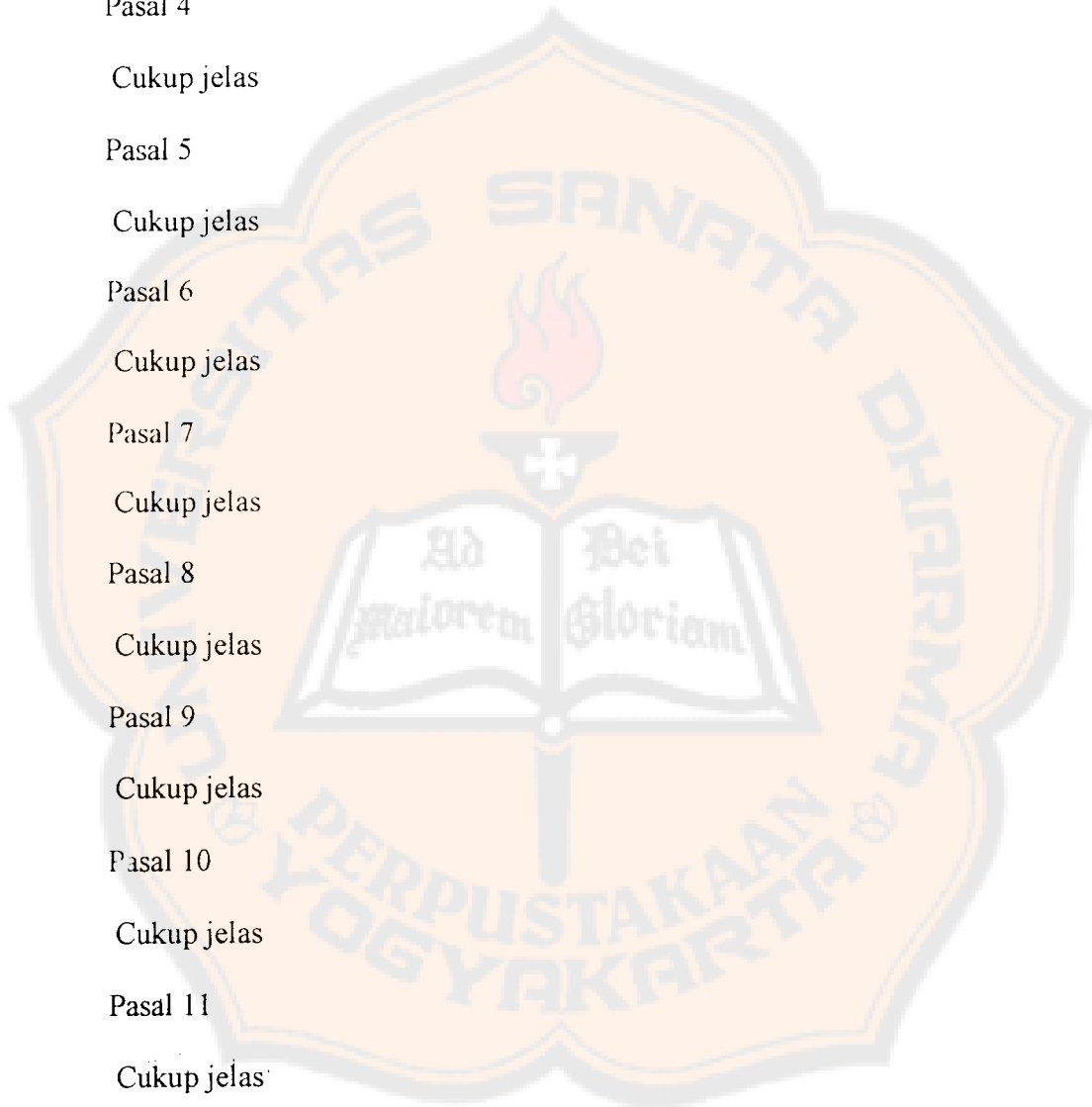
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)





Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (8)

Penentuan batas wilayah secara pasti antara Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Timur, Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, serta Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Nabire, serta Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Irian Jaya Tengah, Gubernur Irian Jaya Barat, dan Gubernur Irian Jaya Timur yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Timika sebagai ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah adalah sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Mimika.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Manokwari sebagai ibukota Propinsi Irian Jaya Barat adalah sebagian wilayah yang berada di Kabupaten Manokwari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Enarotali sebagai ibukota Kabupaten Paniai adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Paniai Timur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Timika sebagai ibukota Kabupaten Mimika adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Mimika Baru.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Mulia sebagai ibukota Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Mulia.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pembentukan dinas-dinas Propinsi dan lembaga teknis Propinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Propinsi.

Ayat (2)

Pembentukan dinas-dinas Kabupaten/Kota dan lembaga teknis Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/ Kota.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat melaksanakan tugas sampai dengan disahkan Gubernur Irian Jaya Tengah dan Gubernur Irian Jaya Barat hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Gubernur Irian Jaya Barat hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Barat.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Paniai, Penjabat Bupati Mimika, Penjabat Bupati Puncak Jaya, dan Penjabat Walikota Sorong melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati/Walikota masing-masing yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong,

Pasal 22

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Gubernur Irian Jaya Wilayah II dan III, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kota Administratif Sorong.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur kepada Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya, serta Kabupaten Sorong kepada Kota Sorong.

Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur yang kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya Timur masing-masing kepada Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Propinsi Irian Jaya Tengah, Pemerintah Propinsi Irian Jaya Barat, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya serta utang piutang Kabupaten Sorong yang kegunaannya untuk Kota Sorong diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong adalah terhitung sejak dilantikannya Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah, Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat, Penjabat Bupati Paniai, Penjabat Bupati Mimika, Penjabat Bupati Puncak Jaya, dan Penjabat Walikota Sorong.

Pelantikan Penjabat Gubernur Irian Jaya Tengah, Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat, Penjabat Bupati Paniai, Penjabat Bupati Mimika, Penjabat Bupati Puncak Jaya, dan Penjabat Walikota Sorong didahului dengan peresmian pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, masing-masing Gubernur yang bersangkutan wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

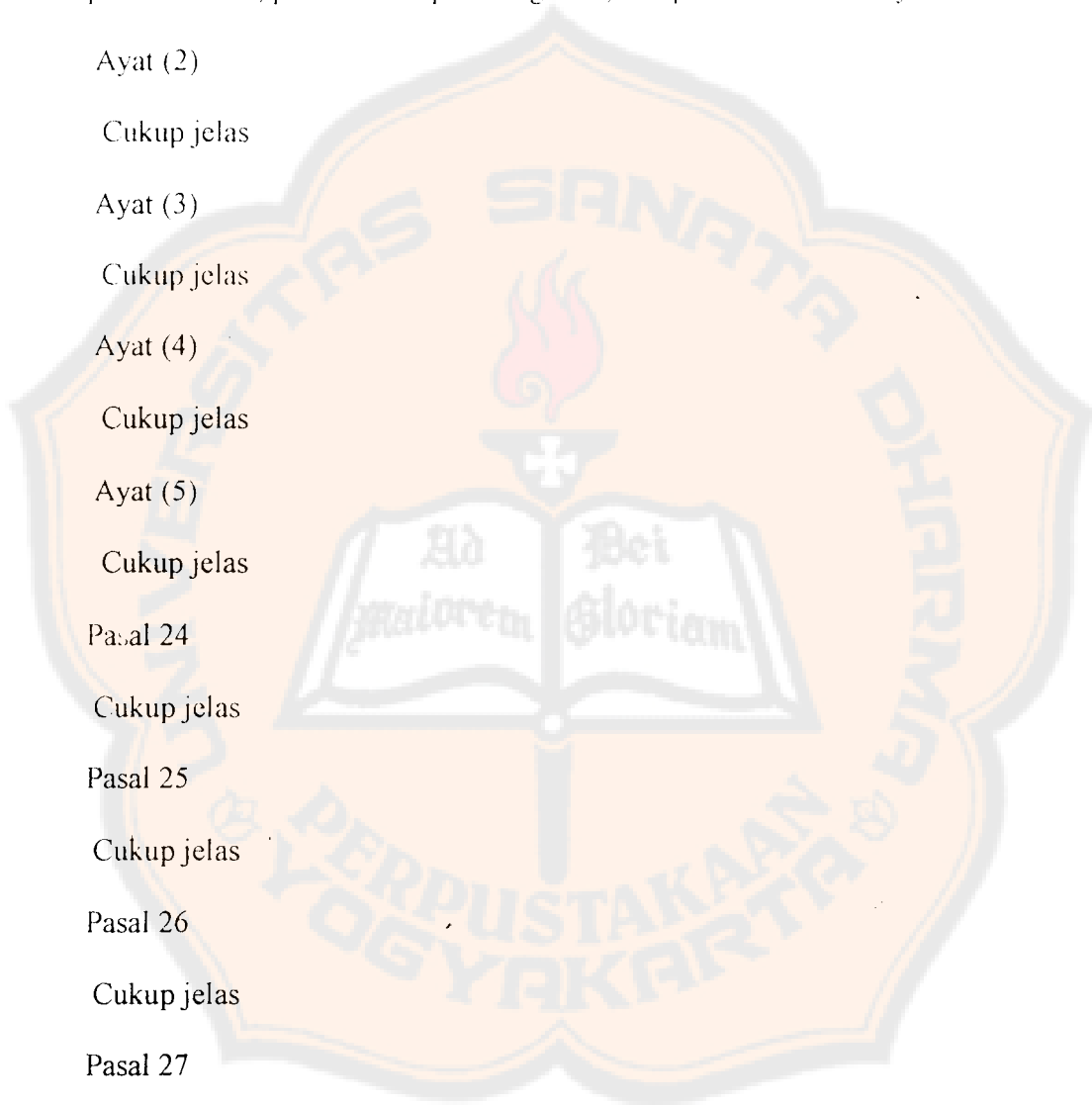
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
3894



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## *Lampiran 4*

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### **Menimbang:**

a. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, belum dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri pada beberapa kabupaten baru, serta situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, tidak dapat dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dengan Undang-undang;

#### **Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom nan Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20**

(1) Dengan terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong untuk pertama kali dilakukan dengan cara:

a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta

Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten

Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, serta di Kabupaten Sorong;

dan

b. pengangkatan dan anggota TNI/POLRI.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong tidak berubah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur, yang keanggotaannya mewakili kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong yang keanggotaannya mewakili kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Sorong, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Kota Sorong.

(5) Pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, dan Kota Sorong.

### **Pasal II**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

undang mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 72

Salman sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang - undangan II

ttd

Edy Sudiby

---

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH,  
PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN  
MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG**

## I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, telah ditetapkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum lokal dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmian daerah otonom tersebut untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum lokal yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, diperlukan sejumlah persyaratan, seperti kesiapan perangkat daerah, fasilitas pendukung, pembiayaan yang memadai, situasi keamanan daerah yang memungkinkan, serta terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Namun, Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tidak dapat dibentuk karena belum terbentuknya pengadilan tinggi di Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat serta pengadilan negeri di Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Sementara itu, Pemilihan Umum Tahun 1999 telah menghasilkan komposisi suara partai-partai politik peserta pemilihan umum yang mencerminkan aspirasi rakyat.

Berkenaan dengan itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong tidak dilaksanakan dengan pemilihan umum lokal, tetapi dengan menggunakan komposisi hasil perolehan suara partai-partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Sorong secara

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

proporsional.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasa II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
3960

Sumber (source): <http://www.indonesia.nl/>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 5

TABEL 2  
Pengeluaran, Penerimaan dan Defisit Irian Jajahan Belanda, 1950 — 61. (\$ juta)

Tahun	Pengeluaran	Penerimaan	Defisit
1950	10.1	5.8	4.4
1951	13.2	8.7	4.5
1952	16.4	11.2	5.2
1953	21.8	14.9	6.9
1954	26.3	14.4	11.9
1955	40.9	21.9	19.0
1956	36.4	16.2	20.3
1957	35.3	16.0	19.2
1958	34.0	15.9	18.1
1959	33.6	15.7	17.9
1960	40.2	16.7	23.7
1961	43.7	18.1	25.6

Sumber: Data-data mengenai anggaran untuk tahun 1950 sampai tahun 1959, dan anggaran-anggaran untuk tahun-tahun 1960 dan 1961 diambil dari A. Lijphart, *Trauma of Decolonization*, halaman 41.

TABEL 3  
Ekspor dan Impor, Irian Jaya 1954—1971.  
(\$ juta)

Tahun	Ekspor	Impor <sup>a)</sup>
1954	8.7	21.3
1958	7.9	24.1
1961	5.0	23.0
1963	3.1	14.9
1965	2.7	21.2
1967	2.1	7.9
1969	2.7	15.7
1971	2.8	30.2

a) Angka-angka impor untuk tahun-tahun belakangan, dan khususnya angka-angka untuk tahun 1971, kiranya di bawah yang sesungguhnya. Dalam angka-angka itu tidak termasuk impor beras oleh Bulog sebab lembaga ini tidak membedakan di antara persediaan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Juga tidak termasuk impor-impor sehubungan dengan proyek-proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa atau impor-impor atas nama kemiliteran. Dalam angka tahun 1971 dihitung impor oleh Freeport Indonesia melalui kapal laut. Tetapi tidak dihitung yang didatangkan dengan kapal udara.

Sumber: *Report on Netherlands New Guinea* (beberapa tahun); Departemen Perdagangan, "Neraca Perdagangan Luar Negeri Propinsi Irian Barat", Jayapura 1972.

Sumber: Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*, Jakarta, Gramedia, 1979, hlm. 20-21.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 6

**Tabel 1.** Jumlah desa dan keadaan alamnya di kecamatan Mimika Timur 1992.

Nama desa	Lingkungan Alam
1. Aaika Wapuka	Rawa-rawa
2. Nawaripi	Rawa-rawa
3. Mwapi	Rawa-rawa
4. Atuka	Rawa-rawa
5. Kaigapu	Rawa-rawa
6. Tipuka	Rawa-rawa
7. Amamapare	Rawa-rawa
8. Pomako	Rawa-rawa
9. Umowita	Rawa-rawa
10. Ohotia	Rawa-rawa
11. Fanano	Rawa-rawa
12. Iwaka	Rawa-rawa
13. Tiwaka	Rawa-rawa
14. Inauga	Rawa-rawa
15. Kamora	Rawa-rawa
16. Keakwa	Rawa-rawa
17. Hiripau	Tanah datar
18. Waia (kelurahan)	Tanah datar
19. Koprapoka	Tanah datar
20. Kwamki Baru	Tanah datar
21. Harapan	Tanah datar
22. Tembagapura	Pegunungan/tebing
23. Waa	Pegunungan/tebing
24. Tsinga	Pegunungan/tebing
25. Arwandop	Pegunungan/tebing

Sumber : Monografi Kecamatan Mimika Timur, 1992

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 12.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 2** Jumlah desa yang menjadi tanggung jawab perwakilan kecamatan Mimika Timur di Timika 1992.

Nama desa	Jumlah penduduk
1. Kwamki Baru	5.230
2. Koprapako	3.384
3. Inauga (perkiraan)*	500
4. Harapan	1.744
5. Tembagaapura	8.664
6. Tsinga	377
7. Waa	696
8. Arwandop	593
9. Satuan Pemukiman 1	1.604
10. Satuan Pemukiman 2	2.029
11. Satuan Pemukiman 3	1.444
12. Satuan Pemukiman 4	1.006
Perkiraan Jumlah total	27.271

Sumber : Monorafi kecamatan Mimika Timur 1992.

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 16.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 7

**Tabel 9** Perkembangan penduduk di kabupaten Fakfak 1982–1987.

Tahun	Jumlah
1982	67178
1983	67956
1984	72746
1985	72986
1986	75766
1987	84648

Sumber : Kabupaten Fakfak dalam angka 1987

**Tabel 3** Penduduk di Fakfak menurut jenis kelamin per kecamatan di kabupaten Fakfak 1987.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1. Kaimana	5.626	5.630	11256	13
2. Fakfak	14.760	12.107	26867	32
3. Mimika Barat	3.463	3.306	6658	8
4. Mimika Timur	14.415	8.737	23152	27
5. Kokas	3.545	2.477	7022	8
6. Teluk arguni	2.121	2.058	4179	5
7. Teluk Etna	1.548	1.510	3058	4
8. Akimuga	1.333	1.012	2345	3
Total	46.811	37.837	2345	3

Sumber : Kabupaten Fakfak dalam angka 1987

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 17 & 28.

**Tabel 10 Perkembangan penduduk di kecamatan Mimika Timur 1987 s/d 1992**

Jenis Kelamin	1992	1997
Laki-laki	22.387	14.415
Perempuan	12.306	8.737
Jumlah	34.693	23.152

Sumber : Monografi kecamatan Mimika Timur 1992

**Tabel 11 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Mimika Timur.**

Jenis pekerjaan	Jumlah	%
Peladang/peramu	20474	69
Petani transmigran	3471	
Karyawan	7981	23
Pedagang		
Pegawai negeri/ABRI	2776	08
Jumlah	34702	100

Sumber : Monograafi kecamatan Mimika Timur 1992

**Tabel 12 Jumlah penduduk berdasarkan persebaran wilayah perkotaan dan pedesaan di kecamatan Mimika Timur.**

Penduduk perkotaan	17278
Penduduk pedesaan	17415
Jumlah	34693

Sumber : penelitian 1992

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 28-29.

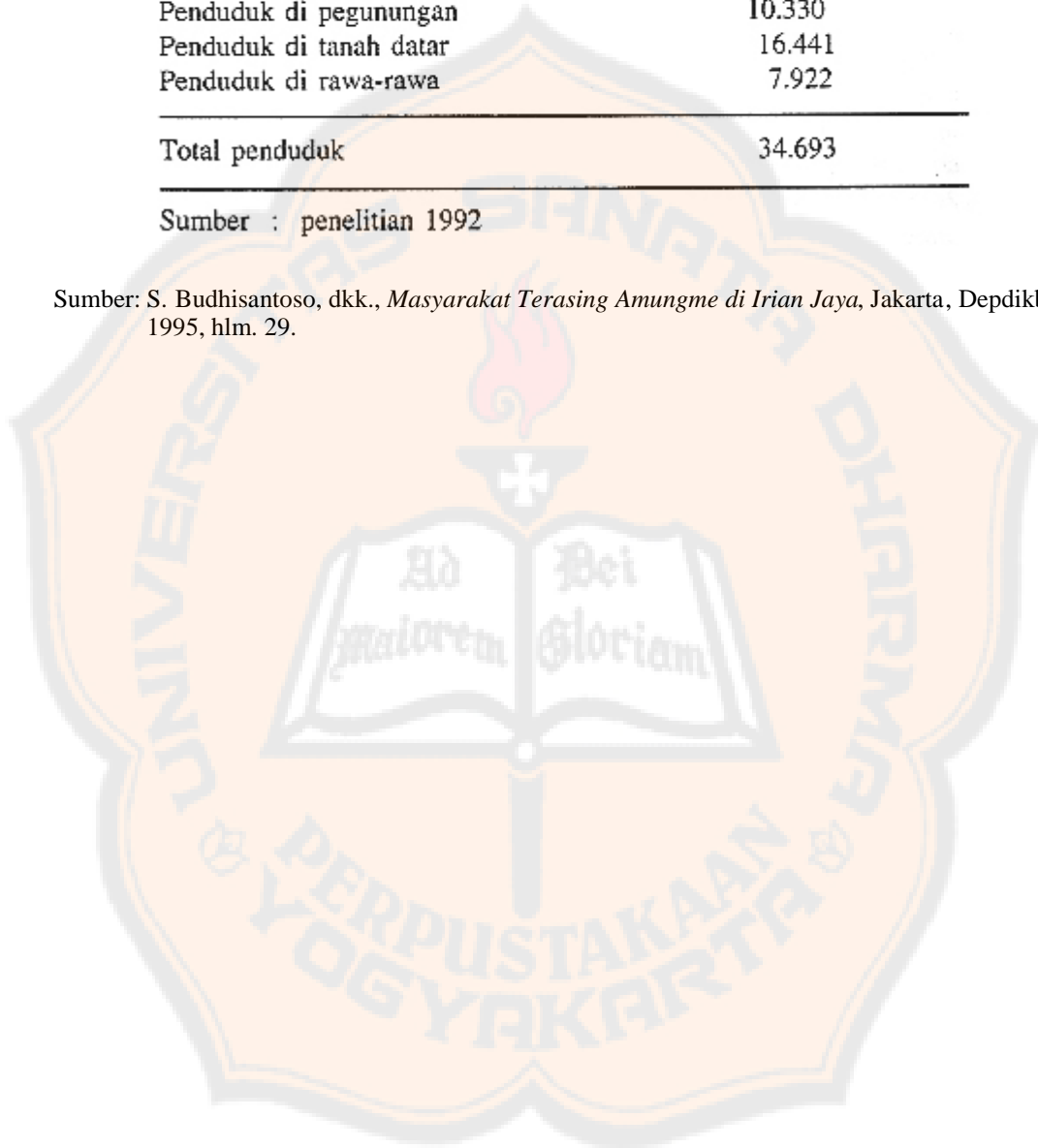
## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 13** Jumlah penduduk berdasarkan lingkungan alamnya di kecamatan Mimika Timur

Lingkungan	Jumlah
Penduduk di pegunungan	10.330
Penduduk di tanah datar	16.441
Penduduk di rawa-rawa	7.922
Total penduduk	34.693

Sumber : penelitian 1992

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 29.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 8

**Tabel 4 Kantor pemerintahan tingkat pembantu bupati di kecamatan Mimika Timur 1992.**

Nama kantor	Nama Departemen
1. Kantor Dikbud	Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kantor UPT	Transmigrasi
3. Kantor Departemen	Tenaga Kerja
4. Kantor Imigrasi	Kehakiman
5. Kantor Perindustrian	Perindustrian
6. Kantor Syahbandar	Perhubungan
7. Kantor Statistik	Statistik
8. Kantor BKKBN	BKKBN
9. Kantor Urusan Agama	Agama
10. Kantor Bea dan Cukai	Kehakiman
11. Kantor Kepala Pelabuhan	Perhubungan
12. Kantor Juru Penerbang	Penerangan
13. Kantor Meteorologi	Perhubungan

Sumber : Monografi Kecamatan Mimika Timur

**Tabel 6 Jumlah fasilitas perdagangan di kecamatan Mimika Timur 1992.**

Jenis	Jumlah	%
Toko	10	7.04
Kios	130	91.55
Pasar	2	1.41
Jumlah	142	100.00

Sumber : Kecamatan Mimika Timur 1992

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 17 & 22.

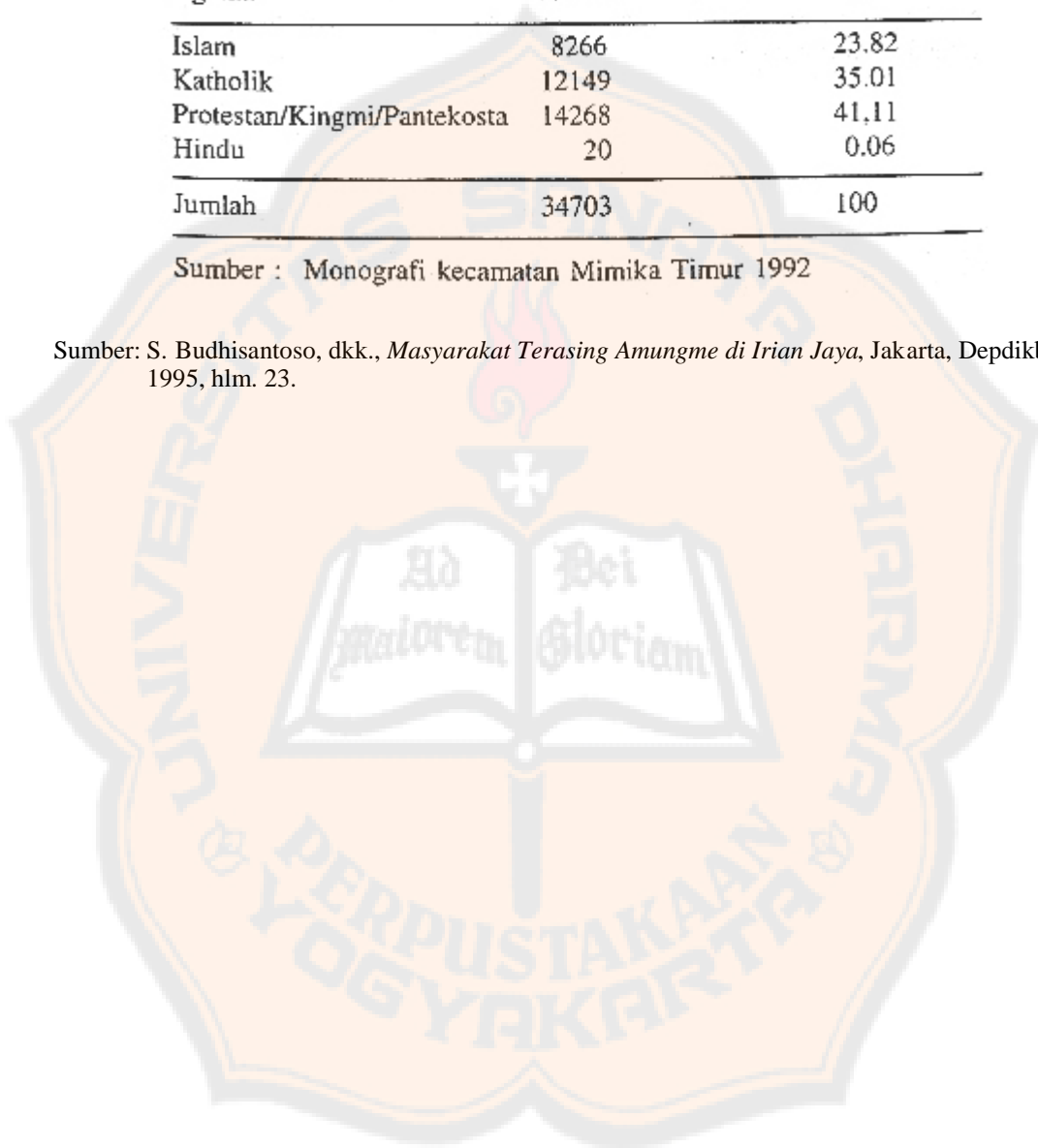
*Lampiran 9*

**Tabel 7** Jumlah penduduk berdasarkan Agama di kecamatan Mimika Timur 1992.

Agama	Jumlah	%
Islam	8266	23.82
Katholik	12149	35.01
Protestan/Kingmi/Pantekosta	14268	41.11
Hindu	20	0.06
Jumlah	34703	100

Sumber : Monografi kecamatan Mimika Timur 1992

Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 23.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 10

**Tabel 8 Fasilitas Sekolah Dasar di Kecamatan Mimika Timur 1992.**

Nama Sekolah	Jumlah	%
1. SD. Inpres Mapuru Jaya	71	
2. SD. Inpres Kwmki II	337	
3. SD. Inpres Kwmki I	276	
4. SD. Inpres Koprapoka	290	
5. SD. Inpres Sempan Barat	149	
6. SD. Inpres Timika I	391	
7. SD. Inpres Timika II	252	
8. SD. Inpres Timika III	330	
9. SD. Inpres Timika IV	182	
10. SD. Inpres Pomako	77	
11. SD. YPPK Kekwa *	144	
12. SD. YPPK Timuka	171	
13. SD. YPPK Atuka	112	
14. SD. YPPK Mioko	86	
15. SD. YPPK Iwaka	64	
16. SD. YPPK Waonarapi	225	
17. SD. YPPK Hiripau	100	
18. SD. YPPK Kaukapu	67	
19. SD. YPPK Mware	99	
20. SD. YPPK Tipuka	48	
21. SD. YPPK Manasari	56	
22. SD. YPPK Tembagapura	401	
23. SD. YPJ Portsite **	61	
24. SD. YPPK Aikowapuka	86	
25. SD. YPPK Otakwa	82	
26. SD. Inpres Tsinga	272 ***	
Jumlah murid tercatat	4.329	

Sumber : Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mimika Timur 1992.

Keterangan :

\* Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik

\*\* Yayasan Persekolahan Jayawijaya

\*\*\* Hanya sampai kelas III



Sumber: S. Budhisantoso, dkk., *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*, Jakarta, Depdikbud, 1995, hlm. 25.

**Lampiran 11**

PEMERINTAHAN/Government

39

Tabel/Table 2.1  
 Nama Kabupaten/Kota, Ibukota Kabupaten/Kota,  
 Jumlah Kecamatan dan Desa di Papua  
*Names of Regency/Municipality Capitals of Regency/Municipality  
 Number of District and Villages in Papua  
 2002*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ibukota Capital	Jumlah Kecamatan Number of District	Jumlah Desa/Kelurahan		Jumlah Total
			Desa/Village	Kelurahan Urban Village	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
01. Merauke	Merauke	23	510	9	519
02. Jayawijaya	Wamena	28	678	5	683
03. Jayapura	Jayapura	24	257	9	266
04. Paniai	Enatotali	9	147	9	156
05. Puncak Jaya	Mulia	8	154	7	161
06. Nabire	Nabire	17	384	4	388
07. Fak - Fak	Fak Fak	17	550	11	561
08. Mimika	Timika	8	168	6	174
09. Sorong	Sorong	12	217	8	225
10. Manokwari	Manokwari	6	144	-	144
11. Yapen Waropen	Serui	11	257	-	257
12. Biak Numfor	Biak	12	76	6	82
<b>Kota/Municipality</b>					
71. Jayapura	Jayapura	4	13	18	31
72. Sorong	Sorong	2	-	14	14
<b>Jumlah/Total</b>		<b>181</b>	<b>3 555</b>	<b>106</b>	<b>3 661</b>
		<b>173</b>	<b>3 255</b>	<b>106</b>	<b>3 361</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
 Source Bureau of Village Administration of Papua Province

Papua Dalam Angka/Papua in Figures 2002

Sumber: <http://www.papua.org/datapenduduk-nakerpapua/>  
 Download jam 19.33 hari Rabu, 8 Juni 2005

Tabel /Table 2.2  
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan UPT di Papua  
*Number of District, Village and UPT in Papua*  
2002

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Banyaknya Kecamatan <i>Number of District</i>	Banyaknya Desa/ Kelurahan <i>Number of Village</i>
(1)	(2)	(3)
<i>Kabupaten/Regency</i>		
01. Merauke	23	519
02. Jayawijaya	28	683
03. Jayapura	24	266
04. Paniai	9	156
05. Puncak Jaya	8	161
06. Nabire	17	388
07. Fak - Fak	17	561
08. Mimika	8	174
09. Sorong	12	225
10. Manokwari	6	144
11. Yapen Waropen	11	257
12. Biak Numfor	12	82
<i>Kota/Municipality</i>		
71. Jayapura	4	31
72. Sorong	2	14
Jumlah/Total		
2002	181	3 661
2001	173	3 461
2000	173	3 361
1999	173	2 803
1998	173	2 803

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
*Source : Bureau of Village Administration of Papua Province*



Tabel/Table 2.3  
 Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan  
 dan Jumlah Desa/Kelurahan di Papua  
*Names of District and Number of Villages in Papua  
 2002*

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Districts Capital</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. MERAUKE	1. Merauke	Merauke	53
	2. Warokpo	Warokpo	16
	3. Pantai Kasuari	K a m u r	35
	4. Okaba	O k a b a	23
	5. Sawaerma	Erma Sona	36
	6. Agats	A g a t s	9
	7. Assue	E c i	15
	8. Atsy	A t s y	22
	9. Citakmitak	Senggo	24
	10. Edera	B a d o	30
	11. Jair	C.tentiri	10
	12. Kimaan	Kimaan	32
	13. Kouh	K o u h	27
	14. Mandobo	Tanah Merah	13
	15. Mindiptana	Mindiptana	22
	16. Muting	Muting	27
	17. Nambiomani Bapai	M u r	23
	18. Obaa	Keppi	27
	19. Kurik	Kurik	20
	20. Fayit	Fayit	12
	21. Akat	Akat	9
	22. Haju	Haju	18
	23. Suator	Suanor	16

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
*Source Bureau of Village Administration of Papua Province*

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Districts Capital	Jumlah Desa/Kelurahan Number of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)
2 JAYAWIJAYA	1. Oksibil	Mibilabol	16
	2. Tiom	Bokon	58
	3. Bokondim	Bokondim	22
	4. Kurua	Obolma	37
	5. Wamena	Wamena	31
	6. Kurulu	Jiwika	17
	7. Asologama	Kimbim	24
	8. Makkai	Makkai	22
	9. Karubaga	Karubaga	40
	10. Kiwitok	Polobakon	22
	11. Okbibab	Abmisital	15
	12. Ketitia	Ketitia	34
	13. Iwur	Iwur	13
	14. Kenyam	Kenyam I	11
	15. Mapenduma	Jigil	14
	16. Pirime	Pirime	41
	17. Kobakma	Kobakma	18
	18. Ninia	Ninia	21
	19. Apalapsili	Apalapsili	13
	20. Anggruk	Yahofikma	33
	21. Hubikosi	Hubikosi	17
	22. Abenaho	Abenaho	10

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province

PEMERINTAHAN/*Government*

43

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/*Continued*

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Districts Capital</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2. JAYAWIJAYA	23. Gamelia	Gamelia	22	
	24. Kanggime	Kanggime	40	
	25. K e m b u	K e m b u	35	
	26. B a t o m	B a t o m	9	
	27. B o r m e	B o r m e	14	
	28. Bolakme	Bolakme	34	
	3. JAYAPURA	1. Nimboran	Genyem	22
		2. Membramo Hilir	Membramo Hilir	7
3. Membramo Tengah		Membramo Tengah	16	
4. S a r m i		S a r m i	12	
5. Membramo Hulu		Membramo Hulu	14	
6. S e n t a n i		S e n t a n i	15	
7. D e p a p r e		D e p a p r e	11	
8. D e m t a		D e m t a	12	
9. A r s o		A r s o	20	
10. W a r i s		W a r i s	6	
11. S e n g g i		S e n g g i	5	
12. W e b		W e b	7	
13. K e m t u k G r e s i		S a w o i	15	

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
*Source Bureau of Village Administration of Papua Province*

*Papua Dalam Angka/Papua in Figures 2002*

Sumber: <http://www.papua.org/datapenduduk-nakerpapua/>  
Download jam 19.33 hari Rabu, 8 Juni 2005

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Districts Capital</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
3. JAYAPURA	14. Kaureh	L a p u a	16
	15. Unurum Guay	Unurum Guay	5
	16. Bonggo	Bonggo	8
	17. Pantai Timur	Pantai Timur	11
	18. Tor Atas	Tor Atas	5
	19. Pantai Barat	Arbais	17
	20. Nimbokrang	Nimbokrang	8
	21. Sentani Barat	Maribu	11
	22. Sentani Timur	Sentani	7
	23. Skamoto	Jayapura	6
	24. Kemtuk	Sama	10
4. PANIAI	1. Paniai Timur	Paniai Timur	77
	2. Paniai Barat	Paniai Barat	24
	3. Aradida	Aradide	21
	4. Tigi	Tigi	38
	5. Homeyo	Homeyo	19
	6. Sugapa	Sugapa	18
	7. Bibida	Bibida	11
	8. Bogobaida	Bogobaida	11
	9. Tigi Timur	Damabagata	13
	10. Biandoga	Bagatadi	11
	11. Agisiga	Unabundopa	14

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Districts Capital</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
5. PUNCAK JAYA	1. Mulia	Mulia	26
	2. Ilaga	Ilaga	27
	3. Ilu	Ilu	33
	4. Sinak	Sinak	25
	5. Beoga	Beoga	22
	6. Fawi	Fawi	11
6. NABIRE	1. Nabire	Nabire	17
	2. Napan	Napan	18
	3. Yaur	Yawur	8
	4. Kamu	Kamu	29
	5. Mapia	Mapia	22
	6. Uwapa	Topo	18
	7. Wanggar	Bumi Mulia	13
	8. Ikrar	Idakebo	19
	9. Sukikai	Apogomakija	12
7. FAK FAK	1. Kaimana	Kaimana	21
	2. Fak-fak	Fak-fak	20
	3. Kokas	Kokas	45
	4. Teluk Arguni	Teluk Arguni	31
	5. Teluk Etna	Teluk Etna	9
	6. Buruway	Kambala	10
	7. Fak-fak Barat	Werba	7
	8. Fak-fak Timur	Tunas gain	16

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Districts Capital	Jumlah Desa/Kelurahan Number of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)
8. MIMIKA	1. Agimuga	Agimuga	4
	2. Mimika Barat	Mimika Barat	10
	3. Mimika Timur	Mimika Timur	8
	4. Mimika Baru	Mimika Baru	10
	5. Jita	Jita	5
	6. Jila	Jila	8
	7. Ayuka	Ayuka	5
	8. Mimika Tengah	Mimika Tengah	5
	9. Kuala Kencana	Kuala Kencana	5
	10. Tembagapura	Tembagapura	9
	11. Mimika Barat Jauh	Mimika Barat Jauh	5
	12. Mimika Barat Tengah	Mimika Barat Tengah	8
9. SORONG	1. Aitinyo	Aitinyo	36
	2. Teminabuan	Teminabuan	44
	3. Ayamaru	Ayamaru	37
	4. Makbon	Makbon	10
	5. Moraid	Moraid	10
	6. Sausapor	Sausapor	18
	7. Berau	Berau	14
	8. Salawati	Katinim	17
	9. Seget	Seget	14
	10. Misool	Misool	22
	11. Waigeo Utara	Kabare	16
	12. Waigeo Selatan	Saonek	35
	13. Inanwatan	Inanwatan	34
	14. Aifat	Aifat	37
	15. Aimas	Aimas	11

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province

Papua Dalam Angka/Papua in Figures 2002

Sumber: <http://www.papua.org/datapenduduk-nakerpapua/>  
Download jam 19.33 hari Rabu, 8 Juni 2005

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Districts Capital</i>	Jumlah Desa/Kelurahan <i>Number of Villages</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
9. SORONG	16. Sawiat	Wenslolo	16
	17. Samate	Samate	13
10. MANOKWARI	1. Manokwari	Manokwari	99
	2. Ransiki	Ransiki	33
	3. Babo	Babo	26
	4. Bintuni	Bintuni	23
	5. Warmare	Warmare	17
	6. Amberbaken	Saokorem	14
	7. Oransbari	Oransbari	17
	8. Windesi	Windesi	11
	9. Wasior	Wasior	38
	10. Kebar	Kebar	11
	11. Anggi	Anggi	38
11. YAPEN WAROPEN	1. Merdey	Merdey	34
	2. Masni	Sumber Boga	44
	3. Aranday	Aranday	12
	4. Prafi	Prafi Mulia	15
	5. Manyambouw	Manyambouw	103
	6. Surerey	Surerey	37
11. YAPEN WAROPEN	1. Yapen Selatan	Serui	22
	2. Waropen Bawah	Waren	30
	3. Waropen Atas	Barapasi	21
	4. Yapen Barat	Ansus	14
	5. Yapen Timur	Dawai	35

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province

Papua Dalam Angka/Papua in Figures 2002

Sumber: <http://www.papua.org/datapenduduk-nakerpapua/>  
Download jam 19.33 hari Rabu, 8 Juni 2005

Tabel/Table 2.3  
Lanjutan/Continued

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Districts Capital	Jumlah Desa/Kelurahan Number of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)
11. YAPEN WAROPEN	5. Angkaisera	Menawi	26
	6. Masirei	Urato	12
	7. Poom	Poom II	14
12. BIAK NUMFOR	1. Biak Utara	Korem	18
	2. Biak Timur	Bosnik	30
	3. Biak Kota	Biak Kota	15
	4. Numfor Barat	Kameri	18
	5. Numfor Timur	Yenburwo	15
	6. Supiori Selatan	Korido	20
	7. Supiori Utara	Sabar Miokre	16
	8. Biak Barat	Wardo	28
	9. Warsa	Warsa	22
	10. Padaido	Wundi	19
	11. Yendiori	Adoki	14
	12. Samofa	Samofa	10
71. KOTA JAYAPURA	1. Jayapura Utara	Jayapura Utara	7
	2. Jayapura Selatan	Jayapura Selatan	8
	3. Abepura	Abepura	9
	4. Muara Tami	Skow Mabo	7
71. KOTA SORONG	1. Sorong Timur	Sorong	9
	2. Sorong Barat	Rufei	5

Sumber : Biro Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah Provinsi Papua  
Source : Bureau of Village Administration of Papua Province



Tabel/Table 2.4  
 Banyaknya Desa menurut Klasifikasi Desa  
 dan Kabupaten/Kota di Papua  
*Number of Village by Regency/Municipality  
 and Classification in Papua  
 2000*

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	Klasifikasi/Classification			Jumlah Total
	Swadaya Self Effort	Swakarya Self Product	Swasembada Self Supporting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
01. Merauke	415	95	9	519
02. Jayawijaya	635	41	7	683
03. Jayapura	90	158	18	266
04. Paniai	136	-	-	136
05. Puncak Jaya	144	-	-	144
06. Nabire	105	34	10	149
07. Fak Fak	81	70	10	161
08. Mimika	77	5	-	82
09. Sorong	230	83	3	316
10. Manokwari	391	63	11	465
11. Yapen Waropen	86	80	4	170
12. Biak Numfor	468	45	12	225
<i>Kota/Municipality</i>				
71. Jayapura	7	2	22	31
72. Sorong	-	-	14	14
<b>Jumlah/Total 2000</b>	<b>2 565</b>	<b>676</b>	<b>120</b>	<b>3 361</b>

Sumber : Kantor Pembangunan Desa Provinsi Papua  
 Source Office of Village Development of Papua Province

Tabel/Table 2.5  
 Banyaknya Desa/Kelurahan dan Alokasi lapres  
 Bantuan Pembangunan Desa Provinsi Papua  
*Number of Village and Allocation of Development  
 Project Aid in Papua (000 Rp)  
 2000/2001*

Kabupaten/ Kota <i>Regency/Municipality</i>	Banyaknya Desa/Kelurahan <i>Number of Village</i>	Besarnya Bantuan per Desa (000 Rp) <i>Large of Aid per Village</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>			
01. Merauke	519	9 000	4 671 000
02. Jayawijaya	683	9 000	6 147 000
03. Jayapura	266	9 000	2 394 000
04. Paniai	136	9 000	1 224 000
05. Puncak Jaya	144	9 000	1 296 000
06. Nabire	149	9 000	1 341 000
07. Fa' Fak	161	9 000	1 449 000
08. Mimika	82	9 000	738 000
09. Sorong	316	9 000	2 844 000
10. Manokwari	465	9 000	4 185 000
11. Yapen Waropen	170	9 000	1 530 000
12. Biak Numfor	225	9 000	2 025 000
<i>Kota/Municipality</i>			
71. Jayapura	31	9 000	279 000
72. Sorong	14	9 000	126 000
Jumlah/Total 2000	3 361	-	30 249 000

Sumber : Kantor Pembangunan Desa Provinsi Papua  
 Source : Office of Village Development of Papua Province

*Lampiran 12*

Tabel Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Mimika  
Tahun 1999-2002

Tahun	1999	200/2001	2002
Jumlah	5.205	3.285	5.412

Tabel Pencari Kerja di Kabupaten Mimika Berdasarkan Daerah Asal  
Tahun 2002

Putra Daerah	Non Putra Daerah
1.684	3.728

Tabel Pencari Kerja di Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2002

Laki-laki	Perempuan
4.838	574

Tabel Pencari Kerja di Kabupaten Mimika Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2002

Sarjana Muda	SLTA	SLTP	SD
233	3.712	527	562

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2002. Tentang *Rencana Strategis Kabupaten Mimika 2002-2006*. Timika. 2002.

Lampiran 13

TABEL 5  
Pendaftaran Murid-murid pada Berbagai Tingkat, Tahun-tahun Tertentu

Tingkat	1963	1967	1970
Taman Kanak-kanak	716	1.401	1.592
Sekolah Dasar	58.913	81.014	107.058
Sekolah Menengah	3.232	6.947	13.473
Kursus-kursus Tingkat SD-SLP	131	530	735
Perguruan Tinggi (Universitas)	104	545	632

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Masalah Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Irian Barat* dan Biro Sensus dan Statistik, *Irian Barat Dalam Angka Tahun 1970*.

TABEL 6  
Jumlah murid-murid di Sekolah-sekolah Menengah, Menurut Jenis-jenis Sekolah, 1963, 1970

	1963	1970
Umum		
Sekolah Menengah Pertama	1.232	4.788
Sekolah Menengah Atas	184	952
Sekolah Tehnik		
S.T.	240	1.283
S.T.M.	40	208
Ekonomi		
S.M.E.P.	66	901
S.M.E.A.	18	458
Ilmu Rumah Tangga		
S.K.K.P.	91	1.726
S.K.K.A.	5	82
Sekolah Pendidikan Guru (SPG)	1.356	3.346
Lain-lain	0	102

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Masalah Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Irian Barat*, dan Biro Sensus dan Statistik, *Irian Barat Dalam Angka Tahun 1970*.

TABEL 7  
Alokasi Dana Pembangunan Untuk Pendidikan di Irian Barat, 1969 — 1973

Proyek	Program	Alokasi keuangan (Juta)	
Perbaikan gedung sekolah	PELITA	Rp.30.5	Perbaikan dan perlengkapan telah selesai untuk kira-kira enam sekolah.
Alat-alat olahraga untuk sekolah-sekolah	PELITA	Rp. 7.5	Selesai.
Universitas Cenderawasih	PELITA	Rp.97.1	Asrama dan ruang kuliah telah dibangun, suatu museum sedang dibangun dan langganan-langganan sudah dibayar untuk majalah-majalah dari luar negeri.
Universitas Cenderawasih	FUNDWI	\$ 0.24 Rp.21.2	Seorang profesor telah diangkat dan beasiswa dalam Lembaga Antropologi telah diberikan.
Penambahan guru untuk daerah-daerah pedalaman	TASK-FORCES	Tak diketahui	Anggaran belanja Task Forces membayar gaji 200 orang guru yang bekerja di sekolah-sekolah di daerah pedalaman.
VTC (Pusat Kejuruan Industri)	FUNDWI	Rp. 1.56	Satu pusat latihan kejuruan telah didirikan di Jayapura dan satu lagi direncanakan untuk Manokwari.
Perencanaan dan administrasi pendidikan	FUNDWI	\$ 0.18	Seorang ahli telah memberi nasehat tentang perencanaan dan koordinasi pendidikan.
Cedung sekolah dan sekolah-sekolah teladan.	FUNDWI	\$ 0.09	Satu sekolah teladan telah selesai dan satu lagi sedang dibangun.
Pendidikan guru	FUNDWI	Rp.244 \$ 0.61	Persediaan nasehat ahli dan perlengkapan untuk IKIP dan bantuan untuk latihan guru telah dimulai.
Perencanaan pendidikan di daerah-daerah pegunungan	FUNDWI	\$ 0.065	

Sumber: Terbitan-terbitan resmi & Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber: Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*, Jakarta, Gramedia, 1979, hlm. 39.

TABEL 8  
 Universitas Cenderawasih: Jumlah Mahasiswa, Beasiswa,  
 Tamatan-tamatan dan Staf Pengajar, tahun 1970

	Jumlah Mahasiswa			Beasiswa	Tamatan	Staf Pengajar	
	Kelahiran Irian Jaya	BUKAN kelahiran Irian Jaya	Total			Tetap	Tidak Tetap
Hukum	163	211	374	110	71	14	20
Pendidikan	42	23	65	22	18	6	15
Pendidikan Guru	82	69	151	60	37	23	9
Pertanian	28	14	42	28	10	2	29
Institut Antropologi	—	—	—	—	—	6	—
JUMLAH	299	333	632	220	126	51	73

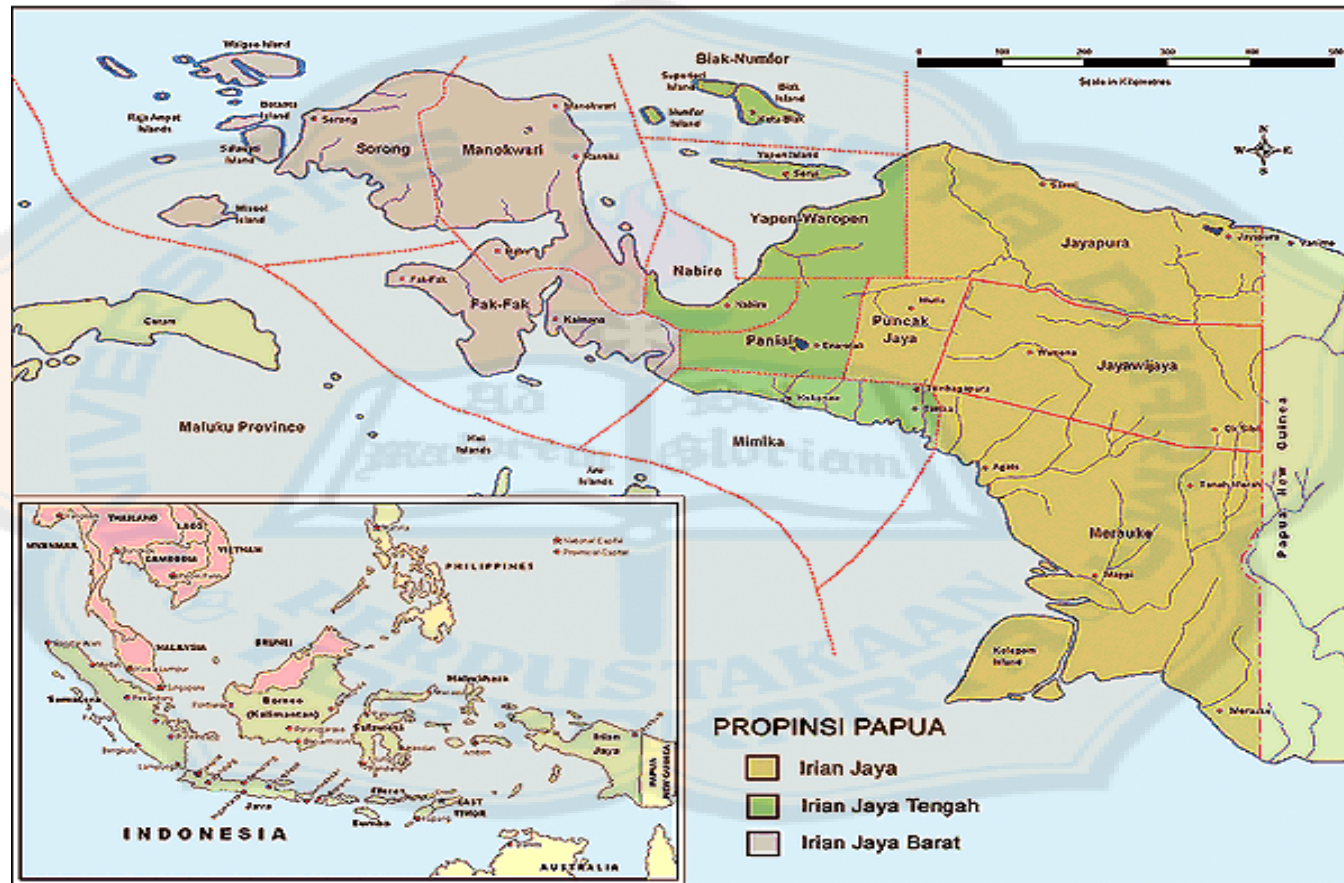
Sumber: Universitas Cenderawasih.

Sumber: Ross Garnaut dan Chris Manning, *Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya*, Jakarta, Gramedia, 1979, hlm. 41.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 14

## PETA PEMBAGIAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2001



Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PETA UMUM IRIAN JAYA

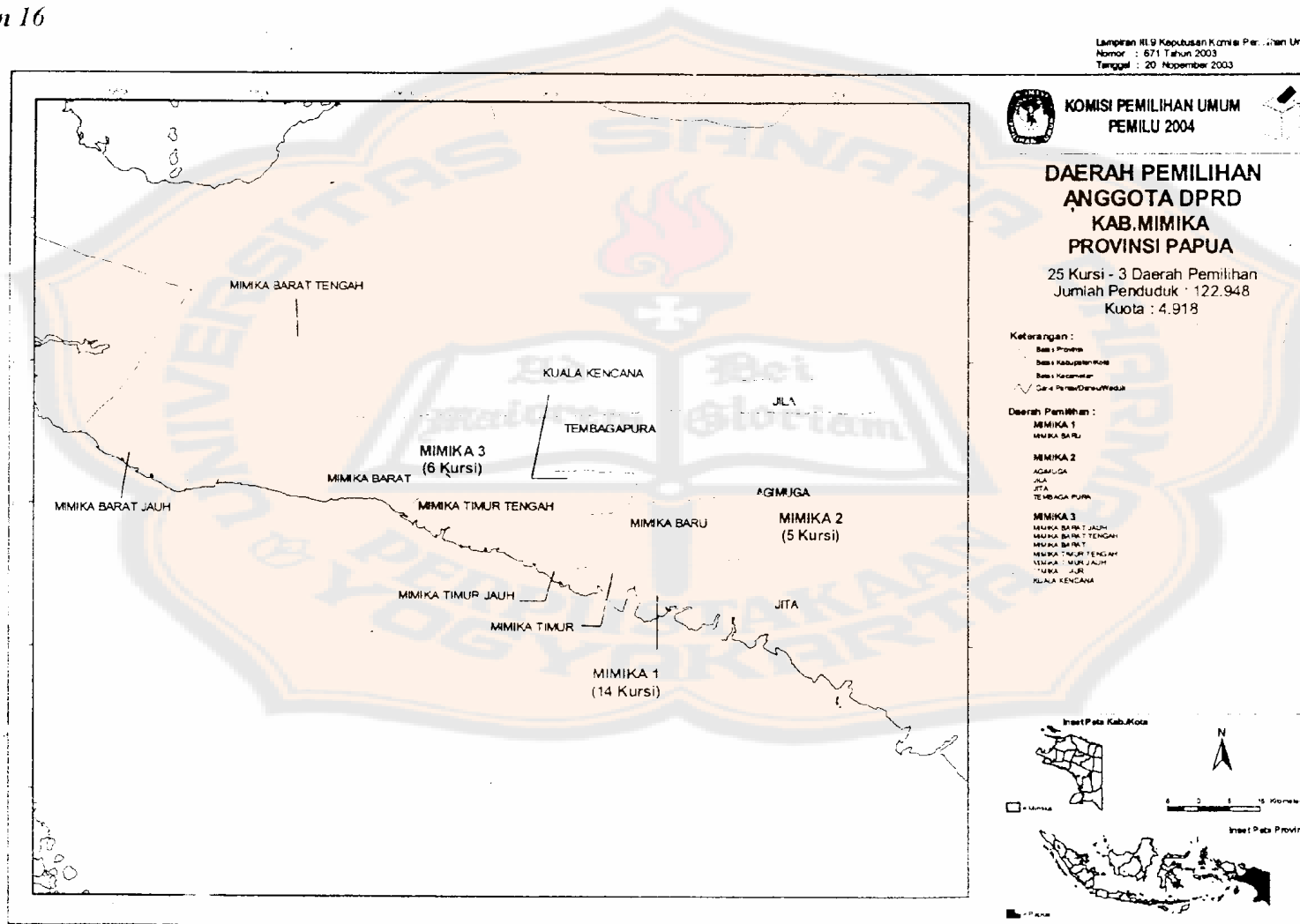


Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 41.





Lampiran 16



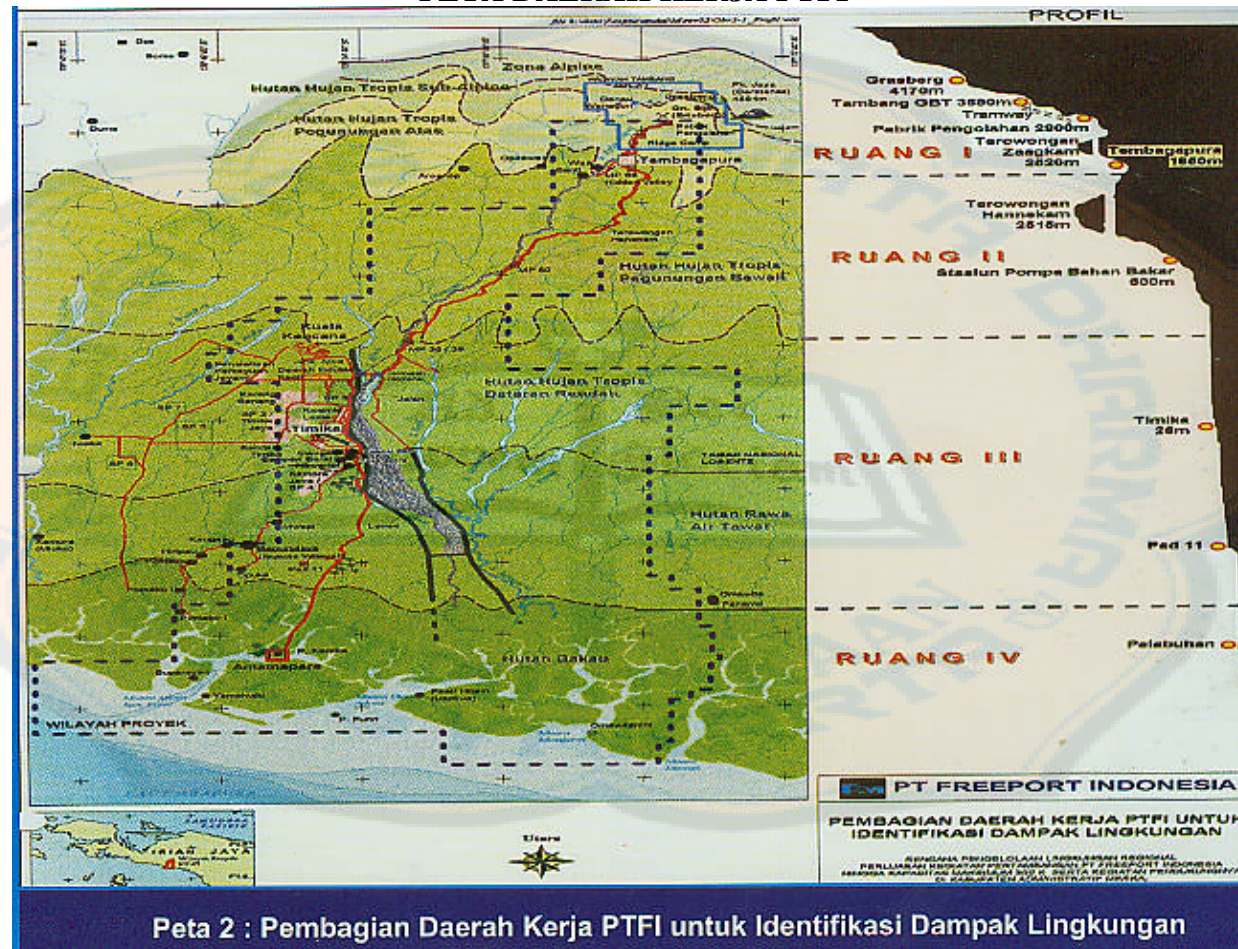
Sumber: <http://www.papua.org/peta-mimika/>  
Download jam 20.07 hari Rabu, 8 Juni 2005



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 17

## PETA DAERAH KERJA PTFI



Peta 2 : Pembagian Daerah Kerja PTFI untuk Identifikasi Dampak Lingkungan

Sumber: Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta, Pustaka Raja, 2003, hlm. 65.



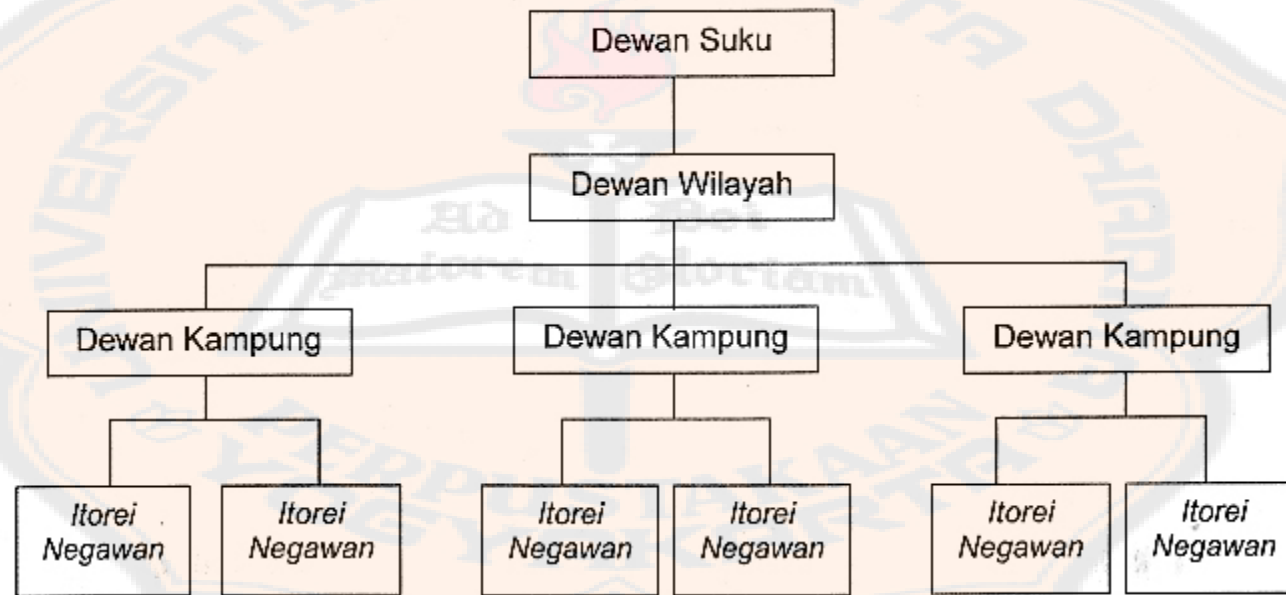




# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 19

**Bagan 1**  
**Struktur Pemerintahan Adat Suku Amungme**



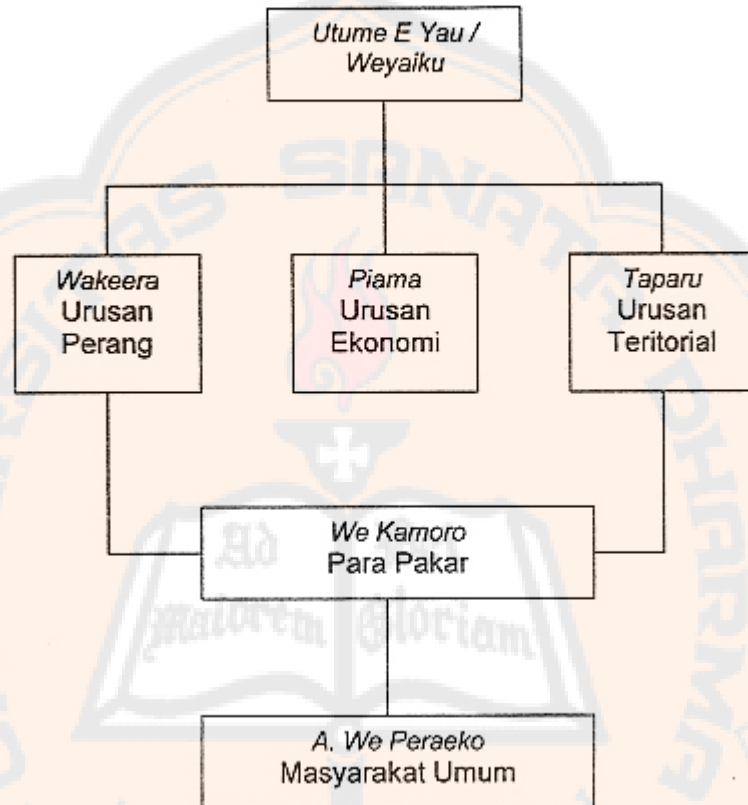
Sumber: Lesnusa, 1999: 63

Sumber: Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta, Pustaka Raja, 2003, hlm. 56.



Lampiran 20

Bagan 2  
Susunan Pemerintahan Adat Suku Kamoro



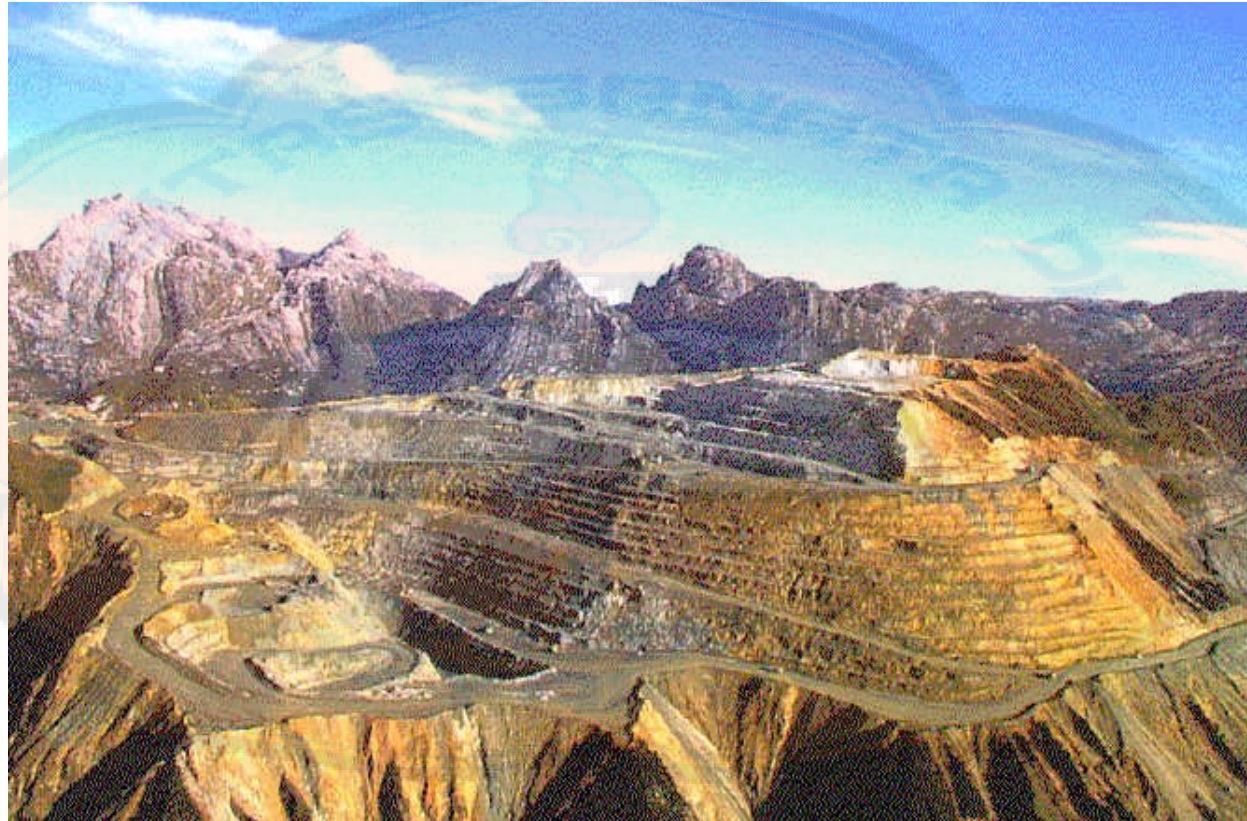
Sumber: hasil penelitian

Sumber: Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta, Pustaka Raja, 2003, hlm. 61.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Lampiran 21*

### **GUNUNG GRASBERG**



Gunung yang ditambang oleh Freeport

Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Lampiran 22

### PROSES OPERASI PENAMBANGAN FREEPORT



Gambaran umum kegiatan

Saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) memakai dua teknik pertambangan, yakni *open-pit* atau tambang terbuka yang menggunakan truk pengangkut dan sekop listrik besar di tambang Grasberg, serta teknik *block-caving* pada cadangan bawah tanah yang dikenal sebagai *Intermediate Ore Zone* (IOZ) dan *Deep Ore Zone* (DOZ).

Gambaran umum kegiatan pengolahan bijih mulai dari proses penambangan hingga pengapalan konsentrat dapat terlihat pada gambar di bawah. Bijih yang telah dihancurkan diangkut ke pabrik pengolahan melalui rangkaian ban berjalan dan terowongan bijih (*ore pass*). Proses konsentrasi meliputi berbagai teknik, termasuk penghancuran, penggilingan, dan pengapungan. Gabungan teknik penghancuran yang termasuk penggunaan mesin *Semi Autogenous Grinding* (SAG) dan *Ball Mill* digunakan untuk menghancurkan bijih tambang menjadi pasir yang sangat halus.

Selanjutnya, diikuti dengan proses pengapungan yang menggunakan *re-agent*, bahan yang berbasis alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas, dan perak. Mineral-mineral yang mengapung ke permukaan kemudian dicituk permukaannya (*skimmed-off*) sebagai produk akhir. Sisa dari batuan yang tidak memiliki nilai ekonomi akan mengendap di bagian dasar sebagai *tailing*, yang dilepaskan melalui arus sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah.

Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.

## PABRIK PENGOLAHAN FREEPORT

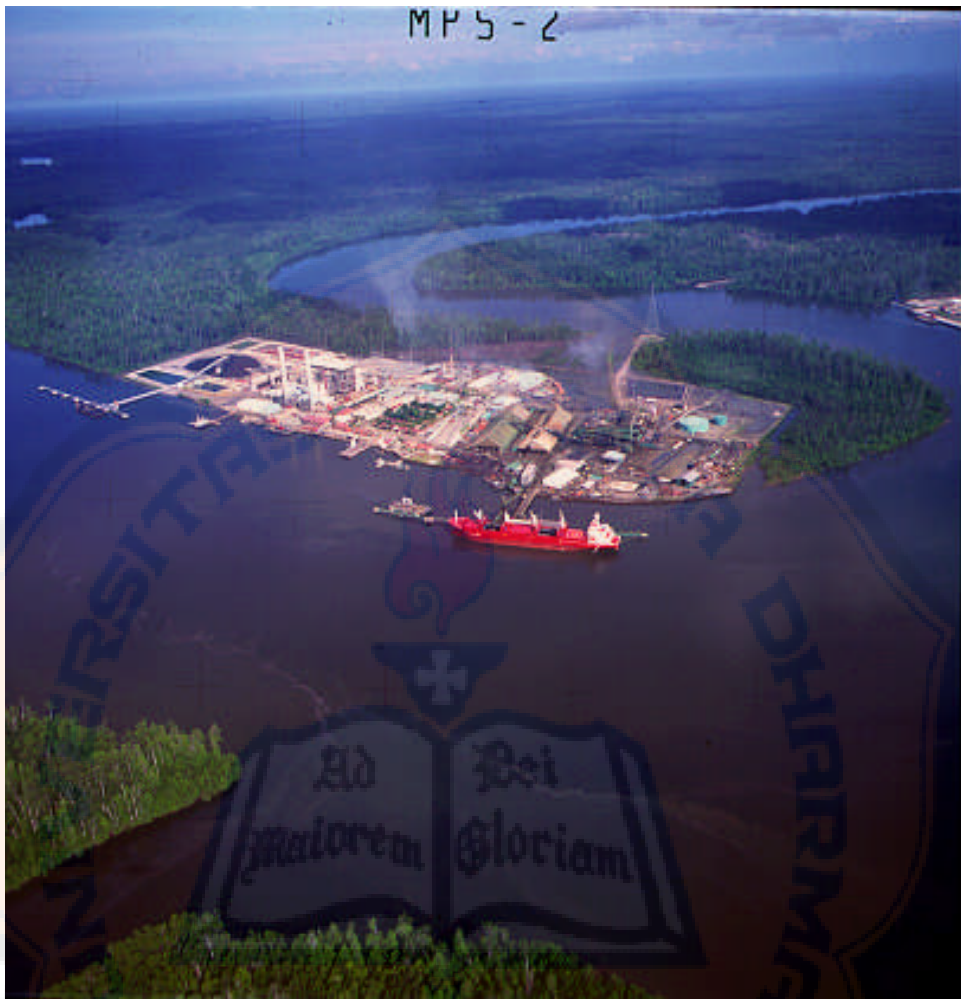


Pabrik Pengolah

Konsentrat dalam bentuk bubuk disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare, melalui pipa sepanjang 110 km. Konsentrat yang telah dikeringkan disimpan di pelabuhan Amamapare sebelum dijual dan dikapalkan ke pabrik-pabrik peleburan di seluruh dunia.

Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.

**PELABUHAN PENGAPALAN FREEPORT DI AMAPARE**



Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



*Lampiran 23*

**DAERAH PEMBUANGAN TAILING SUNGAI AIJWA**



Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 268.

**DAERAH PENGOLAHAN TAILING**



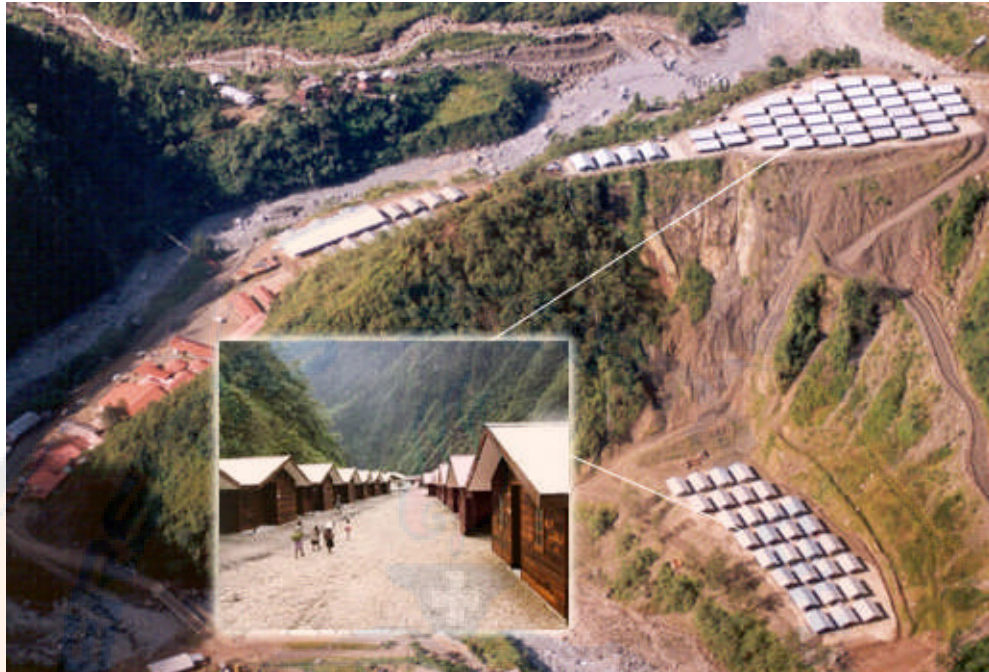
Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## *Lampiran 24*

### **PERKAMPUNGAN BANTI SUKU AMUNGME**



Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.

### **RUMAH RAKYAT DI TEMBAGAPURA**



Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



*Lampiran 25*

**KOTA TEMBAGAPURA**



Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Lampiran 26*

### **KOTA KUALA KENCANA**

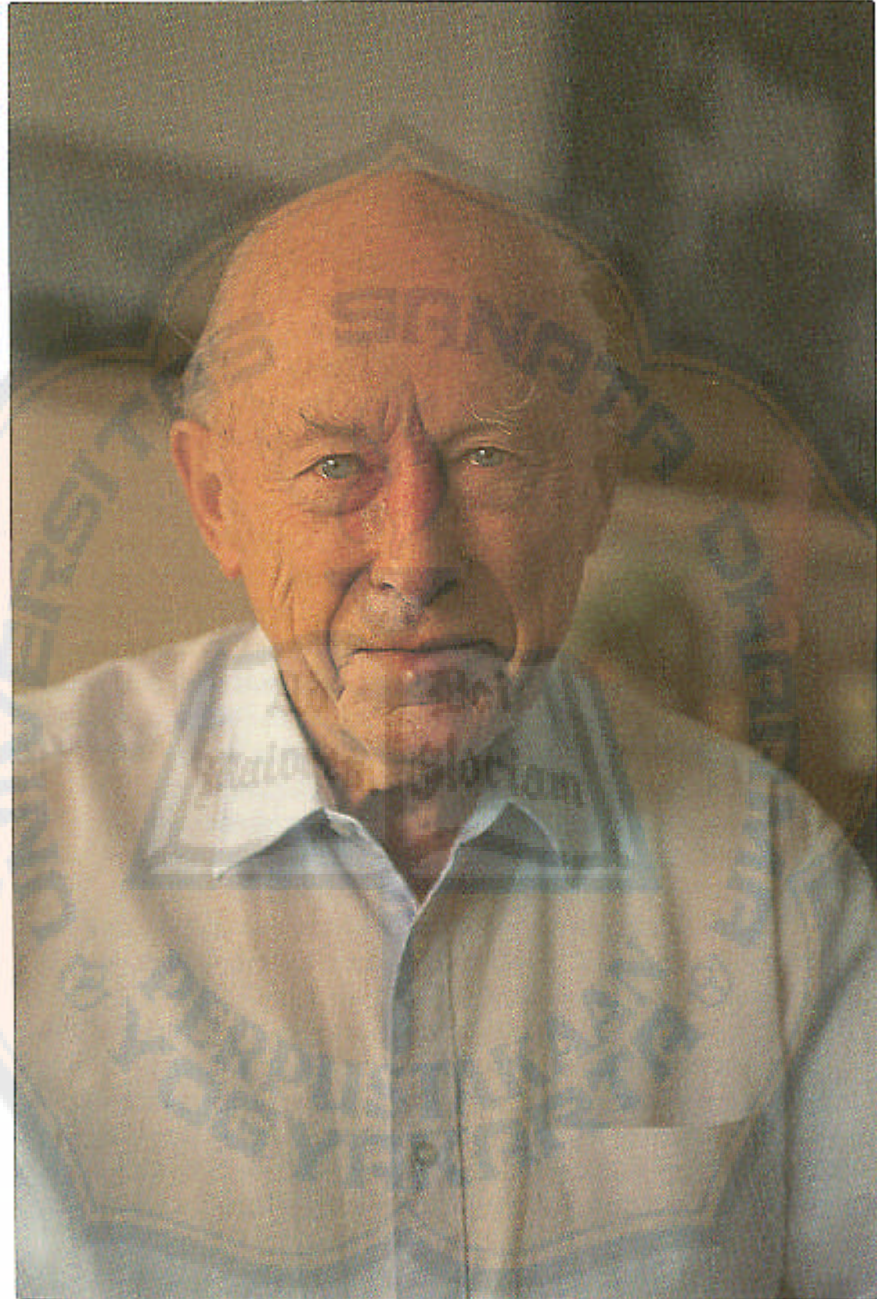


Sumber: Dokumentasi PT Freeport Indonesia, 2001.



*Lampiran 27*

**JEAN JACQUES DOZY**



Jean Jacques Dozy, in 1995

Jean Jacques Dozy adalah anggota ekspedisi Colijn dari Belanda yang menemukan kandungan mineral tembaga pada Gunung Ertsberg di Papua. Foto diambil oleh Kal Muller tahun 1995.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 65.



**EKSPEDISI COLIJN**



Gambar Ekspedisi Colijn tahun 1936 yang dalam perjalanannya disertai oleh orang Kamoro. Foto diambil J. J. Dozy pada tahun 1936.



Gambar Ekspedisi Colijn yang dalam perjalanannya disertai oleh orang Dayak. Foto diambil J. J. Dozy pada tahun 1936.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 56-57.



*Lampiran 28*

**ORANG AMUNGME**



KAL MULLER, 1995

Gambar seorang laki-laki Amungme yang sekarang tinggal di Perkampungan Banti. Di sana Freeport melengkapi mereka dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Foto diambil oleh Kal Muller tahun 1995.



J. J. DOZY, 1936

Gambar sekelompok laki-laki Amungme dari Nargi hamlet. Foto diambil J. J. Dozy pada tahun 1936. Nargi berada di sebelah barat Perkampungan Banti antara Wanagong dan Opitawak.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 292-293.

**ORANG AMUNGME**



Gambar tiga orang Amungme penjual sayuran di pasar Kwamki Lama. Meskipun mereka berasal dari dataran tinggi yang masih tradisional tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat Timika. Foto diambil oleh Kal Muller tahun 1995.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 320.



*Lampiran 29*

**ORANG KAMORO**



Gambar sekelompok orang Kamoro di sebuah rumah panjang Kamoro di Tiwaka.  
Foto diambil oleh Kal Muller tahun 1995.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 297.

## ORANG KAMORO



Gambar orang Kamoro. Foto diambil oleh Kal Muller tahun 1985.

Sumber: Mealey, George A., *Grasberg*, Singapore, Freeport-Mc MoRan Copper & Gold Inc., 1996, hlm. 40.

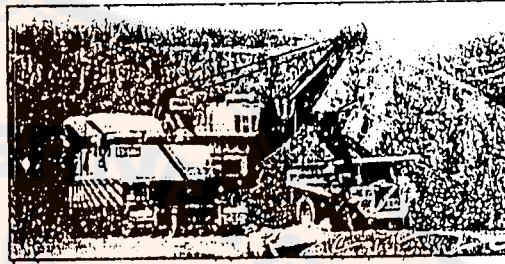
Lampiran 30



SEJARAH SINGKAT PTFI

2001

- FCX dan PTFI menandatangani suatu perjanjian Dana Perwalian (*Trust Fund*) sukarela dengan para penduduk desa Amungme dan Kamoro yang tinggal paling dekat dengan wilayah operasi tambang dengan memberikan dana awal sebesar \$2,5 juta dan dana tahunan sebesar \$500.000 yang diberikan setelahnya.



Shovel listrik P&H sedang menuangkan muatan ke sebuah haul truck di Grasberg.

- Kompleks penambangan dan penggilingan. Grasberg mencetak angka-angka rekor, yang tanpak dari catatan tahunan yang memuat tentang jumlah total penggilingan harian, laju perolehan emas (*recovery rate*), dan produksi emas. Di samping itu PTFI juga mencatat total biaya produksi bersih terendah, termasuk pemasukan dari sektor emas dan perak sebesar \$0,07 per *pound* tembaga pada tahun 2001.
- Rekor operasi tahunan: 237.800 metrik ton per hari (rekor bulanan: 255.200 metrik ton per hari pada bulan Desember 2001); 89,5 persen laju perolehan emas (rekor triwulanan: 91,6 persen pada triwulan keempat tahun 2001); 3,5 juta *ounce* agregat produksi emas.

2000

- Nota Kesepahaman (MoU) yang membahas tentang sumber-sumber daya sosio-ekonomis, hak asasi manusia, hak atas tanah dan hak atas lingkungan hidup diumumkan oleh para pemimpin LEMASA, organisasi rakyat Amungme; LEMASKO, organisasi rakyat Kamoro; dan PTFI
- Tambang bawah tanah *Deep Ore Zone* (DOZ) mulai terproduksi.

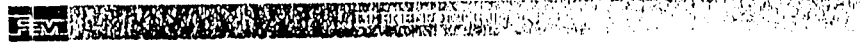
1999

- Audit Lingkungan Montgomery-Watson diserahkan ke PTFI pada bulan Desember. Auditor tersebut menyimpulkan bahwa "Sistem Manajemen Lingkungan yang dikembangkan dan diterapkan PTFI bisa dijadikan teladan dan proyek percontohan bagi industri pertambangan".

1998

- Kegiatan FCX memperlihatkan peningkatan volume penjualan tembaga dan emas; penurunan biaya produksi per unit; bertambahnya wilayah penemuan cadangan cadangan bijih dan sumber-sumber daya geologis; dan kemajuan yang terukur dan berkesinambungan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasi.
- Pada awal bulan Januari, Concentrator 4 mulai meningkatkan produksinya melampaui 200.000 TPD (*Tons Per Day*). Tampak adanya peningkatan penghematan biaya produksi per unit secara terus-menerus dan penambahan kemungkinan cadangan-cadangan bijih.
- PT Smelting, sebuah instalasi peleburan tembaga modern yang 25% sahamnya dimiliki oleh PTFI, memulai operasinya di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. PT Smelting hanya mengolah konsentrat tembaga dari PTFI.





1997

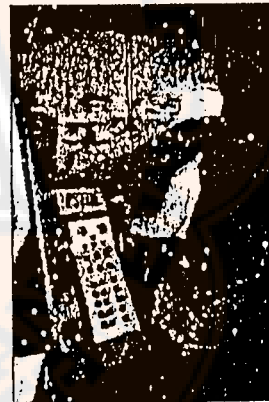
- New Fourth Concentrator Mill selesai, menjadikan FCX sebagai salah satu pemimpin di dunia dalam hal produksi tembaga dan emas dengan volume besar/biaya rendah.
- Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menyetujui studi AMDAL regional yang dilakukan PTFI, yang memungkinkan ekspansi dan volume penggilingan sampai batas maksimum sebesar 300.000 TPD.
- Peningkatan cadangan bijih nyata PTFI dan cadangan yang mungkin ada adalah 2,6 kali produksi tembaga tahun 1997 dan lebih dari 3 kali produksi emasnya.
- Audit Sosial Labat-Anderson diserahkan kepada PTFI dan Menteri Lingkungan Hidup dan badan administrasi Freeport Fund for Irian Jaya Development melakukan perubahan-perubahan besar agar lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan desa-desa sekitar.

1996

- Tim eksplorasi PTFI menemukan kandungan mineral yang amat bagus di area Kucing Liar dengan "Segitiga Emas" PTFI.
- PTFI mulai berpartisipasi dalam Rencana Pengembangan Timika Terpadu yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia.
- PTFI menjalani audit sosial dan lingkungan secara sukarela dan menunjukkan hasil positif.

1995

- PTFI mempersembahkan Kuala Kencana, kota pertama di Papua dengan fasilitas bawah tanah, distribusi air tersentral, serta pengumpulan dan pengolahan limbah rumah tangga.
- PTFI mengumumkan kerjasama strategis dengan Rio Tinto.
- Rencana lingkungan (RKL dan RPL) disetujui.
- Ekspansi 118k dicapai lebih awal dari jadwal.
- Jumlah total cadangan bijih naik menjadi 1,9 milyar ton.



Operator shovel sedang bekerja.

1994

- Studi dampak lingkungan 160.000 ton per hari PTFI disetujui.
- *Joint venture* dengan Gresik Smelter diumumkan.
- Jumlah total cadangan bijih naik menjadi 1,1 milyar ton.

1993

- Diumumkan kerjasana *joint venture* melalui pembelian asset-aset non-tambang PTFI. Rencana ekspansi menuju 105.000 TPD disetujui DPR, yang akan ditingkatkan sampai 118.000 TPD pada akhir tahun. Produksi rata-rata tahun 1993 adalah 62.300 TPD dengan produksi pada bulan Desember sebesar 74.600 TPD.
- Freeport-McMoRan menuntaskan proses pengambilalihan Rio Tinto Mineral di Spanyol yang aset utamanya adalah perusahaan peleburan tembaga.

1992

- Laporan mengenai cadangan bijih dikoreksi menjadi 786 juta metrik ton. Produksi mencapai rata-rata 57.569 TPD, dengan pencapaian kapasitas sampai 66.000 TPD menjelang paruh kedua 1993.
- Studi Kelayakan untuk 90.000 TPD diselesaikan pada bulan Agustus dan DPR menyatakan persetujuannya.





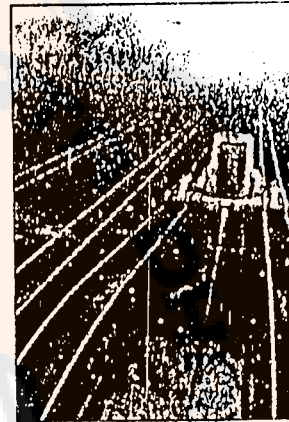
- Pengeboran sukses di Big Gossan, DOZ/IOZ, serta lokasi-lokasi lainnya yang merupakan pertanda baik tentang prospek penambahan cadangan di masa mendatang.

1991

- Cadangan bijih dinyatakan mencapai 483 juta metrik ton.
- Kantor Menteri Pertambangan Indonesia dan PTFI menandatangani Kontrak Karya baru dengan jangka waktu 30 tahun dengan kemungkinan diperpanjang dua kali selama masing-masing 10 tahun.
- Menjelang pertengahan tahun, produksi mencapai rata-rata sebesar 35.200 TPD.

1990

- Proyek ekspansi 52.000 TPD berjalan sesuai dengan anggaran dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Sebuah *adit* (terowongan tegak lurus) sepanjang dua kilometer yang didesain untuk mengangkut bijih dari jalur bijih (*ore pass*) langsung ke tempat penampungan di lokasi penggilingan dapat dikatakan telah selesai.



Trem seperti inilah yang membawa bijih ke lokasi Mill sebelum dibuatnya ore pass pada tahun 1989

- Tercatat pencapaian produksi sebesar 31.700 TPD.

1989

- Jalur bijih mulai dioperasikan sehingga bijih dari Ertzberg East tidak lagi melewati trem.
- Rencana peningkatan produksi sampai 32.000 TPD disetujui pada bulan Februari.
- Studi Kelayakan 52.000 TPD dirampungkan pada bulan Mei dan pendanaan proyek didapatkan pada bulan Oktober.
- Izin eksplorasi tambahan 6,1 juta *acre* diberikan oleh Pemerintah Indonesia.
- Produksi mencapai rata-rata 24.700 TPD.

1988

- Kandungan tembaga-emas Grasberg ditemukan.
- Freeport-McMoRan Copper (FCX) ditawarkan kepada publik di NYSE.
- Produksi mencapai rata-rata 18.600 TPD.
- Dengan ditemukannya bijih di Grasberg dan tempat-tempat lainnya, keseluruhan cadangan bijih meningkat menjadi 200 juta ton.

1987

- Produksi harian rata-rata meningkat menjadi lebih dari 16.000 TPD, lebih dari dua kali lipat dari kapasitas yang direncanakan pada tahun 1967. Temuan-temuan cadangan bijih baru melampaui kapasitas produksi; cadangan bijih total pada saat itu adalah 100 juta ton.

1985

- Tambahan kandungan tembaga bawah tanah ditemukan di bawah tambang Ertzberg East.

1981

- Studi Kelayakan tambang bawah tanah Ertzberg East disetujui, Freeport-McMoRan menyatakan keinginannya kepada Pemerintah Indonesia untuk menggarap bijih baru tersebut.

1976

- Pemerintah Indonesia membeli 8,5% saham PTFI dari Freeport Minerals Company dan investor lain.



- 1975
  - Dimulai pekerjaan eksplorasi kandungan tembaga di Ertsberg East bawah tanah.
- 1973
  - Ertsberg dinyatakan sudah beroperasi; kontrak 30 tahun dimulai.
  - Proyek mulai dijalankan oleh PTFI; kota di situ dinamai Tembagapura.
- 1972
  - Pengapalan pertama konsentrat tembaga Ertsberg untuk diekspor.
- 1970
  - Konstruksi proyek berskala besar dimulai.
- 1969
  - Studi Kelayakan dirampungkan dan disetujui.
  - Kontrak-kontrak penjualan dan perjanjian-perjanjian pendanaan proyek jangka panjang dalam tahap negosiasi. Studi Kelayakan proyek sedang dikerjakan.
- 1967
  - Pengeboran eksplorasi dimulai di Ertsberg.
  - Kontrak Karya ditandatangani, menjadikan PTFI sebagai kontraktor tambang tunggal untuk Ertsberg dan wilayah sekitarnya seluas 10 km persegi. Periode kontrak 30 tahun akan dimulai begitu proyeknya dinyatakan beroperasi.
- 1966
  - Pembuatan konsep Kontrak Karya untuk Ertsberg.
  - Tim Freeport diundang ke Jakarta untuk melakukan diskusi awal menyangkut suatu kontrak penambangan untuk Ertsberg.
  - Presiden Soekarno memberikan kuasa penuh kepada Jenderal Soeharto setelah percobaan kudeta oleh komunis pada bulan September 1965.
  - Terbentuk pemerintahan baru yang moderat dan pragmatis yang mendorong datangnya para investor swasta dan dilakukannya langkah-langkah reformasi ekonomi lainnya.
- 1963
  - Pemerintah Belanda menyerahkan Netherlands New Guinea kepada PBB, yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia. Rencana proyek penambangan ditanggihkan karena kebijakan anti investasi swasta dari rezim Soekarno saat itu.
- 1960
  - Ekspedisi Freeport yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Del Flint menemukan kembali Ertsberg.
- 1936
  - Ekspedisi Colijin, termasuk Jean-Jacques Dozy, adalah kelompok asing pertama yang mencapai glasier Pegunungan Jayawijaya dan menemukan Ertsberg.



*Ekspedisi Colijin, termasuk Jean-Jacques Dozy, adalah kelompok asing pertama yang mencapai glasier Pegunungan Jayawijaya dan menemukan Ertsberg.*

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

268

## SILABUS

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Satuan Pendidikan : SMA  
 Kelas/Semester : XI/2  
 Tahun Pelajaran : 2007/2008  
 Standar Kompetensi : Menganalisis sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad ke-20.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi	Pengalaman Belajar	Penilaian			Waktu	Sumber
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
Menganalisis pengaruh revolusi industri di Eropa terhadap perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia	Mendeskripsikan masuknya sistem perekonomian Eropa di Papua abad ke-20 yang berpengaruh terhadap perubahan sosial, yaitu terbentuknya Kota Timika	1. Proses awal berdirinya Kota Timika a. Latar belakang berdirinya kota b. Berdirinya kota c. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya kota	Melalui diskusi kelompok siswa mendeskripsikan proses awal berdirinya Kota Timika	Test	Essay	1. Jelaskan latar belakang berdirinya Kota Timika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya!	2x45 menit	George A. Mealey, <i>Grasberg</i> , 1996, Singapore: Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
	Menganalisis pengaruh usaha tambang Freeport di Timika terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan kehidupan masyarakat Kota Timika	2. Pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika a. Pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya	Melalui tanya jawab siswa menjelaskan pengaruh usaha tambang Freeport terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan kehidupan masyarakat Kota Timika			2. Jelaskan pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap lingkungan fisik di sekitarnya dan masyarakat Kota Timika!		Ngadisah. 2003. <i>Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua</i> . Yogyakarta: Pustaka Raja.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

269

		b. Pengaruh PT. Freeport Indonesia terhadap masyarakat Kota Timika						
	Mendeskripsikan perkembangan Timika tahun 1960-2001 sebagai dampak perekonomian Freeport	3. Perkembangan Timika tahun 1960-2001 a. Perkembangan Timika di bidang ekonomi, sosial, sarana dan prasarana fisik serta pemerintahan b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Timika c. Posisi penduduk asli dalam perkembangan Timika	Melalui diskusi kelompok siswa mendeskripsikan perkembangan Timika tahun 1960-2001 sebagai dampak perekonomian Freeport	Test	Essay	3. Jelaskan perkembangan Timika tahun 1960-2001 di bidang ekonomi, sosial, sarana dan prasarana fisik serta pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya!		Budhisantoso, S., dkk., 1995. <i>Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya</i> . Jakarta: Depdikbud.

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 23 Maret 2007  
Guru Mata Pelajaran

Nama  
NIP

Anna Asmara S.